

**ANALISIS DETERMINAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
DETEKSI ILUSI FISKAL
(Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

BAHRUL ULUM RUSYDI
NIM. C2B006016

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Bahrul Ulum Rusydi

Nomor Induk Mahasiswa : C2B006016

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS DETERMINAN KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DAN DETEKSI ILUSI
FISKAL (Studi Kasus Provinsi di
Indonesia Tahun 2005-2008)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.

Semarang, September 2010

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.)
NIP. 196901211997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Bahrul Ulum Rusydi

Nomor Induk Mahasiswa : C2B006016

Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS DETERMINAN KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DAN DETEKSI ILUSI
FISKAL (Studi Kasus Provinsi di
Indonesia Tahun 2005-2008)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 September 2010

Tim Penguji

1. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. (.....)
2. Prof. Dr. FX. Sugiyanto, M.S. (.....)
3. Banatul Hayati, S.E., M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya Bahrul Ulum Rusydi, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) dari Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain. Semua informasi yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari karya orang lain baik yang dipublikasikan atau tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Semarang, September 2010

Bahrul Ulum Rusydi
C2B006016

ABSTRACT

Regional financial capacity and performance is one of the measurements that can be used to see how the capacity of the region to run the regional autonomy. There are two regional financial dimensions which are revenue side and expenditure side. The revenue side is reflected by PAD meanwhile the expenditure side is depicted by regional expenditure.

This study aims to analyze the regional financial determinant of the government in regional autonomy and to detect fiscal illusion in provincial government in Indonesia. Regional financial determinant analysis is used by utilizing simultaneous equation where the simultaneous relationship is shown by interplay relationship between PAD and provincial expenditure. Fiscal illusion detection method provides revenue enhancement. The sample of this research covers all province in Indonesia from 2005 to 2008.

The result of this study shows that there is significant relationship between PAD and regional expenditure. PAD is able to increase the regional expenditure 0,67 million rupiah every 1 million PAD increase, whereas the regional expenditure can improve PAD 0,07 million rupiah every 1 million regional expenditure increase. In addition, this study also found that there was no fiscal illusion in provincial financial performance.

Key words : financial determinant performance, PAD, regional expenditure, fiscal illusion.

ABSTRAK

Kinerja dan kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dimensi keuangan daerah mencakup sisi penerimaan dan sisi pengeluaran daerah, dimana sisi penerimaan ditunjukkan oleh PAD, sedangkan sisi pengeluaran adalah belanja daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di era otonomi serta mendeteksi fenomena ilusi fiskal pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Analisis determinan kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan persamaan simultan dimana hubungan simultan ditunjukkan oleh hubungan saling mempengaruhi antara PAD dengan belanja daerah provinsi. Metode deteksi ilusi fiskal menggunakan pendekatan pendapatan (*revenue enchancement*). Sampel penelitian adalah seluruh provinsi di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan saling mempengaruhi yang signifikan antara sisi penerimaan (PAD) dengan sisi pengeluaran (belanja daerah). PAD mampu meningkatkan belanja daerah sebesar 0,67 juta rupiah setiap kenaikan 1 juta PAD, sedangkan belanja daerah mampu meningkatkan PAD sebesar 0,07 juta rupiah setiap kenaikan 1 juta belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat ilusi fiskal di dalam kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi.

Kata Kunci : Determinan kinerja keuangan, PAD, belanja daerah, ilusi fiskal

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi Di Indonesia Tahun 2005-2008)”.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Moch. Chabacib, M.Si, Akt, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Dr. Hadi Sasana, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP selaku dosen wali dan seluruh dosen jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
4. Ayahanda tercinta Drs. Muh. Rusydi Thahir,SH,MH dan ibunda tercinta Andi Sundari,SH yang telah mendidik dan memberikan yang terbaik serta tempat berbagi dalam cinta dan kasih sayang.

5. Kakak dan adik-adik tercinta: Nurfadhilah Ekawati Rusydi, SP, Nurhikmahsari Nawangsih Rusydi, Bustanul Arifien Rusydi, dan Zulfikar Rusydi, yang selalu mendorong dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
6. Drs. Thahir Toagga (alm), Andi Panawang Karaeng Lewa (alm), Sitti Hawang Dg. Bau (almh) dan Hj. Siti Asmah (almh) yang memberikan kasih sayang tak terhingga hingga akhir hayat.
7. Andi Fatmawati Rachman, yang senantiasa mendukung dan mendampingi penulis dalam segala kondisi. Senyummu menghibur lara dan sejukkan hari-hariku.
8. Sahabat terbaikku: Abra PGT, Rezal, Mamed, Fajar, Kaka Kharis, Desy, Tina, Selly, Tika, Manda, Yuki, dan Ishom. Semoga persahabatan kita kekal selamanya. Amien.
9. Teman-teman Jurusan IESP angkatan 2006 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas persahabatan kita yang terjalin selama di bangku kuliah.
10. Kawan-kawan seperantauan di Asrama Sultan Semarang, Kak Nico, Kak Akka, Kak Dudi, Kak Icut, Kak Ical, Kak Ono, Kak Baso, Kak Aan, Kak Alan, Kak Eka, Arifin, Gugun, dan Ardi.
11. Teman-teman IKAMI SUL-SEL Semarang. Terima kasih atas jalinan persaudaraan yang membuat penulis serasa di kampung halaman.
12. Teman-teman KKN Desa Banding, Kecamatan Bringin Tahun 2009, Adit, Ivan, Fajar, Rofi'i, Wahyudi, Toni, Rully, Ita, Ratna, New, Hani, Islah, Okti, Nadia, Galuh, Prima, dan Retno.

13. Adik-adik asistensi IESP 2008 Reg.1, Manajemen 2008 Reg.2, dan IESP 2008 Reg.2.

14. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuannya selama penulis menjalani perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan.

Semarang, September 2010

Bahrul Ulum Rusydi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.4. Sistematika Penulisan	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Landasan Teori.....	16
2.1.1 Teori Produksi.....	16
2.1.2 Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	18
2.1.3 Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	23
2.1.4 Sistem Hubungan Keuangan dan Pendekatan Hubungan Keuangan Pusat-Daerah	25
2.1.5 Perilaku Pemerintah Daerah Atas Transfer Pemerintah Pusat	26
2.1.6 Fenomena Ilusi Fiskal	28
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah	29
2.1.8 Belanja Daerah	33
2.1.9 Dana Perimbangan	35
2.1.10 Kinerja Keuangan Daerah.....	37
2.1.11 Dana Alokasi Umum.....	40
2.1.12 Daya Pajak	42

2.1.13	Deteksi Ilusi Fiskal.....	44
2.1.14	Hubungan PDRB dengan Belanja Daerah	45
2.1.15	Hubungan Pajak Daerah dengan Belanja Daerah	46
2.1.16	Hubungan Reribusi Daerah dengan Belanja Daerah.....	47
2.1.17	Hubungan DAU dengan Belanja Daerah	48
2.1.18	Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah	49
2.1.19	Hubungan Belanja Daerah dengan PAD.....	49
2.1.20	Hubungan Daya Pajak dengan PAD	51
2.2	Penelitian Terdahulu	52
2.3	Kerangka Pemikiran.....	56
2.4	Hipotesis.....	59
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	60
3.2.	Jenis dan Sumber Data.....	64
3.3.	Metode Pengumpulan Data	65
3.4.	Metode Analisis	66
3.4.1	Alat Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	66
3.4.2	Alat Analisis Deteksi Ilusi Fiskal.....	71
3.5.	Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	73
3.6.	Metode Pengujian Hipotesis	78
 BAB IV PEMBAHASAN		
4.1.	Deskripsi Obyek Penelitian.....	82
4.1.1	Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	86
4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	90
4.2	Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	114
4.3	Deteksi Ilusi Fiskal.....	132
 BAB V PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	141
5.2.	Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA		143
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Dana Perimbangan dan PAD Provinsi Tahun 2005-2008.....	5
Tabel 1.3	Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Provinsi Tahun 2005- 2008	6
Tabel 1.2	Belanja Daerah Provinsi Tahun 2005-2008	8
Tabel 4.1	Daftar Provinsi di Pulau Sumatera	83
Tabel 4.2	Daftar Provinsi di Pulau Jawa	84
Tabel 4.3	Daftar Provinsi di Pulau Sulawesi.....	84
Tabel 4.4	Daftar Provinsi di Pulau Kalimantan	85
Tabel 4.5	Daftar Provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.....	86
Tabel 4.6	Perkembangan Belanja Daerah Provinsi di Indonesia	92
Tabel 4.7	Perkembangan PDRB Provinsi di Indonesia.....	96
Tabel 4.8	Perkembangan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia.....	99
Tabel 4.9	Perkembangan Retribusi Daerah Provinsi di Indonesia.....	103
Tabel 4.10	Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi di Indonesia	106
Tabel 4.11	Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi di Indonesia.....	109
Tabel 4.12	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi di Indonesia	112
Tabel 4.13	Ringkasan Hasil Regresi Persamaan Struktural 1	118
Tabel 4.14	Ringkasan Hasil Regresi Persamaan Struktural 2	121
Tabel 4.15	Hasil Regresi Utama Deteksi Ilusi Fiskal	133
Tabel 4.16	Deteksi Ilusi Fiskal.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Daya Pajak Total Provinsi di Indonesia Tahun 2002-2008	8
Gambar 2.1 Kurva Isokuan	17
Gambar 2.2 Skema Kerangka Penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	57
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran Deteksi Ilusi Fiskal	58
Gambar 4.1 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	128
Gambar 4.2 Daya Pajak Provinsi Tahun 2005-2006.....	130
Gambar 4.3 Skema Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Menatah	146
Lampiran 2	<i>Reduced Form</i> Persamaan Struktural 1	150
	<i>Reduced Form</i> Persamaan Struktural 2	151
Lampiran 3	Regresi <i>Reduced Form</i> Persamaan Struktural 1	152
Lampiran 4	Regresi <i>Reduced Form</i> Persamaan Struktural 2.....	153
Lampiran 5	Hasil Regresi Persamaan Struktural 1	154
Lampiran 6	Uji Park Persamaan Struktural 1	155
Lampiran 7	Regresi Persamaan Struktural 2	156
Lampiran 8	Uji Park Persamaan Struktural 2	157
Lampiran 9	Regresi Persamaan Deteksi Ilusi Fiskal	158
Lampiran 10	Regresi Parsial I	159
Lampiran 11	Regresi Parsial II	160
Lampiran 12	Regresi Parsial III	161
Lampiran 13	Regresi Parsial IV	162
Lampiran 14	Regresi Parsial V	163

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu telah merambah ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud adalah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Isu yang paling mencuat dalam aspek ini adalah otonomi yang lebih luas dan nyata kepada daerah. Sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bastian (2001) menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah (dalam Dwirandra, 2006).

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan tuntutan daerah yang sudah lama digemakan sekaligus sebagai langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Priyo, 2006). Desentralisasi dimaknai dalam tiga aspek. Pertama sebagai pelepasan tanggung jawab pusat kepada daerah, secara langsung dimaknai sebagai pelepasan daerah sebagai pelaksana dan pengambil keputusan administrasi dengan bimbingan teknis oleh pusat. Kedua sebagai delegasi yang berkaitan dengan situasi dimana daerah bertindak atas nama pemerintah pusat. Ketiga sebagai devolusi dimana pelimpahan kewenangan untuk memutuskan sesuatu di daerah.

Menilik pada konteks desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, konsekuensinya adalah adanya alokasi penyediaan barang publik pada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Selain itu, juga akan mempengaruhi tanggung jawab dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations*). Hubungan keuangan antar pemerintah merujuk pada hubungan keuangan antara berbagai tingkatan pemerintah dalam suatu negara dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan negara

dan pola pengeluarannya termasuk kekuasaan. Mulai dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi terhadap tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Handayani, 2009).

Implikasi langsungnya adalah meningkatnya pendanaan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Sebelum era otonomi dan desentralisasi, pendanaan utama pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat dan PAD dengan pajak dan retribusi sebagai instrumen utama penerimaan daerah. Situasi ini menjadi semakin kompleks mengingat kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan berbagai keanekaragamannya, sehingga potensi kesenjangan keuangan antar daerah (horizontal) semakin besar. Potensi daerah baik berupa sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) tidak tersebar secara merata pada tiap-tiap daerah otonom. Permasalahan horizontal (antar pemerintah daerah) kemudian muncul dalam hal upaya mengumpulkan sumber pendanaan untuk biaya pembangunan. Pemerintah pusat berupaya untuk mengurangi kesejangan ini dengan mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian dana perimbangan ini ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan horizontal (antar pemerintah daerah), sekaligus untuk membantu daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Artinya daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan belanja daerahnya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (dalam Dwirandra, 2006). Jadi, PAD harus menjadi basis utama penerimaan daerah dibandingkan dengan DAU agar daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi seutuhnya.

Kinerja dan kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2001). Struktur keuangan daerah tercermin dalam 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan adalah PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah sedangkan sisi pengeluaran adalah belanja daerah.

Dana perimbangan dan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi besar kepada anggaran penerimaan. Berikut ini akan disajikan mengenai perbandingan antara PAD dengan dana perimbangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tahun 2005 sampai dengan 2008.

Tabel 1.1
Dana Perimbangan dan PAD Provinsi Tahun 2005-2008
(dalam Juta Rupiah)

TAHUN	DANA PERIMBANGAN				PAD
	DAU	DBH	DAK	TOTAL	
2005	9.223.416	15.391.639	3.994.000	28.609.055	27.885.741
2006	14.682.400	13.973.765	11.559.800	40.215.965	29.204.017
2007	16.578.797	18.329.266	17.094.100	52.002.163	35.177.065
2008	17.951.410	27.566.463	20.439.635	65.957.508	44.515.454

Sumber: BPS Jateng, 2010, diolah

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selama periode 2005 hingga 2008 terjadi peningkatan dana perimbangan ke provinsi yang cukup besar nominal penganggarannya. Pada tahun 2005, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan sebesar 28,61 trilyun rupiah. Sampai pada tahun 2008, terlihat bahwa dana perimbangan yang diterima provinsi membengkak hingga mencapai 65,96 trilyun rupiah. Bila dibandingkan dengan PAD yang walaupun mengalami peningkatan, sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan pada dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada provinsi sebagai dana bantuan (*grant*).

Tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana perimbangan, menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Menurut Fischer (1996) *intergovernmental transfer* yang disebut juga sebagai dana transfer pemerintah pusat ke daerah ini juga merupakan sumber penerimaan yang dominan bagi pemerintah daerah di banyak negara, seperti Amerika Serikat, negara-negara Afrika, Nigeria, dan Meksiko. Amerika sebagai negara maju memiliki persentase dana transfer mencapai 50 persen dari total pendapatan negara federalnya dan 60 persen pada pemerintah daerah

(dalam Handayani, 2009). Sementara di negara-negara lain, persentase dana transfer atas pengeluaran pemerintah daerah adalah 85 persen di Afrika Selatan, 67-95 persen di Nigeria, dan 70-90 persen di Meksiko. Indonesia sendiri memiliki proporsi dana transfer sekitar 80 persen dari total pengeluaran (Simanjuntak dalam Handayani, 2009).

Tabel 1.2
Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Provinsi
Tahun 2005-2008 (dalam persen)

TAHUN	Dana Perimbangan	BELANJA	
2005	28.609.055	56.769.806	50,39
2006	40.215.965	67.098.160	59,94
2007	52.002.163	71.772.659	72,45
2008	65.957.508	80.763.559	81,67

Sumber: BPS Jateng, 2010, diolah

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi ratio dana perimbangan terhadap belanja daerah provinsi dengan kecenderungan pada tren yang meningkat. Melihat data bahwa sebagian besar daerah memiliki rasio antara 50-81 persen terhadap belanja daerahnya, hal ini berarti belanja daerah provinsi dibiayai oleh 50-81 persen dari dana dana perimbangan. Berdasarkan pada hal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa daerah masih mengalami ketergantungan secara keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat.

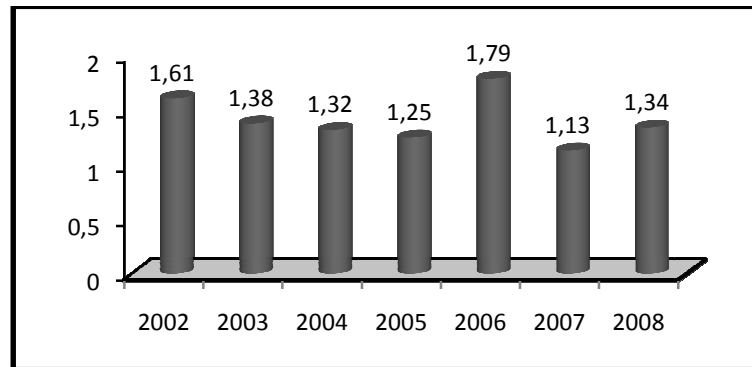
Nagathan dan Sivagnanam (1999), menjelaskan bahwa alokasi dana transfer di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia pada umumnya lebih didasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah, dan kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan potensi keuangan lokal (dalam Handayani, 2009).

Akibatnya dari tahun ke tahun pemerintah daerah akan selalu menuntut dana transfer yang lebih besar lagi dari pusat dan menyampingkan usaha eksplorasi basis keuangan lokal sebagai sumber pendapatan.

Tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat, sekaligus menjadi tekanan dalam pengumpulan PAD di provinsi. Optimalnya, dana perimbangan yang diperoleh daerah dialokasikan untuk belanja daerah yang kemudian akan meningkatkan PAD. Realitas menunjukkan hal yang sebaliknya, daerah cenderung mengabaikan penggalan PAD sebagai basis utama penerimaan daerah dengan menjadikan dana perimbangan sebagai substitusinya.

Eksplorasi penerimaan daerah untuk PAD salah satunya dapat dilihat dari kondisi daya pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh karena pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang terbesar dalam rangka pengumpulan PAD. Daya pajak daerah merupakan aspek relevan bila dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kemandirian daerah. Logikanya, semakin tinggi daya pajak suatu daerah maka pendapatan daerah tersebut akan semakin tinggi pula. Melalui peningkatan pendapatan daerah, maka secara bertahap tingkat kemandirian daerah akan semakin tinggi. Berikut disajikan mengenai perkembangan daya pajak daerah provinsi di Indonesia.

Gambar 1.1
Perkembangan Daya Pajak Total Provinsi di Indonesia
Tahun 2002-2008



Sumber: www.djpk.depkeu.go.id, 2010, diolah

Data pada Gambar 1.1, menunjukkan terjadi fluktuasi upaya daerah dalam peningkatan sumber penerimaan daerah ini. Hal menarik pada Gambar 1.1 adalah dalam tahun 2006 daya pajak pemerintah daerah menunjukkan angka tertinggi dibanding tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Fakta empirik ini memberikan indikasi agresivitas pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Sisi pengeluaran dalam struktur keuangan daerah terdiri atas belanja daerah. Berikut ini disajikan perkembangan belanja daerah provinsi dari tahun 2005 sampai dengan 2008.

Tabel 1.3
Belanja Daerah Provinsi Tahun 2005-2008
(dalam Juta Rupiah)

TAHUN	BELANJA DAERAH	PERSENTASE
2005	56.769.806	-
2006	67.098.160	18,19
2007	71.772.659	6,97
2008	80.763.559	12,53

Sumber: BPS Jateng, 2010, diolah

Perkembangan belanja daerah provinsi dari tahun ke tahun mengalami perkembangan secara nominal, tetapi dengan persentase yang menurun. Tahun 2005 belanja daerah adalah 56,77 trilyun rupiah kemudian menjadi 67,09 trilyun pada tahun 2006, meningkat sebesar 18,19 persen. Sayangnya pada tahun-tahun berikutnya pengeluaran mengalami trend yang fluktuatif walaupun jumlah nominalnya meningkat.

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kemandirian daerah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti bahkan cenderung menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Adi (2007) serta Setiaji dan Adi (2007) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada DAU daripada mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Adi (2007), memperlihatkan indikasi kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis, upaya ini lebih dipilih daripada meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga sebagai konsekuensinya PAD yang diterima menjadi lebih kecil. Kondisi ini sejalan dengan pandangan para pakar ekonomi. Dominannya peran dana transfer terhadap pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah pada dasarnya tidak efektif dalam memberikan bantuan bagi pemerintah daerah terhadap aliran transfer itu sendiri (Kuncoro, 2006).

Alderete (dalam Priyo, 2006) menegaskan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer (dalam bentuk dana perimbangan) kepada daerah untuk meningkatkan belanja daerah, muncul spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris. Perilaku asimetris ini dapat dilihat dengan adanya pengeluaran yang berasal dari bantuan (*grants*) yang memberikan keuntungan pada pemerintah daerah, sedangkan di lain pihak anggaran juga berkurang. Maimunah (2006) membuktikan adanya perilaku asimetris yang ditunjukkan oleh pengaruh DAU terhadap belanja daerah dan PAD (dalam Priyo, 2006). Besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, tetapi besarnya proporsi PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah khususnya DAU begitu dominan dalam membiayai belanja daerah.

Fenomena semacam ini oleh Dollery dan Worthington (1999) dan Priyo (2009) diindikasikan sebagai ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Logikanya, setiap penerimaan pemerintah harus berdampak terhadap besaran pengeluaran dan pada gilirannya semakin besar pengeluaran pemerintah maka pemerintah seharusnya mendapat manfaat dengan meningkatnya penerimaan pemerintah di masa mendatang, misal meningkatnya kontribusi pajak masyarakat. Artinya terdapat hubungan yang simetris antara sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila kenyataan yang terjadi sebaliknya (terjadi hubungan yang asimetris) maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal, dikarenakan pemerintah pusat ataupun masyarakat 'tidak menyadari' bahwa mereka memberikan kontribusi (baik dana transfer maupun pajak/retribusi

daerah) yang lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Kecenderungan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hibah pemerintah pusat secara asimetris, memberikan dampak negatif terhadap upaya peningkatan potensi daerah. Salah satu indikatornya adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Indikasi adanya perilaku menyimpang pemerintah daerah terhadap transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diperkirakan mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui belanja merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian empiris. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dalam rangka penyusunan skripsi ini dipilih judul **Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008)**.

1.2 Rumusan Masalah

Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah dengan daerah. Perimbangan keuangan merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan. Komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam konsep desentralisasi fiskal. Dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal (Handayani, 2009).

Pemberian dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki dua implikasi penting. Pertama, dana transfer tersebut merupakan penerimaan bagi daerah. Makin tinggi jumlah dana transfer yang diberikan pemerintah pusat, maka semakin besar pula jumlah penerimaan daerah. Kedua, dana transfer tersebut merupakan insentif bagi daerah untuk membiayai belanja daerahnya. Makin besar jumlah belanja daerah, maka kecenderungan alokasi dana transfer yang diberikan akan semakin besar.

Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan, seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan fungsinya, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi. Kenyataan yang terjadi adalah dana transfer justru dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah dibandingkan dengan PAD. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah yang tidak sebanding dengan nilai pendapatan asli daerah (PAD) yang mampu dikumpulkan oleh daerah. Fenomena semacam ini oleh Dollery dan Worthington (1999) diindikasikan sebagai ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Ilusi fiskal secara sederhana diidentifikasi dari peningkatan PAD yang tidak seimbang dengan peningkatan dana perimbangan terhadap belanja daerah, sehingga belanja daerah didominasi oleh dana perimbangan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah diduga terjadi perilaku asimetris pemerintah daerah dalam merespon dana perimbangan pemerintah pusat. Perilaku asimetris pemerintah daerah

dapat mempengaruhi pola belanja daerah dan pengumpulan pendapatan daerah dalam kinerja keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan penelitian dibagi menjadi menjadi 2 bagian, yaitu penelitian untuk analisis kinerja keuangan daerah dan deteksi ilusi fiskal sebagai indikator perilaku asimetris pemerintah daerah dalam merespon dana perimbangan.

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan untuk penelitian analisis kinerja keuangan daerah adalah:

1. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah?
2. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah?
3. Bagaimana pengaruh PAD terhadap belanja daerah?
4. Bagaimana pengaruh daya pajak terhadap PAD?
5. Bagaimana pengaruh DAU terhadap PAD?
6. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap PAD?

Sedangkan untuk penelitian dalam mendeteksi fenomena ilusi fiskal pertanyaan penelitiannya adalah:

7. Apakah fenomena ilusi fiskal muncul dalam kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah.
2. Menganalisis pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah.

3. Menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja daerah.
4. Menganalisis pengaruh daya pajak terhadap PAD.
5. Menganalisis pengaruh DAU terhadap PAD.
6. Menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap PAD.
7. Menganalisis dan mengidentifikasi fenomena ilusi fiskal yang muncul dalam kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau dinas-dinas yang terkait untuk lebih menyikapi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terutama dari aspek pemberian dana transfer dan kemandirian daerah.
2. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana perilaku pemerintah daerah terhadap kebijakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di tingkat Provinsi se-Indonesia sehingga dapat dijadikan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Menjadi dasar dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan urutan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan

kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian akhir bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel dan definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas dua bagian; pertama merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, dan kedua adalah saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Produksi

Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input, sedangkan jumlah produksi selalu disebut sebagai output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu

$$Q = f(K, L)$$

Dimana, Q adalah output, K adalah kapital (modal), dan L adalah tenaga kerja (labor). Persamaan tersebut merupakan gambaran sederhana dan bersifat umum mengenai keterkaitan antar faktor-faktor produksi dan jumlah produksi.

Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal dan jumlah tenaga kerja.

Pemerintah dalam rangka penyediaan barang publik kepada masyarakat, bertindak mengikuti fungsi produksi tersebut di atas. Hal ini disebabkan karena pemerintah melakukan apa yang disebut dengan belanja daerah autonom (*autonomous government expenditure*). Belanja daerah yang autonom, merupakan belanja daerah yang harus dilakukan walaupun daerah tidak memiliki pendapatan.

Asumsikan bahwa belanja daerah adalah fungsi dari output, dimana output dalam konteks ini adalah PDRB. Secara matematis dituliskan:

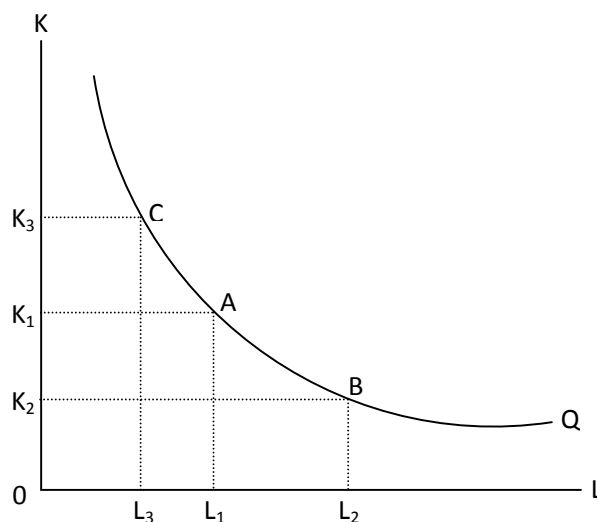
$$G = f(PDRB)$$

Selanjutnya untuk menghasilkan PDRB, pemerintah akan membutuhkan input. Sehingga pemerintah melakukan belanja daerah, asumsikan belanja daerah terdiri atas 2, yaitu belanja modal dan belanja pegawai, sehingga fungsinya akan menjadi:

$$\text{PDRB} = f(K, L)$$

Berdasarkan pada fungsi di atas, dapat dilihat bahwa untuk menghasilkan PDRB dalam jumlah tertentu diperlukan kombinasi input-input dalam jumlah yang tertentu pula. Kombinasi input-input dalam suatu proses produksi dapat digambarkan dalam sebuah kurva isokuan.

Gambar 2.1
Kurva Isokuan



Kurva isokuan memperlihatkan kombinasi input-input yang digunakan untuk memproduksi sejumlah output. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pemerintah akan menentukan kombinasi input-input tersebut dengan menyesuaikan pada anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan.

Belanja daerah berupa penggunaan input modal maupun tenaga kerja dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi. Pajak dan retribusi daerah yang digunakan merupakan akumulasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Belanja daerah tahun t dibiayai oleh pajak dan retribusi tahun $t-1$, sehingga terdapat *lag* waktu didalam sistem hubungannya. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$BD_t = f(\text{Pajak}_{t-1}, \text{Retribusi}_{t-1})$$

Oleh karena pajak dan retribusi merupakan sumber penerimaan utama daerah yang paling besar, maka fungsi belanja daerah menjadi:

$$BD_t = f(\text{PAD}_{t-1})$$

Diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berdampak pada adanya dana transfer yang diperoleh daerah sebagai sumber penerimaan. Dimana, dana transfer yang diterima pada tahun t dibelanjakan untuk belanja daerah pada tahun $t+1$. Sehingga fungsi belanja daerah menjadi:

$$BD_t = f(\text{PAD}_{t-1}, \text{Dana Transfer}_{t-1})$$

2.1.2 Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

2.1.2.1 Teori Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti sendiri dan kata kedua berarti pemerintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri, dalam wacana administrasi publik daerah sering disebut sebagai *local self government*. Menurut Khusaini (2006) daerah otonom praktis berbeda dengan daerah

saja yang merupakan penerapan dari kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local state government* yang berarti pemerintah di daerah merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat (dalam Handayani, 2009).

Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004, diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Handayani, 2009). Sebagai upaya untuk mencapai tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Menurut Tim Fisipol Universitas Gadjah Mada (Handayani, 2009), terdapat 4 (empat) unsur otonomi daerah, yaitu :

1. Memiliki perangkat pemerintah sendiri yang ditandai dengan adanya Kepala Daerah, DPRD, dan Pegawai Daerah;
2. Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya dinas-dinas daerah;

3. Memiliki sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinas-dinas daerah;
4. Memiliki wewenang untuk melaksanakan inisiatif sendiri (diluar dari instruksi dari pemerintahan pusat atau atasan) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu pertama adalah semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high cost economy*) dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu daesentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah (Emelia, dalam Handayani 2009).

Apabila suatu daerah tidak memiliki sumber-sumber pembiayaan yang memadai maka dari hal ini akan mengakibatkan daerah bergantung terus terhadap pembiayaan pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah pusat merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan asas otonomi daerah. Oleh karena itu perlu suatu upaya oleh pemerintah daerah dalam memutus ketergantungan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah.

Menurut Ibnu Syamsi (dalam Emelia, 2006) terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran agar suatu daerah dikatakan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri:

1. Kemampuan struktur organisasinya

Struktur organisasi pemerintah daerah yang mampu menampung seluruh aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

2. Kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan yang diinginkan daerah dibutuhkan keahlian, moral, disiplin dan kejujuran dari aparaturnya daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar bersedia terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional. Karena peran serta masyarakat sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan daerah.

4. Kemampuan keuangan daerah

Suatu daerah dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri apabila pemerintah daerah tersebut mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sesuai dengan urgensi penelitian ini, maka suatu daerah dituntut kemampuannya dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat.

2.1.2.2 Desentralisasi Fiskal

Menurut Khusaini (2006), desentralisasi fiskal merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, personil, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah (dalam Handayani, 2009).

Desentralisasi fiskal adalah implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah yaitu menyangkut kebutuhan dana yang cukup besar, sehingga perlu diatur dan diupayakan perimbangan keuangan secara vertikal antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Desentralisasi dapat pula diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal memerlukan adanya pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Handayani 2009). Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi wewenang (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).

Salah satu komponen utama desentralisasi adalah desentralisasi fiskal (Handayani, 2009). Artinya adalah memaknai desentralisasi tidak dapat dipisahkan dari isu kapasitas keuangan daerah, dimana kemandirian daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahan diukur dari kemampuan menggali dan mengelola keuangannya.

Menurut Usui dan Alisjahbana (dalam Handayani, 2009), kunci utama dari desentralisasi fiskal adalah pembuatan menjadi lebih dekat dengan masyarakat sehingga distribusi pelayanan publik menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Selanjutnya oleh disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, harus terdapat 2 (dua) prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Fungsi mengikuti kapasitas (*function should follow capacities*)

Hal ini berarti pemerintah lokal harus mempunyai kapasitas sumber daya manusia yang cukup untuk memenuhi fungsi pemerintahan yang telah didelegasikan kepadanya.

- b. Pendapatan mengikuti fungsi (*revenues should follow function*)

Hal ini berarti bahwa di dalam pemerintahan lokal harus tersedia keseimbangan antara tanggung jawab pengeluaran dan instrumen pendapatan.

2.1.3 Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang

keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti bahwa seiring dengan berjalannya otonomi, dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai berkurang dan yang menjadi sumber utama pembiayaan daerah adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas (1) dana bagi hasil, (2) dana alokasi umum (DAU), (3) dana alokasi khusus (DAK). Ketiga macam dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan saling mengisi dan melengkapi (Aswarodi, 2000). Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (PP No.55 Tahun 2005).

Pada umumnya pemerintah pusat memberikan transfer dana dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang

dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Berdasarkan PP No.55 Tahun 2005, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).

2.1.4 Sistem Hubungan Keuangan dan Pendekatan Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, atau dalam arti yang lebih sempit sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Yani, 2002).

Menurut Manan (1994), untuk mengetahui hubungan antara Pusat dan Daerah, maka salah satu dimensi yang menjadi pokok pembicaraan adalah hubungan keuangan. Istilah formal mengenai keuangan negara dijumpai dalam naskah asli UUD 1945 (sebelum perubahan). Pasal 23 ayat 4 UUD 1945 ditentukan bahwa, *hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang*. Sementara itu,

ketentuan Pasal 23 ayat 25 menyebutkan bahwa *untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat*. Setelah perubahan UUD 1945, istilah “hubungan keuangan” dijumpai dalam Pasal 18A ayat 2 yang menegaskan bahwa *hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*.

Lebih lanjut Manan (1994) menegaskan bahwa esensi dari perimbangan keuangan tersebut adalah upaya memperbesar pendapatan asli daerah sehingga lumbung keuangan daerah dapat terisi lebih banyak. Tetapi menurut Dempsey, inti dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah pengaturan masalah distribusi, yaitu konsekuensi dari distribusi kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menimplementasikan wewenang yang telah didesentralisasikan.

2.1.5 Perilaku Pemerintah Daerah Atas Transfer Pemerintah Pusat

Respon tiap-tiap pemerintah daerah terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat berbeda-beda. Tidak semua daerah memiliki kesiapan dalam menerima dana transfer tersebut. Dampaknya adalah terjadi perilaku yang tidak simetris sebagai respon terhadap dana transfer yang diberikan.

Alderete (2001) dalam Wulan (2008), menguraikan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan bantuan transfer kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan belanja daerah, terdapat indikasi respon yang asimetris terhadap

bantuan tersebut. Wulan dan Priyo (2008) menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada saat pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat dana itu digunakan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan PAD tiap-tiap daerah.

Kuncoro (2007) dalam Priyo (2008), menyebutkan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan adanya indikasi bahwa peningkatan belanja yang tinggi tersebut dikarenakan inefisiensi belanja pemerintah, terutama belanja operasional. Selain itu pada saat transfer dana dari pemerintah pusat menurun maka juga diikuti oleh penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan PAD. Kecenderungan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi, sehingga dalam jangka panjang ketergantungan ini seharusnya dikurangi, karena akan berdampak negatif pada kemandirian daerah. Lebih lanjut Kuncoro (2007) dalam Priyo (2008) menjelaskan bahwa saat masyarakat (pemerintah daerah) menerima transfer maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah dan peningkatan konsumsi barang publik. Hal ini menunjukkan bahwa transfer meningkatkan konsumsi akan barang publik namun tidak menjadi substitut pajak daerah. Kondisi inilah yang dalam berbagai literatur disebut dengan *flypaper effect*. Dougan dan Kenyon (1988) dalam Dewi (2006) menyebutkan *flypaper effect* merupakan suatu keganjilan dimana kecenderungan dari dana bantuan (transfer) akan meningkatkan belanja publik yang lebih besar dibandingkan dengan pertambahan

pendapatan yang diperoleh dari masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa *flypaper effect* muncul saat transfer pemerintah pusat digunakan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan belanja pemerintah daerah tanpa diimbangi dengan peningkatan PAD.

2.1.6 Fenomena Ilusi Fiskal

Menurut khasanah ekonomi, telaah mengenai *flypaper effect* dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran, yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokratik menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang dari birokrat, sedangkan model *ilusi fiskal* mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya (Kuncoro, 2007).

Oates (dalam Kuncoro, 2007) menyatakan fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah.

Lebih jauh, ilusi fiskal diartikan sebagai kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai pembiayaan maupun alokasi anggaran dan keputusan mengenai kedua hal tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini (Schawallie, 1989).

Logan (1986) berpendapat kesalahan persepsi tersebut dapat berlanjut dalam bahkan jangka panjang. Turnbull (1992) menawarkan penjelasan lain mengenai keberlanjutan kesalahan persepsi tersebut. Menurut Turnbull, ketidakpastian tingkat harga barang publik akan menciptakan risiko. Risiko ini dalam jangka panjang akan memicu pengeluaran yang berlebih (dalam Priyo, 2009)

Fillimon, Romer, dan Rosenthal (1982) mengembangkan hipotesis ilusi fiskal dalam konteks ketidaktahuan masyarakat akan jumlah transfer yang diterima. Dalam kasus ini, pemerintah daerah menyembunyikan jumlah transfer yang diterima dari pusat dan kemudian membelanjakannya pada level puncak. Akibatnya, masyarakat memandang telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah daerah dengan kenaikan yang lebih tinggi daripada kenaikan kuantitas yang diminta sebagai cerminan dari kenaikan pendapatannya (dalam Priyo, 2009).

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri.

Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 tahun 2004 pendapatan asli daerah berasal dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan pada Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan :

1. Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator) (Miyasto, 2009).

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari batasan atau definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:

1. Iuran masyarakat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa balas jasa secara langsung
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan paksa yang dilakukan pemerintah daerah terhadap wajib retribusi dengan kontra prestasi langsung yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib retribusi (Miyasto, 2009). Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2002 tentang retribusi daerah pasal satu menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari definisi di atas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk

- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah

3. Bagian Laba Perusahaan Daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang ketiga yaitu adalah laba dari perusahaan daerah. Karena berbentuk perusahaan maka prinsip pengelolaannya berdasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan. Dengan demikian perusahaan harus mencari keuntungan dan selanjutnya sebagian dari keuntungan tersebut diserahkan ke kas daerah. Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dalam memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, atau dengan perkataan lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangannya yaitu fungsi ekonomi. Fungsi pokok dari perusahaan daerah adalah:

1. Sebagai dinamisator perekonomian daerah, yang berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah.
 2. Sebagai penghasil pendapatan daerah yang berarti harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat diserahkan ke kas daerah.
- ### 4. Pendapatan Lain-lain yang disahkan

Penerimaan lain-lain, di lain pihak adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan

daerah. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah. Fungsi utama dari dinas-dinas daerah adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung dan ruginya, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan untuk bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan dengan imbalan jasa.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik yang berupa materi dalam hal kegiatan bersifat bisnis, maupun non materi dalam hal kegiatan tersebut untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

2.1.7 Belanja Daerah

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja aparatur daerah

Bagian belanja yang berupa : Belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak se cara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

2. Belanja pelayanan publik

Bagian belanja yang berupa : Belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Pengeluaran uang dengan kriteria :

- a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
- b. Tidak mengharap dibayar kembali pada masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layak yang diharapkan pada kegiatan investasi.

4. Belanja tidak tersangka.

Pengeluaran yang disediakan untuk :

- a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.

- b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
- c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kelompok belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2.1.8 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2005, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Dana perimbangan meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya.

2.1.9 Kinerja Keuangan Daerah

John Witmore dalam *Coaching for Performance* (1997) menyatakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja lembaga.

Kinerja dan kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004). Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terikat satu sama lain. Ketiga aspek tersebut meliputi (Simanjuntak dalam Halim, 2001):

1. Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya tersebut meningkat.
3. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Hasil analisis pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dalam menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, akan terjadi surplus anggaran dan jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada tahun sekarang dan kecenderungannya pada tahun-tahun mendatang, sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat diprediksikan.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Dilihat dari sisi pengeluaran, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu membelanjakan pendapatan yang diterima untuk selanjutnya memberikan timbal balik atas pengeluaran tersebut. Timbal balik dalam hal ini seperti pendapatan pajak dan retribusi. Analisis sisi

pendapatan menggunakan pendapatan asli daerah sebagai titik sentral analisisnya, sedangkan analisis sisi pengeluaran menekankan pada belanja daerah sebagai titik setral analisisnya.

2.1.10 Dana Alokasi Umum

Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-daerah.

Namun di sisi lain, konsekuensi dari diterapkannya Otonomi Daerah adalah perubahan sistem administratif yang berlaku. Daerah dituntut lebih otonom baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun mendanai keuangan daerahnya. Sedangkan kemampuan tiap daerah tidaklah sama. Untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, maka pemerintah pusat memberikan kebijakan transfer kepada daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum ini memiliki ciri berupa dana blok (*block grant*) dan dialokasikan ke daerah dengan tujuan agar masyarakat di seluruh Indonesia memiliki kualitas atas pelayanan jasa dan fasilitas publik yang sama (*Equalization Principle*).

Kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap* yang memperhitungkan antara kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan kata lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan yang ada.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah serta jaminan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. DAU terdiri atas:

- DAU untuk daerah Provinsi. DAU Provinsi dan kabupaten ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya. Jumlah DAU untuk Provinsi sebesar 10% dari seluruh DAU yang diserahkan ke daerah-daerah.
- DAU untuk Kabupaten/kota. Besarnya DAU untuk Kabupaten/kota ini sebesar 90% dari total DAU yang diserahkan ke daerah-daerah.

Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004, DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Atau dengan kata lain:

$$DAU = CF + AD$$

Dimana:

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi dasar

$$CF = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Untuk perhitungan kapasitas fiskal suatu daerah, digunakan formula:

$$KF = PAD + DBH$$

Mulai tahun anggaran 2008, prinsip *hold harmless* tidak lagi diberlakukan. Oleh karena itu daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang kuat akan menerima DAU yang lebih sedikit. Bahkan mungkin ada daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU, karena kapasitas fiskalnya yang tinggi. Penerapan alokasi DAU tanpa prinsip *hold harmless* diharapkan akan dapat mewujudkan DAU yang benar-benar berfungsi sebagai alat pemerataan.

2.1.11 Daya Pajak

Daya pajak (*tax effort*) daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD yang saat ini masih di dominasi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yang kemudian digunakan juga untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk mengetahui kinerja (*performance*) PAD, terutama yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat menggambarkan rasio antara PAD dengan pendapatan masyarakat dalam periode yang sama.

Daya pajak (*tax effort*) dapat juga digunakan untuk menganalisis posisi fiskal suatu daerah yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap kapasitas (kemampuan) pajaknya. Suparmoko (dalam Handayani, 2009) mengemukakan bahwa daya pajak adalah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dibandingkan dengan potensi pajaknya (*tax potential*) yaitu sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari pajak (*tax base*) dikalikan tarifnya.

Membandingkan rasio antara pajak dan potensi antar daerah disebut sebagai prestasi pajak (*tax performance*).

Menurut Susanti (dalam Handayani, 2009) menyebutkan bahwa daya pajak sebagai kemampuan pemerintah mengumpulkan dananya melalui pajak. Dimana daya pajak merupakan rasio pajak terhadap basis pajak. Sebagai proksi oleh basis pajak, digunakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin besar nilai daya pajak (*tax effort*) maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menjaring dananya melalui pajak.

Devas (dalam Handayani, 2009) menyatakan bahwa upaya pengumpulan pajak adalah perbandingan penerimaan pajak dibagi dengan kemampuan bayar pajak. Kemampuan bayar pajak secara keseluruhan dapat berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dana transfer pemerintah pusat dapat mempengaruhi daya pajak daerah melalui efek substitusi dan efek stimulasi. Efek substitusi ditemukan jika dana transfer pemerintah pusat mengurangi daya pajak daerah, dengan kata lain terjadi penurunan dalam pengumpulan pajak. Daerah menjadi malas menggali potensi daerah melalui pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh karena daerah mengandalkan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga dana transfer dijadikan substitusi pajak daerah. Sedangkan efek stimulasi terjadi jika dana transfer pemerintah pusat mampu meningkatkan daya pajak daerah. Dana transfer ini dapat merangsang peningkatan pajak daerah (Sagbas dan Saruc, dalam Handayani, 2009).

2.1.12 Deteksi Ilusi Fiskal

Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, dua diantaranya adalah melalui pengukuran pendapatan (*revenue enhancement*) (Bergstrom dan Goodman, 1973; Dollery dan Worthington, 1999) dan melalui manipulasi belanja (*expenditure manipulation*).

Pengukuran dengan pengukuran pendapatan mengasumsikan bahwa komponen penerimaan mempunyai hubungan positif dengan belanja. Menurut Priyo (2009), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal.

Sedangkan pengukuran dengan manipulasi belanja, deteksi terjadinya ilusi fiskal dilakukan dengan melihat peran/kontribusi masing-masing komponen penerimaan terhadap peningkatan anggaran. Komponen belanja dimanipulasi (dihilangkan), sehingga diasumsikan sama (*ceteris paribus*) dengan besarnya penerimaan daerah itu sendiri. Semakin besar penerimaan daerah maka besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya juga menjadi semakin besar.

2.1.13 Hubungan PDRB dengan Belanja Daerah

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Handayani, 2009). Nilai bersih tersebut sebenarnya merupakan balas jasa dari faktor yang ikut serta dalam proses produksi yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta di tambah dengan penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Balas jasa faktor produksi, penyusutan dan jasa tidak langsung tadi dalam pergerakan sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto sehingga PDRB atas harga pasar tersebut juga merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi.

PDRB dan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD (Purbayu, 2005). Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2001). Selanjutnya dengan peningkatan penerimaan daerah, akan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Karena peningkatan dari penerimaan daerah akan meningkatkan PDRB. Jadi, PDRB dan belanja daerah memiliki hubungan yang positif. Bila PDRB mengalami peningkatan maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan.

2.1.14 Hubungan Pajak Daerah dengan Belanja Daerah

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan memperbesar penerimaan dari pajak (Mangkoesoebroto, 1994).

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator) (Miyasto, 2009). Berdasarkan pada komponen pembentuk PAD, pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar dibandingkan dengan komponen lainnya. Selain itu pajak juga cenderung lebih mudah diintervensi oleh pemerintah. Sehingga, sangat wajar bila pemerintah sangat menggantungkan penerimaan dari sektor pajak.

Berdasarkan pada teori Peacock dan Wiseman, maka dapat dilihat hubungan antara jumlah pajak daerah dengan pengeluaran. Pajak daerah dan belanja daerah memiliki hubungan positif. Jika pajak naik, maka belanja daerah juga akan naik, sebaliknya jika pajak turun maka belanja daerah akan menurun.

2.1.13 Hubungan Retribusi Daerah dengan Belanja Daerah

Karakteristik retribusi daerah dan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah hampir sama. Metode penetapan retribusi daerah pun memiliki kesamaan dengan pajak daerah. Sehingga untuk melihat hubungan antara retribusi daerah dengan belanja daerah dapat digunakan teori yang sama, yaitu teori Peacock dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 1994).

Berdasarkan pada Undang-undang No. 34 tahun 2000 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dimana komponen dalam PAD antara lain adalah (BPS,2003): pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang disahkan.

Penerimaan daerah digunakan untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana fisik serta pembiayaan rutin lainnya. Peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan pajak maupun retribusi daerah. Hal ini disebabkan karena pajak dan retribusi daerah merupakan komponen pembentuk PAD, dimana PAD merupakan sumber penerimaan daerah. Meningkatnya penerimaan daerah akan meningkatkan belanja daerah (Priyo, 2006). Belanja daerah diperlukan untuk melaksanakan tugas pemerintah sebagai penyedia sarana publik bagi masyarakat.

Berdasarkan pada teori Peacock dan Wiseman dan hubungan antar komponen pembentuk penerimaan daerah maka dapat dikatakan bahwa jika retribusi daerah naik, maka belanja daerah juga akan naik, sebaliknya jika retribusi daerah mengalami penurunan maka belanja daerah juga akan menurun.

2.1.14 Hubungan DAU dengan Belanja Daerah

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAU) merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar.

Bagir Manan (2001) menegaskan bahwa esensi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah upaya memperbesar pendapatan asli daerah sehingga lumbung keuangan daerah dapat terisi lebih banyak. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat (DAU) kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Adanya peningkatan belanja daerah (seperti pembangunan infrastruktur publik) akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hubungan antara pendapatan daerah dan penerimaan daerah merupakan hubungan fungsional karena DAU merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Maimunah (2005) membuktikan pengaruh DAU terhadap belanja daerah dimana besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Legrensi dan

Milas (2001) dalam Maimunah (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel *municipalities* di Italia dan memperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah.

2.1.15 Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya.

Pola hubungan antara DBH terhadap belanja daerah secara fungsional sam dengan hubungan antara DAU dengan belanja daerah. Hal ini disebabkan karena DBH dan DAU, keduanya merupakan dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dimana dengan adanya dana perimbangan ini, maka ketersediaan dana untuk biaya daerah semakin besar. Sehingga dengan semakin besarnya dana bagi hasil maka pengeluaran juga akan meningkat.

2.1.16 Hubungan Belanja Daerah Dengan PAD

Hubungan belanja daerah dengan PAD merupakan hubungan tidak langsung yang membutuhkan *lag* waktu dalam sistem hubungannya. Daerah melakukan belanja

untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembangunan tersebut menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dalam bentuk pajak dan retribusi. Jadi, belanja daerah pada tahun berjalan akan memberikan dampak bagi PAD pada tahun anggaran berikutnya.

Studi tentang pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan daerah (*local own resources revenue*) sudah banyak dilakukan (Syukriy Abdullah & Abdul Halim, 2003). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis* (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Von Furnsternberg et al, 1986 dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim, 2003). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran (Kesit Bambang Prakosa, 2004).

Di dalam konteks internasional beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan daerah misalnya adalah penelitian dari Kesit Bambang Prakosa (2004). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus pemerintah daerah di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolumbia, Republik Dominika, Honduras dan Paraguay. Friedman (2004) menyatakan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan kenaikan pengeluaran, melalui kenaikan pengeluaran tersebut selanjutnya akan meningkatkan pendapatan pajak pada periode berikutnya dan pendapatan daerah.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat ditarik suatu hubungan antara belanja daerah dengan PAD. Hubungan antara belanja daerah

dengan PAD adalah berhubungan positif, dengan asumsi dibutuhkan *lag* waktu. Jika belanja daerah pada tahun berjalan meningkat maka pendapatan daerah pada tahun berikutnya akan meningkat, demikian pula jika belanja daerah pada tahun berjalan menurun maka pendapatan daerah tahun berikutnya akan menurun.

2.1.17 Hubungan Daya Pajak Dengan PAD

Daya pajak adalah kemampuan daerah untuk menarik dan mengumpulkan pajak sebagai sumber penerimaan daerah (Syahputra, 2006). Meningkatnya daya pajak di suatu daerah berarti terjadi peningkatan pendapatan asli daerah. Karena pajak dan PAD memiliki hubungan fungsional yang positif. Adanya peningkatan PAD berarti juga terdapat tambahan dana untuk melaksanakan pembangunan sarana publik yang dicantumkan dalam APBD daerah. Berdasarkan pada hal, maka jika daya pajak meningkat berarti pajak daerah akan bertambah dan selanjutnya akan menaikkan PAD secara relatif.

Berdasarkan pada analogi tersebut dapat dilihat hubungan antara daya pajak dengan PAD. Jika daya pajak meningkat, maka PAD meningkat karena penerimaan pajak meningkat. Sebaliknya jika daya pajak menurun, berarti penerimaan pajak juga menurun maka jumlah PAD akan menurun. Karena sebagian besar penyumbang PAD berasal dari pajak daerah. Hubungan antara daya pajak dan PAD memerlukan interval waktu (*lag*) untuk mempengaruhi, dengan kata lain daya pajak pada tahun berjalan akan mempengaruhi PAD pada tahun berikutnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah (Priyo Hari Adi)

Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara terlepas dari sistem pemerintahannya (Kuncoro, 2007). Pemberian dana transfer ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (disparitas vertikal) dan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah. Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga terjadi peningkatan kapasitas fiskal, ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin dikurangi dan menjadi semakin lebih mandiri.

Penelitian ditujukan untuk mengetahui apakah terjadi kecenderungan ilusi fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah diberlakukannya Otonomi Daerah melalui pengukuran pendapatan maupun melalui pengukuran dengan manipulasi belanja daerah.

Deteksi terhadap ilusi fiskal dengan pengukuran pendapatan dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\ln G = \ln \alpha + \ln Y + \ln P_r + \ln N + \ln D + \ln V + \ln H + \ln L + \mu$$

Dimana,

G = Pengeluaran Pemerintah

$P_r =$ _____

Y = PDRB

N = Jumlah Penduduk

D = _____

H = Herfindahl Concetration Taxes

V = Pajak Tidak Langsung

L = Pajak Daerah

Pengukuran manipulasi belanja (Expenditure Manipulation) dinyatakan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\ln Eg_t = \ln \delta_0 + \ln \delta_1 (1/Pg') Y_t + \ln \delta_2 (Pr'/Pg)_t + \ln \delta_3 (1/Pg')_t + \ln \delta_4 U + \mu_t$$

Dimana,

Eg = Anggaran Pendapatan Asli Daerah (periode t)

Pg' = Anggaran Dana Alokasi Umum (periode t)

Y = Penerimaan Daerah (periode t)

Pr' = Realisasi Dana Alokasi Umum (periode t)

U = Pengangguran (periode t)

$(1/Pg')Y$ = Rasio dari pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah

(Pr'/Pg') = Persepsi Relatif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (periode t)

$(1/Pg')$ = Kepentingan relatif dari Dana Alokasi Umum terhadap belanja pemerintah daerah (periode t)

Hasil penelitian dengan pendekatan pendapatan menunjukkan telah terjadi ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah. Karena ada variabel yang memiliki korelasi yang negatif dengan pengeluaran pemerintah, dengan nilai yang

signifikan, yaitu ratio pendapatan yang digunakan untuk belanja dan pajak tidak langsung.

Hasil penelitian dengan pendekatan manipulasi belanja menunjukkan bahwa telah terjadi ilusi fiskal dalam era otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hubungan negatif antara variabel Pr/Pg (persepsi relatif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan $1/Pg$ (kepentingan relatif DAU terhadap belanja pemerintah daerah) terhadap variabel Eg (PAD).

2.2.2 Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat (Laras Wulandari dan Priyo Hari Adi)

Kebijakan otonomi memberikan respon yang beragam antar satu daerah dengan lainnya. Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama, dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan/transfer kepada pemerintah daerah. Namun demikian, dalam perjalanannya transfer pemerintah pusat justru menjadi diinsentif bagi peningkatan kemandirian daerah. Daerah menjadi lebih bergantung pada transfer pemerintah pusat daripada mengoptimalkan pendapatan sendiri (PAD). Terdapat indikasi perilaku asimetris daerah dalam merespon transfer dari pemerintah pusat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada kecenderungan perilaku asimetris pemerintah daerah kabupaten atau kota terhadap pemerintah pusat yang diwujudkan dalam APBD. Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengukuran Manipulasi Belanja (*Expenditure Manipulation*)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada saat pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat dana itu digunakan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan PAD tiap-tiap daerah.

2.2.3 *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia (Diah Ayu Kusamadewi dan Arief Rahman)

Penelitian didasarkan pada tujuan desentralisasi yang paling penting yaitu untuk memperkuat kapasitas daerah, dimana pada saatnya akan turut memperkuat kapasitas negara. Meskipun demikian, beberapa penelitian mengindikasikan terjadinya kegagalan dalam desentralisasi. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat.

Tujuan penelitian adalah melihat pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah kabupaten/kota dan mencaritahu serta mengidentifikasi fenomena *flypaper effect* yang terjadi pada belanja pemerintah kabupaten/kota. Populasi dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, dengan sampel sebanyak 225 kabupaten/kota di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah model regresi berganda dengan persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$, dimana Y adalah belanja daerah, X_1 adalah PAD, dan X_2 adalah DAU.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Selain itu, fenomena *flypaper effect* juga terjadi di Indonesia. Fenomena ini terjadi tidak hanya di daerah dengan PAD rendah, tetapi juga pada daerah yang memiliki PAD tinggi.

2.3 Kerangka Pemikiran

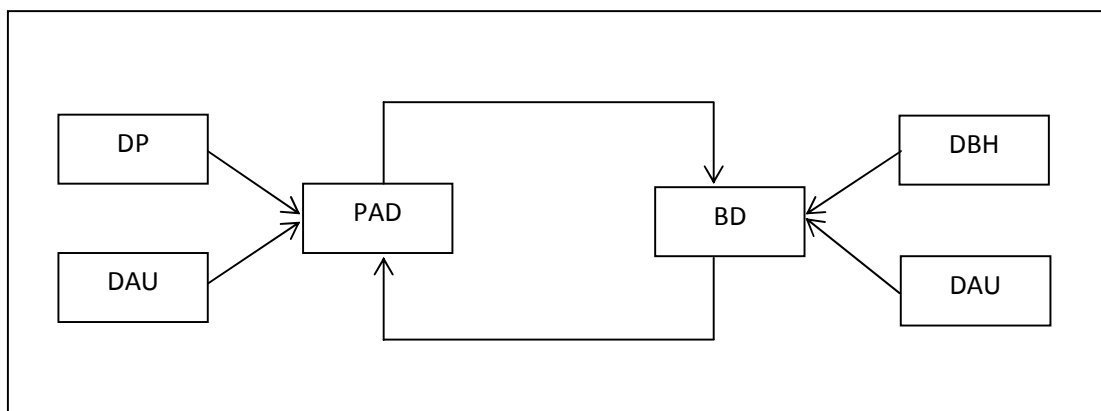
Penelitian ini didasarkan pada analogi bahwa transfer pemerintah pusat (DAU) kepada pemerintah daerah seharusnya menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Adanya peningkatan belanja daerah (seperti pembangunan infrastruktur publik) akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, sehingga secara bertahap pemerintah pusat mengurangi dana transfer tersebut. Kenyataan yang terjadi adalah jumlah transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin meningkat tiap tahunnya. Kondisi ini dibarengi dengan rendahnya peningkatan PAD pada periode yang sama. Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah (Priyo, 2009). Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya mempunyai hubungan positif dengan belanja, namun bila terjadi hal yang sebaliknya maka diindikasikan terjadi ilusi fiskal (Priyo, 2009).

Transfer merupakan sarana edukasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengumpulan PAD (Sidik, 2001). Melalui pengumpulan PAD

itulah pemerintah daerah memperoleh penerimaan, dimana penerimaan inilah yang kemudian dibelanjakan pemerintah daerah. Indikasi munculnya ilusi fiskal diperkirakan akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam menggali PAD-nya.

Kerangka pemikiran penelitian dibagi ke dalam 2 skema. Pertama, skema kerangka pemikiran daerah analisis determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. Skemanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran Analisis Determinan Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah



Dimana,

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

BD = Belanja daerah

DP = Daya Pajak

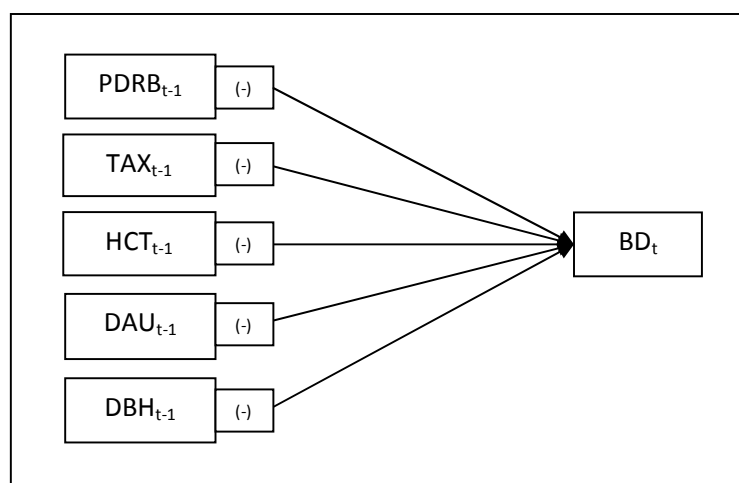
Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui pendekatan pendapatan (*revenue enhancement*). Pendekatan

pendapatan mengasumsikan bahwa belanja daerah berhubungan positif dengan penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat.

Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya mempunyai hubungan positif dengan belanja, namun bila terjadi hal yang sebaliknya maka diindikasikan terjadi ilusi fiskal (Priyo, 2009). Sehingga, syarat untuk terjadinya ilusi fiskal melalui pengukuran pendapatan (*revenue* enhancement) adalah terdapat variabel pendapatan yang berhubungan negatif dengan variabel belanja daerah

Adapun untuk skema penelitian deteksi ilusi fiskal pada kinerja fiskal pemerintah ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran Deteksi Ilusi Fiskal



Dimana,

BD_t	=	Belanja daerah
$PDRB_{t-1}$	=	Produk Domestik Regional Bruto
TAX_{t-1}	=	Pajak daerah
HCT_{t-1}	=	<i>Herfindahl Concentration Taxes</i> (HCT)
DAU_{t-1}	=	Dana Alokasi Umum
DBH_{t-1}	=	Dana Bagi Hasil

2.4 Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan deteksi ilusi fiskal dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif antara DAU terhadap belanja daerah.
2. Terdapat hubungan positif antara DBH terhadap belanja daerah.
3. Terdapat hubungan positif antara PAD terhadap belanja daerah.
4. Terdapat hubungan positif antara DAU terhadap PAD.
5. Terdapat hubungan positif antara daya pajak dengan PAD.
6. Terdapat hubungan positif antara belanja daerah terhadap PAD.
7. Terdapat fenomena ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (M. Nazir, 1998). Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi variabel yang digunakan.

Penelitian ini terbagi menjadi 2 penelitian, yaitu penelitian mengenai determinan kinerja keuangan pemerintah daerah dan penelitian mengenai deteksi ilusi fiskal.

Penelitian mengenai determinan kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan sistem persamaan simultan yang terdiri atas 2 persamaan struktural. Persamaan struktural pertama menggunakan belanja daerah (BD) sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah DAU, DBH, dan PAD. Persamaan struktural kedua menggunakan PAD sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah DAU, belanja daerah (BD), dan daya pajak (DP).

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian determinan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah

Belanja daerah adalah realisasi belanja yang tertuang dalam APBD pemerintah provinsi yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Data belanja daerah yang digunakan adalah data belanja daerah pada tahun berjalan (BD_t) dan tahun sebelumnya (BD_{t-1}). Data belanja daerah tahun berjalan (BD_t) digunakan pada persamaan struktural pertama, sedangkan data belanja daerah tahun sebelumnya (BD_{t-1}) digunakan pada persamaan struktural kedua. Satuan hitung untuk variabel belanja daerah adalah juta rupiah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Data DAU yang digunakan adalah data DAU tahun pertama sebelum tahun berjalan (DAU_{t-1}). Satuan hitung DAU untuk penelitian ini adalah juta rupiah.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Data DBH yang digunakan adalah data DBH tahun pertama sebelum tahun anggaran berjalan (DBH_{t-1}). Satuan hitung DBH dalam penelitian ini adalah juta rupiah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah provinsi untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Komponen dalam PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang disahkan. Data PAD yang digunakan adalah data PAD pada tahun berjalan (PAD_t) dan tahun sebelumnya (PAD_{t-1}). Data PAD tahun berjalan (PAD_t) digunakan pada persamaan struktural kedua, sedangkan data PAD tahun sebelumnya (PAD_{t-1}) digunakan pada persamaan struktural kedua. Variabel PAD dalam penelitian ini menggunakan satuan juta rupiah.

5. Daya Pajak

Devas (dalam Handayani, 2009) menyatakan bahwa upaya pengumpulan pajak adalah perbandingan penerimaan pajak dibagi dengan kemampuan bayar pajak. Kemampuan bayar pajak secara keseluruhan dapat berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data daya pajak daerah yang digunakan adalah data pajak daerah tahun pertama sebelum tahun anggaran berjalan (DP_{t-1}). Satuan hitung daya pajak daerah dalam penelitian ini adalah satuan desimal.

Penelitian mengenai deteksi ilusi fiskal menggunakan belanja daerah (BD) sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah PDRB, pajak daerah (TAX), HCT, DAU, dan DBH. Definisi operasional variabel yang digunakan

dalam penelitian determinan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah

Belanja daerah adalah realisasi belanja yang tertuang dalam APBD pemerintah provinsi yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Satuan hitung untuk variabel belanja daerah adalah juta rupiah.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di wilayah provinsi pada satu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, dengan satuan hitung juta rupiah.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Satuan hitung pajak daerah dalam penelitian ini adalah juta rupiah.

4. *Herfindahl Concentration Taxes* (HCT)

Herfindahl Concentration Taxes (HCT) terdiri dari beberapa kategori pajak yang bervariasi seperti: pajak sektor personal, pajak perusahaan, penerimaan pajak bukan dari penduduk dan beberapa pajak dengan kriteria khusus. Dalam penelitian ini variabel HCT diproksi dengan rasio antara retribusi daerah dengan total penerimaan retribusi provinsi. Penggunaan retribusi dalam proksi HCT mengingat retribusi daerah merupakan komponen terbesar PAD, selain pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi secara langsung dan nyata kepada pembayar. Satuan hitung HCT untuk penelitian ini dinyatakan dalam satuan desimal.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari belanja daerah, PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DBH, dan PAD. Data tersebut juga merupakan data runtun waktu (*time series*), yaitu data secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Dalam hal ini data yang digunakan berupa periode tahun 2006-2008.

Menurut Singleton *et al* (dalam Prabawati, 2009), data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel (populasi), semua data yang ada pada gilirannya merupakan variabel yang kita ukur, dapat diklasifikasikan menjadi data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku, literatur, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang diambil adalah data Provinsi se-Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Jumlah Provinsi di Indonesia hingga akhir tahun 2008 adalah 33 provinsi.

Sumber data berasal dari literatur maupun buku-buku yang menjadi rujukan relevan untuk penelitian. Data-data juga diperoleh dari instansi pemerintah yang yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, selain itu juga melalui portal Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia di www.djpk.depkeu.go.id.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari berbagai literatur yang berkaitan baik berupa catatan-catatan, dokumen, arsip, maupun artikel. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian dimana data yang diperlukan adalah data seluruh Provinsi di Indonesia. Meliputi data belanja daerah, PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DBH, dan PAD. Periode data yang diambil dimulai dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Data-data tersebut diperoleh melalui *browsing* di situs resmi Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jateng.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Alat Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini akan menggunakan model ekonometrika berdasarkan pada pengembangan teori sebagai berikut:

Persamaan Struktural 1:

$$BD_t = \beta_0 + \beta_1 DAU_{t-1} + \beta_2 DBH_{t-1} + \beta_3 PAD_{t-1} + e_{1t} \dots\dots\dots(3.1)$$

Persamaan Struktural 2:

$$PAD_t = \beta_4 + \beta_5 DAU_{t-1} + \beta_6 DP_{t-1} + \beta_7 BD_{t-1} + e_{2t} \dots\dots\dots(3.2)$$

Untuk menganalisis kedua model yang telah disusun, digunakan metode persamaan simultan karena terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel endogen secara simultan. Hal ini menyebabkan regresi tunggal dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) menjadi bias untuk digunakan.

Model dalam penelitian ini memfokuskan pada analisis regresi dengan kombinasi data *time series* dan *cross section*, yang populer disebut dengan *pooled time series*. *Pooled time series* merupakan kombinasi antara *time series* yang memiliki obsevasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data *cross section* yang memiliki observasi-observasi pada unit analisis di titik tertentu (Syars dalam Mudrajat Kuncoro, 2001). Ciri khusus pada data *time series* adalah berupa urutan

numerik dimana interval antar observasi atas sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap sedang data *cross section* adalah suatu unit analisis pada suatu titik tertentu dengan observasi sejumlah variabel. Unit analisis dalam hal ini dapat berupa individu, Kota, Kabupaten, Provinsi, Negara, bisnis, rumah tangga, atau industri. Jadi bila sejumlah variabel *cross section* yang berbeda observasi selama kurun waktu tertentu, maka akan diperoleh data pooling.

Alasan penggunaan data pooling :

1. Penggunaan data pooling meningkatkan jumlah observasi (sampel). Dengan kata lain, cara ini mengatasi masalah keterbatasan jumlah data runtun waktu.
2. Dengan data pooling akan diperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi yang muncul menurut waktu.

Dengan demikian, analisis dengan data ini memungkinkan untuk menguraikan, menganalisis, dan menguji hipotesis baik hasil maupun proses bagaimana memperoleh hasil.

Estimasi model persamaan tergantung pada asumsi yang telah kita buat mengenai intersep koefisien kemiringan (*slope*), dan *error term*. Ada beberapa kemungkinan (Gujarati, 2003) :

1. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (time) dan ruang (space) dan error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu (ruang).
2. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.
3. Koefisien slope konstan tapi intersep bervariasi antar waktu.

4. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar waktu dan individu (wilayah).
5. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu (wilayah).

Untuk dapat diregres secara simultan, maka harus dibentuk *reduced-form* dari kedua model yang digunakan. Bentuk *reduced-form* adalah sebagai berikut (Lampiran 2):

Reduced Form 1

$$BD_{it} = \Pi_0 + \Pi_1 DBH_{it-1} + \Pi_2 DAU_{it-1} + \Pi_3 DP_{it-1} + \mu_1 \dots \dots \dots (3.3)$$

Reduced Form 2

$$PAD_{it} = \Pi_4 + \Pi_5 DBH_{it-1} + \Pi_6 DAU_{it-1} + \Pi_7 DP_{it-1} + \mu_2 \dots \dots \dots (3.4)$$

Dimana,

$\Pi_0 = \frac{(\quad)}{(\quad)}$	$\Pi_5 = \frac{(\quad)}{(\quad)}$
$\Pi_1 = \frac{(\quad)}{(\quad)}$	$\Pi_6 = \frac{(\quad)}{(\quad)}$
$\Pi_2 = \frac{(\quad)}{(\quad)}$	$\Pi_7 = \frac{(\quad)}{(\quad)}$
$\Pi_3 = \frac{(\quad)}{(\quad)}$	$\mu_1 = \frac{(\quad)}{(\quad)}$
$\Pi_4 = \frac{(\quad)}{(\quad)}$	$\mu_2 = \frac{(\quad)}{(\quad)}$

3.4.1.1 Identifikasi Persamaan Simultan

Sistem persamaan simultan mempunyai permasalahan dalam identifikasi yakni apakah estimasi parameter dari persamaan struktural dapat diperoleh dari hasil estimasi persamaan reduced-form yang dibentuk. Jika dapat diperoleh dari estimasi reduced-form, maka persamaan-persamaan yang digunakan dianggap dapat diidentifikasi (*identified*). Apabila tidak bisa diperoleh dari hasil estimasi *reduced-form*, maka persamaan-persamaan yang digunakan dianggap tidak dapat diidentifikasi (*unidentified*).

Sistem persamaan yang teridentifikasi dapat dikatakan teridentifikasi secara penuh (*exactly identified*) maupun *overidentified*. Suatu sistem persamaan simultan dianggap dapat diidentifikasi secara penuh jika nilai parameter yang ditaksir dapat diperoleh dari persamaan-persamaan *reduced-form* dan masing-masing nilai parameternya tidak lebih dari satu nilai. Jika nilai-nilai parameter yang diperoleh ternyata melebihi dari satu maka sistem persamaan simultan ini dinyatakan sebagai suatu sistem yang melebihi sifat yang dapat diidentifikasi (*overidentified*)

Untuk mengetahui apakah sistem persamaan struktural yang dibentuk termasuk ke dalam kelompok *exactly identified*, *overidentified*, ataupun *unidentified* diperlukan satu kondisi penting, yakni apa yang disebut dengan *order-condition*. Kaidah *order-condition* akan memberikan kriteria sejauh mana kondisi persamaan struktural yang dibentuk. Untuk menggunakan kaidah *order-condition* dibutuhkan beberapa notasi untuk diketahui, yakni:

M	=	Jumlah variabel endogen dalam seluruh sistem persamaan simultan
m	=	Jumlah variabel endogen dalam satu persamaan simultan
K	=	Jumlah variabel eksogen (predetermined) dalam seluruh sistem persamaan simultan, termasuk intersep
k	=	Jumlah variabel eksogen (predetermined) dalam satu persamaan tertentu.

Dalam suatu sistem persamaan simultan, harus terdapat minimal sejumlah M-1 variabel endogen untuk dapat teridentifikasi. Jika jumlahnya tepat M-1, maka persamaan yang ada adalah teridentifikasi dengan tepat (*exactly identified*). Jika jumlahnya lebih dari M-1 maka persamaan yang ada termasuk *overidentified*. Lebih lanjut, jumlah variabel eksogen tidak boleh lebih kecil dari jumlah variabel endogen.

$$K - k \geq m - 1$$

Jika $K - k = m - 1$, maka sistem persamaan yang ada adalah teridentifikasi secara tepat, namun jika $K - k > m - 1$, maka sistem persamaan yang ada tergolong *overidentified*. Ketika sistem persamaan simultan yang dibentuk adalah tergolong *exactly identified* maka sistem persamaan simultan dapat diselesaikan menggunakan metode *Indirect Least Square* (ILS) maupun *Two-Stage Least Square* (TSLS), sedangkan jika sistem persamaan simultan yang dibentuk tergolong *overidentified* maka sistem persamaan simultan dapat diselesaikan dengan metode *Two-Stage Least Square* (TSLS).

Sesuai dengan namanya estimasi dengan metode TSLS dilakukan dengan dua tahap regresi OLS.

1. Pertama, dengan meregresikan variabel endogen terhadap variabel eksogen yang terdapat dalam persamaan *reduced form*. Melalui estimasi ini, akan diperoleh *fitted value* yang akan digunakan dalam persamaan struktural.
2. Kedua, meregresikan persamaan struktural dengan *fitted value* sehingga diperoleh estimator yang tidak bias dan konsisten.

3.4.2 Alat Analisis Deteksi Ilusi Fiskal

Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui pendekatan pendapatan (*revenue enhancement*). Pendekatan pendapatan mengasumsikan bahwa belanja daerah berhubungan positif dengan penerimaan daerah, karena belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarannya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya mempunyai hubungan positif dengan belanja, namun bila terjadi hal yang sebaliknya maka diindikasikan terjadi ilusi fiskal (Priyo, 2009).

Pada penelitian ini menggunakan pengukuran pendapatan (*revenue enhancement*) dimana belanja daerah (BD) sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen: PDRB (PDRB), pajak daerah (TAX),

Herfindahl Concentration Taxes (HCT), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH).

3.4.2.1 Model Regresi Deteksi Ilusi Fiskal

Persamaan regresi di dalam pengukuran pendekatan pendapatan (*revenue enhancement*) dapat dirumuskan sebagai berikut (Priyo, 2009):

$$\ln BD_t = \ln PDRB_{t-1} + \ln TAX_{t-1} + \ln HCT_{t-1} + \ln DAU_{t-1} + \ln DBH_{t-1} + \mu \dots \dots \dots (3.5)$$

Dimana,

BD	=	Belanja daerah
PDRB	=	PDRB daerah
TAX	=	Pajak daerah
HCT	=	<i>Herfindahl Concentration Taxes</i> (HCT)
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DBH	=	Dana Bagi Hasil

Herfindahl Concentration Taxes (HCT) terdiri dari beberapa kategori pajak yang bervariasi seperti: pajak sektor personal, pajak perusahaan, penerimaan pajak bukan dari penduduk dan beberapa pajak dengan kriteria khusus. Dalam penelitian ini variabel HCT diproksi dengan rasio antara retribusi daerah dengan total penerimaan retribusi provinsi. Penggunaan retribusi sebagai proksi HCT mengingat retribusi daerah merupakan komponen terbesar PAD, selain pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas

yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi secara langsung dan nyata kepada pembayar.

3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Sehubungan dengan penggunaan metode OLS, untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih sahih, maka untuk menguji apakah model tersebut menyimpang dari asumsi klasik perlu dilakukan pengujian dengan yang terdiri dari (1)uji normalitas, (2)uji gejala heteroskedastisitas, (3)uji autokolerasi, dan (4)uji multikolineritas.

a. Uji Normalitas

Regresi linier klasik mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan μ_t memiliki rata-rata yang diharapkan sam dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini, penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum (Gujarati, 2003).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain *Jarque-Bera Test* (J-B Test) dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B Test, yang dilakukan dengan menghitung nilai *skewness* dan kurtosis. Apabila J-B hitung < nilai χ^2 (*Chi-Square*) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal (Firmansyah, 2000).

b. Uji gejala Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain (Gujarati, 2003). Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati, 2003). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Park.

Uji Park memformalkan metode grafik dengan menyarankan bahwa δ_i^2 adalah suatu fungsi yang menjelaskan X_i . Bentuk umum fungsi yang disarankan adalah:

$$\delta_i^2 = \delta^2 X_i^\beta e^{v_i}$$

atau

$$\ln \delta_i^2 = \ln \delta^2 + \beta \ln X_i + v_i$$

Karena δ^2 biasanya tidak diketahui, Park menyarankan untuk menggunakan e_i^2 sebagai pendekatan dan melakukan regresi berikut:

$$\begin{aligned} \ln e_i^2 &= \ln \delta^2 + \beta \ln X_i + v_i \\ &= \alpha + \beta \ln X_i + v_i \end{aligned}$$

Jika β signifikan secara statistik, maka apabila koefisien parameter β dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika β tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data tersebut tidak dapat ditolak.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi (serial korelasi) adalah korelasi yang terjadi di antara anggota observasi yang berdekatan. Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka estimator OLS tidak lagi efisien. Karena selang keyakinan akan semakin lebar, berarti uji t dan uji F menjadi tidak valid dan kurang kuat.

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data *time series* walaupun dapat juga terjadi pada data *cross section*. Dalam data *time series*, observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antar dua observasi sangat pendek.

Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Uji ini sesungguhnya dilandasi oleh model error yang mempunyai korelasi sebagaimana ditunjukkan, yaitu :

$$\mu_t = \rho \mu_{t-1} + v_t \dots\dots\dots(3.6)$$

dimana:

μ_t = error pada waktu ke- t

μ_{t-1} = error pada waktu ke- $(t-1)$

ρ = koefisien autokorelasi lag-1 (untuk mengukur korelasi antara residual pada waktu ke- t dengan residual pada waktu $(t-1)$)

v_t = error yang independent dan berdistribusi normal dengan nilai tengah = 0, dan varians σ^2 .

Jika $\rho = 0$, maka dapat disimpulkan tidak ada serial korelasi di dalam residual.

Oleh karena itu, uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_1 : \rho \neq 0$$

Statistik Durbin Watson didefinisikan sebagai berikut :

$$DW = \frac{\sum \{e_t - e_{t-1}\}^2}{\sum e_t^2} \dots\dots\dots (3.7)$$

$$\text{Dimana : } \mu_t = Y_t - \beta_0 - \beta_1 X_t = Y_t - Y_t$$

Yaitu residual pada waktu ke-t

$$\mu_{t-1} = Y_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 X_{t-1} = Y_{t-1} - Y_{t-1}$$

Yaitu residual pada waktu ke (t-1).

Persamaan (3.5) dapat pula dituliskan sebagai berikut :

$$DW = 2 \frac{\sum e_t \cdot e_{t-1}}{\sum e_t^2} = 2(1-\rho) \dots\dots\dots (3.8)$$

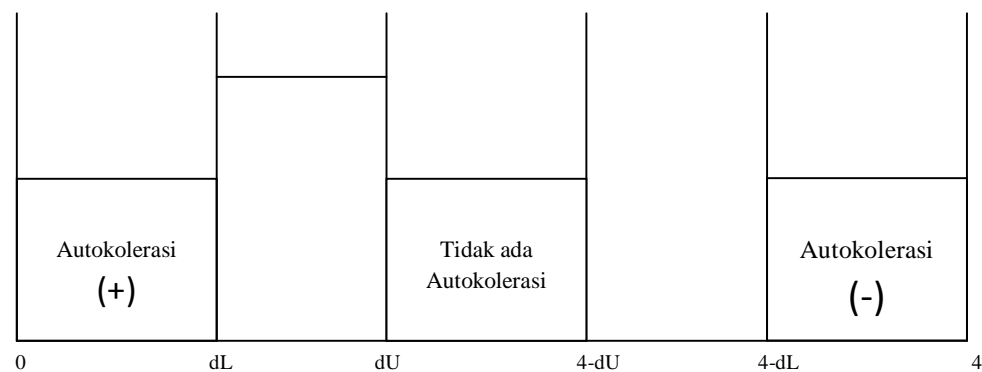
Persamaan (3.6) dapat pula dituliskan sebagai berikut :

$$\rho = \frac{\sum e_t \cdot e_{t-1}}{\sum e_t^2} \dots\dots\dots (3.9)$$

Sebagaimana telah disebutkan bahwa ρ adalah koefisien autokorelasi yang mempunyai nilai : $-1 \leq \rho \leq 1$. Dengan demikian, berdasarkan persamaan (3.7) akan dapat nilai statistik DW, yaitu : $0 \leq \rho \leq 1$. Persamaan (3.7) juga mengartikan bahwa :

- Jika statistik DW bernilai 2, maka p akan bernilai 0, yang berarti tidak ada autokorelasi
- Jika statistik DW bernilai 0, maka p akan bernilai 1, yang berarti tidak ada autokorelasi positif.
- Jika statistik DW bernilai 4, maka p akan bernilai -1, yang berarti tidak ada autokorelasi negatif.

Untuk kepentingan tersebut, DW telah mempunyai tabel yang digunakan sebagai pembandingan uji DW yang dilakukan, sehingga dapat di simpulkan dengan tepat ada atau tidaknya autokorelasi. Dalam membandingkan hasil tersendiri. Untuk mempermudah dalam memahami cara melakukan perbandingan tersebut, perhatikan gambar berikut :



Sumber: Winarno, dalam Handayani, 2009

d. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu gejala dimana terdapat korelasi antar variabel independen (Nachrowi dan Ustman, dalam Prabawati 2009). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka

variabel ini tidak ortogonal yang artinya variabel independen memiliki nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol.

Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas atau tidak di dalam model, dapat dilihat apakah *R-Squared* yang dihasilkan oleh estimasi tinggi, akan tetapi secara individu variabel independen banyak yang tidak signifikan (Gujarati, 2003).

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model adalah dengan melihat matriks koefisien korelasi. Jika terdapat variabel yang memiliki nilai korelasi mendekati 1, maka model teridentifikasi multikolinearitas sempurna, sedangkan jika tidak terjadi multikolinearitas sempurna, maka model bisa digunakan untuk estimasi.

3.6 Metode Pengujian Hipotesis

Jika model sudah bebas dari penyimpangan asumsi klasik, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan. Pengujian hipotesis terhadap hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara bersama-sama dilakukan dengan uji statistik t (t -test) dan uji F (F -test) serta pengujian koefisien determinasi (R^2).

3.6.1 Pengujian Koefisien Regresi Secara Serempak (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel-variabel

dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H_1 : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 2003).

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$= \frac{/()}{()/()} \dots\dots\dots(3.10)$$

Dimana:

K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila F hitung $< F$ tabel, yang artinya variabel penjelas secara serempak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila F hitung $> F$ tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.6.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Nilai t hitung dirumuskan dengan :

$$t \text{ hitung} = \frac{(\quad)}{\quad} \dots\dots\dots(3.11)$$

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut : H_0 ditolak apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, yang berarti variabel independennya (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.3 Pengujian Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent. Nilai koefisien determinasi di antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh prediksi variasi model dependen (Gujarati, 2003).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen, (R^2) pasti meningkat. Tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak (Handayani, 2009). Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik dan turun apabila satu variabel independen

ditambahkan ke dalam model. Pengujian ini pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat pemerintahan kabupaten/kota. Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 provinsi yang memperoleh status khusus, yaitu DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat.

Pulau Sumatera sebagai pulau paling barat di wilayah Indonesia merupakan pulau yang memiliki jumlah provinsi yang paling banyak. Di pulau ini, terdapat 10 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Sejak berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998 hingga era reformasi (1998-sekarang), setidaknya terdapat 2 provinsi baru di Sumatera. Kedua provinsi tersebut adalah Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Provinsi Bangka Belitung dimekarkan pada tahun 2000 dan beribukota di Pangkal Pinang, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau dimekarkan pada tahun 2002 dengan ibukota Tanjung Pinang. Potensi utama pulau Sumatera adalah pertanian (kelapa sawit).

Tabel 4.1
Daftar Provinsi di Pulau Sumatera

PROVINSI	IBUKOTA	POPULASI	LUAS (Km²)
Aceh	Banda Aceh	5.201.002	56.500,51
Sumatera Utara	Medan	12.450.911	72.427,81
Sumatera Barat	Padang	4.566.126	42.224,65
Riau	Pekanbaru	4.579.219	87.844,23
Jambi	Jambi	2.635.968	45.348,49
Sumatera Selatan	Palembang	6.782.339	60.302,54
Bengkulu	Bengkulu	1.549.273	19.795,15
Lampung	Bandar Lampung	7.116.177	37.735,15
Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	1.043.456	16.424,14
Kep. Riau	Tanjung Pinang	1.274.848	8.084,01

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

Pulau Jawa merupakan pulau dengan provinsi kedua (bersama dengan pulau Sulawesi) terbanyak setelah Sumatera. Pulau ini memiliki 6 provinsi, dimana 2 provinsi berstatus khusus yaitu DKI Jakarta (ibukota negara), dan DI Yogyakarta. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia, karena merupakan tempat tujuan utama migrasi di Indonesia. Adapun provinsi-provinsi di pulau ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Provinsi Banten adalah provinsi baru yang berdiri pada tahun 2000, dimekarkan dari provinsi Jawa Barat. Potensi utama pulau Jawa adalah pertanian (padi) dan sebagai pusat industri.

Tabel 4.2
Daftar Provinsi di Pulau Jawa

PROVINSI	IBUKOTA	POPULASI	LUAS (Km ²)
DKI Jakarta	Jakarta	8.860.381	740,29
Jawa Barat	Bandung	38.965.440	36.925,05
Jawa Tengah	Semarang	31.977.968	32.799,71
DI Yogyakarta	Yogyakarta	3.343.651	3.133,15
Jawa Timur	Surabaya	36.294.280	46.689,64
Banten	Serang	9.028.816	9.018,64

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

Pulau Sulawesi memiliki jumlah provinsi yang sama dengan pulau Jawa, yaitu 6 provinsi. Pada era Orde Baru jumlah provinsi di pulau ini adalah 4 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Namun, Pada tahun 2000 terbentuk provinsi Gorontalo hasil pemekaran provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, pada tahun 2004 terbentuk kembali provinsi baru hasil pemekaran Sulawesi Selatan, yakni provinsi Sulawesi Barat dengan ibukota di Mamuju. Potensi utama pulau Sulawesi adalah perikanan (darat dan laut) serta pertanian (padi).

Tabel 4.3
Daftar Provinsi di Pulau Sulawesi

PROVINSI	IBUKOTA	POPULASI	LUAS (Km ²)
Sulawesi Utara	Manado	2.128.780	13.930,73
Sulawesi Tengah	Palu	2.294.841	68.089,83
Sulawesi Selatan	Makassar	7.509.704	46.116,45
Sulawesi Tenggara	Kendari	1.963.025	36.757,45
Gorontalo	Gorontalo	922.176	12.165,44
Sulawesi Barat	Mamuju	969.429	16.787,19

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Pulau ini memiliki 4 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Selama masa Orde Baru hingga era reformasi, tidak terdapat pemekaran wilayah untuk provinsi. Sehingga, jumlah provinsi di pulau Kalimantan sejak era reformasi tetap 4 provinsi. Potensi utama pulau Kalimantan adalah perkebunan (terutama sawit) dan pertambangan (minyak bumi dan batu bara).

Tabel 4.4
Daftar Provinsi di Pulau Kalimantan

PROVINSI	IBUKOTA	POPULASI	LUAS (Km ²)
Kalimantan Barat	Pontianak	4.052.345	120.114,32
Kalimantan Tengah	Palangkaraya	1.914.900	153.564,50
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	3.446.631	37.530,52
Kalimantan Timur	Samarinda	2.848.798	194.849,08

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

Gugusan kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku ditambah dengan pulau Papua adalah kawasan Indonesia bagian timur. Wilayah ini didominasi oleh gugusan pulau-pulau kecil serta dataran kering dan tandus yang terhampar di beberapa wilayah. Dalam gugusan kepulauan ini terdapat 7 provinsi, yaitu Bali Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat pada gugusan kepulauan Nusa Tenggara. Maluku dan Maluku Utara pada gugusan kepulauan Maluku serta Papua dan Papua Barat di Pulau Papua. Dari ketujuh provinsi tersebut, Maluku Utara dan Papua Barat adalah provinsi yang berdiri pada era reformasi dimana otonomi daerah dicanangkan. Maluku Utara berdiri pada tahun 1999, sedangkan Papua Barat berdiri pada tahun 2001. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan daerah khusus yang mendapatkan

perhatian dari pemerintah pusat. Potensi utama kawasan ini adalah perikanan (Maluku dan Papua) serta pariwisata (Bali dan Nusa Tenggara).

Tabel 4.5
Daftar Provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

PROVINSI	IBUKOTA	POPULASI	LUAS (Km ²)
Bali	Denpasar	3.383.572	5.449,37
N T B	Mataram	4.184.411	19.708,79
N T T	Kupang	4.260.294	46.137,87
Maluku	Ambon	1.251.539	47.350,42
Maluku Utara	Ternate	884.142	39.959,99
Papua Barat	Manokwari	643.012	114.566,40
Papua	Jayapura	1.875.388	309.934,40

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

4.1.1 Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah

Indonesia memasuki babak baru pengelolaan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi ditandai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal (Adi, 2006). Otonomi Daerah mulai dilaksanakan pada awal tahun 2001 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Implementasi otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Era desentralisasi fiskal memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri (Makmun, 2004). Kondisi ini merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah masing-masing dengan mengoptimalkan potensi daerah yang bersangkutan. Keleluasaan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi daerah dalam era otonomi dan desentralisasi tidak pernah ada selama masa pemerintahan Orde Baru. Justru sebaliknya, pada era Orde Baru terjadi ketergantungan fiskal dan subsidi serta ketergantungan fiskal pada bantuan pemerintah pusat.

Selama masa era Orde Baru, pemerintah pusat ikut campur tangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang dikembangkan pada masa itu telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada Daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikana dana perimbangan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan daerah sebagai akibat dari perbedaan kondisi dan

potensi yang tidak sama antar daerah. Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara terlepas dari sistem pemerintahannya (Kuncoro, 2007).

Transfer alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (*intergovernmental fiscal transfer*) memiliki sejarah panjang di Indonesia. Sejak merdeka dan memiliki pemerintahan dan perundang-undangannya sendiri. Menurut Brodjonegoro (2002, dalam Lubekran, 2007) sejarah transfer pemerintah itu dapat diklasifikasikan dalam tiga periode, yaitu periode pra-SDO, periode SDO, dan periode dana perimbangan.

Pertama, periode pra-SDO. Periode ini dimulai pada tahun 1945 (setelah Indonesia merdeka) sampai dengan tahun 1972. Pada periode Pra-SDO, banyak bentuk transfer dari pemerintah pusat yang tujuannya untuk mensubsidi pemerintah daerah agar pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan dan pengeluarannya. Pada tahun 1956, pemerintah sempat mengeluarkan produk hukum berupa UU No. 32 yang berisi konsep formula transfer. Namun karena pada waktu itu formula tersebut dianggap terlalu kompleks, maka akhirnya tidak berjalan dengan baik.

Kedua, periode SDO (Subsidi Daerah Otonom). Diterapkan pertama kali pada tahun anggaran 1972/1973. SDO diberikan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai (membayar) gaji pegawainya. Sebanyak dua pertiga dari alokasi dana tersebut diberikan kepada pemerintah daerah tingkat 1 (provinsi), sementara sisanya untuk pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan karakteristiknya, SDO ini

merupakan *specific* atau *conditional grant*, dimana bantuan tersebut diberikan khusus untuk suatu alokasi tertentu, artinya tak ada kewenangan (*discretion*) bagi pemerintah daerah untuk mengelola dana tersebut (Lubekran, 2007).

Periode ketiga dan sedang berlangsung sekarang ini adalah periode transfer pemerintah melalui dana perimbangan. Dengan ditetapkannya UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 telah terjadi perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan serta dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang di dalam banyak literatur disebut dengan istilah '*Intergovernmental fiscal relation*' yang dalam UU 25/1999 disebut dengan perimbangan keuangan.

Dana transfer pemerintah dibedakan menjadi 3 jenis transfer, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (UU No.33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Tahun 2004).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Umumnya pemerintah pusat memberikan dana transfer dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Basis utama perhitungan DAU adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) atau perbedaan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal di masing-masing daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pengalokasian DAU ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Apabila suatu daerah memiliki potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskal kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, untuk daerah yang potensi fiskalnya kecil sedangkan kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.2.1 Perkembangan Belanja daerah

Belanja daerah mencerminkan aktivitas daerah dalam melaksanakan pembangunan pada tahun anggaran berjalan. Menurut Suparmoko (2000), pengeluaran pemerintah merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa-masa yang akan datang. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Selain itu pengeluaran juga merupakan upaya pemerintah menyediakan barang publik bagi masyarakat dan pihak swasta.

Pada tahun 2005 pemerintah melakukan kebijakan perubahan format belanja negara. Perubahan format belanja negara tersebut dilandasi oleh Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan yang dimaksud adalah dengan menjalankan sistem penganggaran yang terpadu (*unified budgeting system*), yaitu dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya dipisahkan (Purwanto, 2006).

Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Menurut teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman, pemerintah akan selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan memperbesar penerimaan dari pajak (Mangkoesoebroto, 1994). Sehingga dari tahun ke tahun, pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat. Berikut disajikan perkembangan pengeluaran tiap-tiap provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2005-2008.

Tabel 4.6
Perkembangan Belanja Daerah Provinsi di Indonesia
(dalam Juta Rupiah)

Daerah	2005	2006	(%)	2007	(%)	2008	(%)	% Rata-rata
Prov. NAD	2.169.779,96	2.109.838,49	-2,76	1.966.055,65	-6,81	5.715.623,67	190,72	60,38
Prov. Sumatera Utara	1.830.574,33	2.268.990,57	23,95	2.560.723,36	12,86	2.284.013,87	-10,81	8,67
Prov. Sumatera Barat	745.548,64	1.107.015,92	48,48	1.245.441,50	12,50	1.637.700,49	31,50	30,83
Prov. Riau	2.437.724,83	3.188.585,30	30,80	3.726.765,11	16,88	3.345.650,52	-10,23	12,48
Prov. Jambi	642.833,02	1.156.842,79	79,96	980.197,73	-15,27	1.206.212,28	23,06	29,25
Prov. Sumatera Selatan	1.097.417,95	1.580.361,45	44,01	2.328.231,68	47,32	2.072.951,38	-10,96	26,79
Prov. Bengkulu	373.510,53	399.413,00	6,93	664.760,15	66,43	1.183.540,35	78,04	50,47
Prov. Lampung	865.266,19	1.518.761,08	75,53	1.152.311,82	-24,13	1.295.631,21	12,44	21,28
Prov. DKI Jakarta	12.447.564,53	17.781.443,45	42,85	17.284.146,86	-2,80	15.956.526,09	-7,68	10,79
Prov. Jawa Barat	4.309.282,27	4.923.245,32	14,25	5.341.776,47	8,50	4.333.470,48	-18,88	1,29
Prov. Jawa Tengah	2.936.310,84	3.508.580,58	19,49	3.039.934,54	-13,36	3.478.349,96	14,42	6,85
Prov. DI Yogyakarta	676.198,53	968.386,07	43,21	977.994,24	0,99	1.252.415,17	28,06	24,09
Prov. Jawa Timur	4.045.400,89	4.955.093,57	22,49	3.928.944,37	-20,71	6.639.780,93	69,00	23,59
Prov. Kalimantan Barat	686.752,66	1.018.958,83	48,37	992.180,03	-2,63	1.360.959,91	37,17	27,64
Prov. Kalimantan Tengah	538.145,01	788.090,00	46,45	978.628,83	24,18	1.142.401,16	16,73	29,12
Prov. Kalimantan Selatan	796.733,44	1.123.626,37	41,03	1.024.547,51	-8,82	1.545.688,70	50,87	27,69
Prov. Kalimantan Timur	2.093.467,73	4.156.776,47	98,56	4.689.695,91	12,82	5.640.402,90	20,27	43,88
Prov. Sulawesi Utara	465.353,22	677.212,47	45,53	704.082,20	3,97	914.131,75	29,83	26,44
Prov. Sulawesi Tengah	457.689,99	598.379,26	30,74	701.626,24	17,25	954.733,64	36,07	28,02
Prov. Sulawesi Selatan	1.165.951,63	1.364.615,81	17,04	1.835.559,76	34,51	1.710.792,15	-6,80	14,92
Prov. Sulawesi Tenggara	373.385,66	629.336,68	68,55	614.204,55	-2,40	826.640,13	34,59	33,58
Prov. Bali	8.411.177,98	1.233.861,86	-85,33	996.477,19	-19,24	1.091.253,63	9,51	-31,69
Prov. NTB	517.908,77	787.124,59	51,98	834.986,03	6,08	921.721,51	10,39	22,82
Prov. NTT	443.975,45	673.034,05	51,59	910.232,54	35,24	984.233,46	8,13	31,66
Prov. Maluku	513.107,49	587.969,73	14,59	601.737,73	2,34	780.644,64	29,73	15,55
Prov. Papua	2.661.026,51	2.944.751,51	10,66	5.554.096,43	88,61	5.660.539,30	1,92	33,73
Prov. Maluku Utara	282.748,11	440.396,52	55,76	517.715,47	17,56	621.659,76	20,08	31,13
Prov. Banten	1.488.344,10	1.952.369,61	31,18	1.889.126,37	-3,24	1.661.969,79	-12,02	5,30
Prov. Bangka Belitung	340.243,53	512.921,76	50,75	636.425,23	24,08	776.090,98	21,95	32,26
Prov. Gorontalo	250.377,23	471.107,33	88,16	459.239,66	-2,52	504.135,92	9,78	31,81
Prov. Riau Kepulauan	419.662,52	870.571,64	107,45	1.277.317,72	46,72	1.148.936,85	-10,05	48,04
Prov. Irian JayaBarat	194.623,34	508.016,83	161,03	678.748,22	33,61	1.615.633,85	138,03	110,89
Prov. Sulawesi Barat	91.719,91	292.482,05	218,89	678.748,00	132,06	499.122,77	-26,46	108,16
TOTAL	56.769.806,76	67.098.160,97	18,19	71.772.659,09	6,97	80.763.559,20	12,53	12,56

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

Laju pertumbuhan belanja daerah tertinggi pada tahun 2005-2006 terdapat di provinsi Sulawesi Barat yaitu 218,89 persen, sedangkan laju pertumbuhan paling kecil adalah provinsi Bali yaitu -86,33 persen. Secara total, pertumbuhan belanja daerah pada periode 2005-2006 sebesar 18,19 persen. Belanja daerah mengalami peningkatan dari 56,77 trilyun rupiah pada tahun 2005 menjadi 67,01 trilyun pada tahun 2006.

Pada tahun 2007 laju pertumbuhan belanja daerah paling tinggi kembali dicapai oleh provinsi Sulawesi Barat dengan pertumbuhan sebesar 132,06 persen, sedangkan laju pertumbuhan paling rendah dialami oleh provinsi Lampung dengan persentase pertumbuhan -24,12 persen. Secara total, pertumbuhan belanja daerah di periode ini adalah sebesar 6,97 persen. Pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya. Hal ini berarti bahwa total belanja daerah provinsi meningkat tipis dari 67,01 trilyun menjadi 71,77 trilyun rupiah.

Periode berikutnya adalah periode 2007-2008. Pada periode ini nilai belanja daerah seluruh provinsi kembali mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 12,53 persen. Nilai tersebut berarti bahwa belanja daerah nominal seluruh provinsi di Indonesia meningkat menjadi 80,76 trilyun rupiah. Provinsi dengan pertumbuhan belanja daerah paling tinggi adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu 190,72 persen sedangkan yang paling rendah adalah provinsi Jawa Barat dengan -18,88 persen.

Secara keseluruhan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, total pengeluaran daerah seluruh provinsi mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Meskipun tren pertumbuhan belanja daerah menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Irian Jaya Barat mengalami pertumbuhan paling besar selama periode tersebut dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 110,89 persen. Lain halnya dengan provinsi Bali yang mengalami pertumbuhan rata-rata paling rendah, yaitu - 31,69 persen. Adapun rata-rata pertumbuhan total pengeluaran provinsi adalah sebesar 12,46 persen.

Berdasarkan pada penjelasan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah daerah provinsi dari tahun ke tahun sejak 2005 hingga 2008 mengikuti pola yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Teori yang mereka kemukakan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah menyatakan bahwa pemerintah daerah cenderung meningkatkan belanja daerah mereka dari waktu ke waktu. Sehingga atas itu, maka secara teori pola pengeluaran dan belanja pemerintah daerah secara umum sudah *on the right track*.

4.1.2.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana 2001, Atiah Handayani, 2009). Nilai bersih tersebut sebenarnya merupakan balas jasa dari faktor yang ikut serta dalam proses produksi yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta di tambah dengan penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Balas jasa faktor produksi, penyusutan dan jasa tidak langsung tadi dalam pergerakan sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto sehingga PDRB atas harga pasar tersebut juga merupakan penjumlahan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi. Melalui data PDRB dapat pula diketahui kondisi perekonomian regional suatu daerah.

Berikut ini akan disajikan data mengenai PDRB provinsi selama 4 tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2008. Selain itu, akan turut disajikan pula perkembangan dari tahun ke tahun serta rata-rata perkembangan nilai PDRB tiap provinsi dalam periode tersebut.

Tabel 4.7
Perkembangan PDRB Provinsi di Indonesia
(dalam Juta Rupiah)

Daerah	2005	2006	(%)	2007	(%)	2008	(%)	% Rata-rata
Prov. NAD	36.288.000	36.854.000	1,56	35.983.000	-2,36	34.085.000	-5,27	-2,03
Prov. Sumatera Utara	87.898.000	93.347.000	6,20	99.792.000	6,90	106.172.000	6,39	6,50
Prov. Sumatera Barat	29.159.000	30.950.000	6,14	32.913.000	6,34	35.007.000	6,36	6,28
Prov. Riau	79.288.000	83.371.000	5,15	86.213.000	3,41	91.085.000	5,65	4,74
Prov. Jambi	12.620.000	13.364.000	5,90	14.275.000	6,82	15.297.000	7,16	6,62
Prov. Sumatera Selatan	49.634.000	52.215.000	5,20	55.262.000	5,84	58.080.000	5,10	5,38
Prov. Bengkulu	6.239.000	6.611.000	5,96	7.009.000	6,02	7.354.000	4,92	5,64
Prov. Lampung	29.397.000	30.861.000	4,98	32.695.000	5,94	34.415.000	5,26	5,39
Prov. DKI Jakarta	295.271.000	312.827.000	5,95	332.971.000	6,44	353.539.000	6,18	6,19
Prov. Jawa Barat	242.884.000	257.499.000	6,02	274.180.000	6,48	290.171.000	5,83	6,11
Prov. Jawa Tengah	143.051.000	150.683.000	5,34	159.110.000	5,59	167.790.000	5,46	5,46
Prov. DI Yogyakarta	16.911.000	17.536.000	3,70	18.292.000	4,31	19.209.000	5,01	4,34
Prov. Jawa Timur	256.375.000	271.249.000	5,80	287.814.000	6,11	304.799.000	5,90	5,94
Prov. Kalimantan Barat	23.538.000	24.768.000	5,23	26.261.000	6,03	27.684.000	5,42	5,56
Prov. Kalimantan Tengah	14.035.000	14.854.000	5,84	15.755.000	6,07	16.726.000	6,16	6,02
Prov. Kalimantan Selatan	23.293.000	24.425.000	4,86	25.922.000	6,13	27.538.000	6,23	5,74
Prov. Kalimantan Timur	93.938.000	96.613.000	2,85	97.803.000	1,23	103.168.000	5,49	3,19
Prov. Sulawesi Utara	12.745.000	13.473.000	5,71	14.344.000	6,46	15.428.000	7,56	6,58
Prov. Sulawesi Tengah	11.752.000	12.672.000	7,83	13.684.000	7,99	14.746.000	7,76	7,86
Prov. Sulawesi Selatan	36.422.000	38.868.000	6,72	41.332.000	6,34	44.550.000	7,79	6,95
Prov. Sulawesi Tenggara	8.027.000	8.643.000	7,67	9.332.000	7,97	10.011.000	7,28	7,64
Prov. Bali	21.072.000	22.185.000	5,28	23.497.000	5,91	24.901.000	5,98	5,72
Prov. NTB	15.184.000	15.604.000	2,77	16.369.000	4,90	16.800.000	2,63	3,43
Prov. NTT	9.867.000	10.369.000	5,09	10.902.000	5,14	11.426.000	4,81	5,01
Prov. Maluku	3.259.000	3.440.000	5,55	3.633.000	5,61	3.787.000	4,24	5,13
Prov. Papua	22.209.000	18.402.000	-17,14	19.200.000	4,34	18.915.000	-1,48	-4,76
Prov. Maluku Utara	2.237.000	2.359.000	5,45	2.501.000	6,02	2.651.000	6,00	5,82
Prov. Banten	58.107.000	61.342.000	5,57	65.047.000	6,04	68.831.000	5,82	5,81
Prov. Bangka Belitung	8.707.000	9.054.000	3,99	9.465.000	4,54	9.885.000	4,44	4,32
Prov. Gorontalo	2.028.000	2.176.000	7,30	2.339.000	7,49	2.521.000	7,78	7,52
Prov. Riau Kepulauan	30.382.000	32.441.000	6,78	34.714.000	7,01	37.021.000	6,65	6,81
Prov. Irian JayaBarat	5.307.000	5.549.000	4,56	5.934.000	6,94	6.369.000	7,33	6,28
Prov. Sulawesi Barat	3.107.000	3.321.000	6,89	3.568.000	7,44	3.873.000	8,55	7,62
TOTAL	1.690.231.000	1.777.925.000	5,19	1.878.111.000	5,63	1.983.834.000	5,63	5,48

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

Pada tahun 2005, secara keseluruhan nilai PDRB provinsi di Indonesia adalah 1.690 trilyun rupiah. Daerah dengan nilai PDRB paling besar adalah DKI Jakarta dengan nominal 295,27 trilyun rupiah. Sedangkan daerah dengan nilai PDRB terkecil adalah Gorontalo dengan nilai 2,03 trilyun rupiah.

Tahun 2006 tercatat nilai PDRB yang dihasilkan oleh seluruh provinsi adalah sebesar 1.777 trilyun rupiah, atau terjadi peningkatan 5,19 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Tabel 4.8 juga terlihat bahwa Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang mengalami pertumbuhan nilai PDRB paling tinggi dengan 7,67 persen. Adapun daerah yang mengalami penurunan nilai PDRB provinsi paling rendah adalah Papua dengan pencapaian -17,14 persen, berarti nilai PDRB-nya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai total PDRB pada tahun 2007 adalah sebesar 1.878 trilyun rupiah atau meningkat sebesar 5,63 persen. Daerah yang mengalami pertumbuhan nilai PDRB daerah paling tinggi adalah Sulawesi Tengah dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,99 persen. Pertumbuhan yang paling kecil dialami oleh Nanggroe Aceh Darussalam dengan penurunan sebesar 2,36 persen.

Tahun 2008 terjadi peningkatan total nilai PDRB provinsi. Besar pertumbuhannya sama dengan pertumbuhan pada tahun 2007 yaitu 5,63 persen. Sulawesi Barat adalah daerah dengan pertumbuhan nilai PDRB paling tinggi dengan 8,55 persen sedangkan Nanggroe Aceh Darussalam kembali menjadi daerah dengan pertumbuhan terkecil di antara 33 provinsi lainnya. Aceh kembali mengalami penurunan PDRB sebesar 5,27 persen.

Berdasarkan pada Tabel 4.8 terlihat bahwa umumnya nilai PDRB provinsi tidak mengalami pertumbuhan yang berarti, baik secara total maupun per provinsi. Pertumbuhan rata-rata dari total PDRB provinsi se-Indonesia dalam periode 2005-2008 sebesar 5,48 persen. Dimana Sulawesi Tengah mencapai rata-rata pertumbuhan paling tinggi dan Nanggroe Aceh Darussalam dengan pertumbuhan paling rendah. Provinsi NAD mengalami penurunan tiap tahun dalam perhitungan PDRB-nya, kondisi tentu saja memprihatinkan mengingat NAD adalah daerah dengan status otonomi khusus.

4.1.2.3 Perkembangan Pajak Daerah

Berdasarkan pada UU No.34 Tahun 2000 dan PP No.65 Tahun 2001, pajak daerah dibedakan atas 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak yang tergolong dalam pajak provinsi adalah :

1. PKB & kendaraan di atas air.
2. BBNKP & kendaraan di atas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah & air permukaan.

Sedangkan yang tergolong dalam pajak kabupaten/kota antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian C, dan pajak parkir. Berikut ini disajikan mengenai perkembangan jumlah pajak provinsi di Indonesia dalam periode 2005-2008.

Tabel 4.8
Perkembangan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia
(dalam Juta Rupiah)

Daerah	2005	2006	(%)	2007	(%)	2008	(%)	% Rata-rata
Prov. NAD	177.472,43	158.055,01	-10,94	362.835,20	129,56	464.317,35	27,97	48,86
Prov. Sumatera Utara	1.301.137,84	1.283.750,00	-1,34	1.542.508,89	20,16	2.002.004,60	29,79	16,20
Prov. Sumatera Barat	375.966,96	384.635,00	2,31	479.453,17	24,65	670.371,64	39,82	22,26
Prov. Riau	655.884,68	742.150,50	13,15	926.592,21	24,85	1.274.416,99	37,54	25,18
Prov. Jambi	281.727,57	297.816,17	5,71	372.446,51	25,06	527.008,67	41,50	24,09
Prov. Sumatera Selatan	511.334,75	544.123,13	6,41	748.373,44	37,54	1.026.920,25	37,22	27,06
Prov. Bengkulu	93.346,38	88.688,08	-4,99	148.121,70	67,01	214.209,00	44,62	35,55
Prov. Lampung	468.358,78	419.183,33	-10,50	567.498,75	35,38	774.613,92	36,50	20,46
Prov. DKI Jakarta	6.513.811,21	7.400.000,00	13,60	7.202.527,44	-2,67	8.751.773,78	21,51	10,82
Prov. Jawa Barat	3.385.936,56	3.226.532,50	-4,71	3.889.839,39	20,56	4.926.338,15	26,65	14,17
Prov. Jawa Tengah	1.996.141,37	2.180.000,00	9,21	2.422.799,02	11,14	3.068.130,11	26,64	15,66
Prov. DI Yogyakarta	360.119,66	387.406,29	7,58	434.898,89	12,26	525.186,56	20,76	13,53
Prov. Jawa Timur	3.089.131,89	3.183.000,00	3,04	3.574.886,24	12,31	4.481.791,54	25,37	13,57
Prov. Kalimantan Barat	253.716,78	298.370,93	17,60	365.324,75	22,44	494.929,57	35,48	25,17
Prov. Kalimantan Tengah	128.105,74	150.395,00	17,40	226.464,41	50,58	318.109,35	40,47	36,15
Prov. Kalimantan Selatan	454.434,81	514.510,00	13,22	563.757,93	9,57	904.946,73	60,52	27,77
Prov. Kalimantan Timur	694.849,78	640.540,00	-7,82	1.056.568,99	64,95	1.561.637,23	47,80	34,98
Prov. Sulawesi Utara	158.600,87	156.428,00	-1,37	212.415,37	35,79	288.295,73	35,72	23,38
Prov. Sulawesi Tengah	120.026,30	120.219,50	0,16	167.521,65	39,35	231.946,72	38,46	25,99
Prov. Sulawesi Selatan	565.425,35	588.450,00	4,07	850.491,37	44,53	1.068.165,05	25,59	24,73
Prov. Sulawesi Tenggara	74.062,03	99.251,08	34,01	99.492,41	0,24	149.830,29	50,59	28,28
Prov. Bali	663.349,78	647.230,67	-2,43	735.938,83	13,71	945.973,96	28,54	13,27
Prov. NTB	146.983,51	178.140,29	21,20	258.830,92	45,30	348.568,54	34,67	33,72
Prov. NTT	85.548,57	96.095,61	12,33	112.971,62	17,56	150.722,92	33,42	21,10
Prov. Maluku	51.141,21	61.907,77	21,05	67.143,37	8,46	87.892,22	30,90	20,14
Prov. Papua	136.301,54	124.301,89	-8,80	194.176,03	56,21	259.185,99	33,48	26,96
Prov. Maluku Utara	24.466,68	17.000,00	-30,52	38.152,30	124,43	55.753,31	46,13	46,68
Prov. Banten	1.037.938,70	1.210.841,00	16,66	1.246.280,79	2,93	1.601.610,64	28,51	16,03
Prov. Bangka Belitung	172.164,30	168.858,29	-1,92	173.292,13	2,63	260.567,54	50,36	17,02
Prov. Gorontalo	37.409,81	43.044,89	15,06	59.221,75	37,58	82.572,43	39,43	30,69
Prov. Riau Kepulauan	161.513,14	229.116,00	41,86	301.504,80	31,59	391.240,52	29,76	34,40
Prov. Irian JayaBarat	12.066,64	6.000,00	-50,28	25.436,80	323,95	66.519,24	161,51	145,06
Prov. Sulawesi Barat	20.311,41	28.758,80	41,59	25.436,80	-11,55	54.259,24	113,31	47,78
TOTAL	24.208.787,03	25.674.799,73	6,06	29.453.203,87	14,72	38.029.809,82	29,12	16,63

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

Pajak provinsi dalam 3 tahun periode pengamatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dalam angka nominal maupun pertumbuhan pertahunnya. Secara nominal, jumlah pajak provinsi yang terkumpul pada tahun 2005 adalah sebanyak 24,21 trilyun rupiah. Pajak daerah pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 6,06 persen, sehingga jumlah pajak pada tahun ini sebesar 25,67 trilyun rupiah.

Pada tahun 2007, penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 14,72 persen menjadi 29,45 trilyun rupiah. Peningkatan akumulasi penerimaan pajak provinsi secara nasional sangat dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan penerimaan pajak Irian Jaya Barat yang mencapai 323,95 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh aktifnya pemerintah daerah setempat dalam melakukan penarikan pajak provinsi, mengingat daerah ini adalah daerah otonomi khusus di kawasan Indonesia bagian Timur.

Hingga tahun 2008 penerimaan pajak kembali meningkat 29,12 persen dari tahun sebelumnya menjadi 38,03 trilyun rupiah. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat penerimaan pajak daerah masing-masing provinsi. Berdasarkan pada data, semua provinsi mengalami peningkatan di atas 20 persen di tahun ini. Bahkan provinsi baru seperti Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat mencatat pertumbuhan di atas 100 persen, yaitu 113,31 persen untuk Sulawesi Barat dan 161,51 persen untuk Irian Jaya Barat

4.1.2.4 Perkembangan Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Lebih lanjut Miyasto (2009) menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan paksa yang dilakukan pemerintah terhadap wajib retribusi dengan kontra prestasi langsung yang diberikan pemerintah kepada wajib retribusi.

Berdasarkan pada PP No.66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, retribusi daerah dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar. Adapun pengelompokannya yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Berikut akan disajikan mengenai perkembangan penerimaan retribusi daerah provinsi di Indonesia.

Tabel 4.9
Perkembangan Retribusi Daerah Provinsi di Indonesia
(dalam Juta Rupiah)

Daerah	2005	2006	(%)	2007	(%)	2008	(%)	% Rata-rata
Prov. NAD	969,25	1.843,98	90,25	8.327,51	351,60	12.201,89	46,52	162,79
Prov. Sumatera Utara	18.852,33	10.431,01	-44,67	13.611,81	30,49	29.409,17	116,06	33,96
Prov. Sumatera Barat	9.405,45	8.902,18	-5,35	32.386,37	263,80	50.673,62	56,47	104,97
Prov. Riau	30.285,18	30.656,26	1,23	35.953,28	17,28	28.016,66	-22,07	-1,19
Prov. Jambi	18.455,15	19.402,58	5,13	22.819,12	17,61	27.282,99	19,56	14,10
Prov. Sumatera Selatan	4.011,30	5.066,57	26,31	11.353,18	124,08	13.507,72	18,98	56,45
Prov. Bengkulu	14.801,11	17.132,03	15,75	37.402,25	118,32	42.495,51	13,62	49,23
Prov. Lampung	48.488,54	66.873,86	37,92	61.552,45	-7,96	71.175,34	15,63	15,20
Prov. DKI Jakarta	419.674,27	443.760,37	5,74	676.004,43	52,34	395.639,56	-41,47	5,53
Prov. Jawa Barat	26.385,98	24.179,21	-8,36	30.807,39	27,41	35.398,71	14,90	11,32
Prov. Jawa Tengah	194.158,78	205.039,23	5,60	301.213,53	46,91	321.963,37	6,89	19,80
Prov. DI Yogyakarta	11.940,42	15.249,01	27,71	16.979,70	11,35	29.259,90	72,32	37,13
Prov. Jawa Timur	212.083,42	194.920,60	-8,09	261.100,68	33,95	309.323,37	18,47	14,78
Prov. Kalimantan Barat	20.281,09	19.882,61	-1,96	32.931,58	65,63	39.085,75	18,69	27,45
Prov. Kalimantan Tengah	11.253,61	10.280,00	-8,65	17.201,58	67,33	23.495,50	36,59	31,76
Prov. Kalimantan Selatan	34.085,15	39.235,88	15,11	70.573,56	79,87	22.106,74	-68,68	8,77
Prov. Kalimantan Timur	105.479,11	120.602,00	14,34	120.651,00	0,04	182.804,92	51,52	21,96
Prov. Sulawesi Utara	8.056,51	9.961,10	23,64	4.723,42	-52,58	6.049,79	28,08	-0,29
Prov. Sulawesi Tengah	9.572,37	14.705,45	53,62	13.637,32	-7,26	19.037,29	39,60	28,65
Prov. Sulawesi Selatan	48.464,70	48.800,34	0,69	57.410,12	17,64	72.972,98	27,11	15,15
Prov. Sulawesi Tenggara	10.438,37	14.429,48	38,24	16.656,74	15,44	19.752,81	18,59	24,09
Prov. Bali	9.693,18	8.325,50	-14,11	15.321,96	84,04	19.002,05	24,02	31,32
Prov. NTB	20.435,17	27.788,05	35,98	28.368,68	2,09	36.680,36	29,30	22,46
Prov. NTT	19.962,62	22.279,31	11,61	31.666,97	42,14	32.817,66	3,63	19,13
Prov. Maluku	16.277,69	18.685,50	14,79	23.264,43	24,51	19.480,37	-16,27	7,68
Prov. Papua	14.001,02	10.192,02	-27,21	20.526,26	101,40	19.710,39	-3,97	23,41
Prov. Maluku Utara	515,18	6.092,24	1.082,54	7.793,05	27,92	4.855,11	-37,70	357,59
Prov. Banten	2.498,72	2.657,50	6,35	3.052,57	14,87	3.184,53	4,32	8,51
Prov. Bangka Belitung	638,05	1.082,00	69,58	1.265,79	16,99	3.000,95	137,08	74,55
Prov. Gorontalo	3.779,49	15.278,00	304,23	0,00	-100,00	0,00	0,00	68,08
Prov. Riau Kepulauan	293,45	420,00	43,12	352,16	-16,15	1.903,57	440,54	155,84
Prov. Irian JayaBarat	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00	21,67	-70,36	-23,45
Prov. Sulawesi Barat	238,44	210,00	-11,93	0,00	-100,00	1.346,14	0,00	-37,31
TOTAL	1.345.475,08	1.434.363,87	6,61	1.974.981,99	37,69	1.893.656,37	-4,12	13,39

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

Berdasarkan pada Tabel 4.10 terlihat bahwa terjadi fluktuasi penerimaan daerah retribusi daerah. Pada tahun 2005, secara keseluruhan total penerimaan retribusi daerah adalah 1,35 triliun rupiah. Daerah dengan pendapatan retribusi daerah paling besar adalah DKI Jakarta dengan nominal 419,67 milyar rupiah. Sedangkan daerah dengan penerimaan retribusi terkecil adalah Sulawesi Barat dengan nilai 238,44 juta rupiah.

Tahun 2006 tercatat penerimaan retribusi yang terkumpul adalah sebesar 1,43 triliun rupiah, atau terjadi peningkatan 6,61 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Tabel 4.10 juga terlihat bahwa Maluku Utara merupakan daerah yang mengalami pertumbuhan penerimaan retribusi paling tinggi, sedangkan Sulawesi Utara mengalami penurunan penerimaan retribusi sebesar 52,58 persen dibandingkan tahun 2005.

Penerimaan retribusi pada tahun 2007 adalah sebesar 1,97 triliun rupiah atau meningkat sebesar 37,69 persen. Daerah yang mengalami pertumbuhan jumlah retribusi daerah paling tinggi adalah Nanggroe Aceh Darussalam dengan tingkat pertumbuhan sebesar 351,6 persen. Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah yang paling kecil dialami oleh Kalimantan Timur dengan penurunan sebesar 97,65 persen.

Tahun 2008 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah, sehingga pertumbuhannya lebih kecil di bandingkan tahun 2007. Penurunannya sebesar 4,12 persen. Kepulauan Riau adalah daerah dengan pertumbuhan penerimaan retribusi paling tinggi, sedangkan Irian Jaya Barat sebagai daerah dengan pertumbuhan terkecil di antara 33 provinsi lainnya.

4.1.2.5 Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Berikut ini disajikan data perkembangan DAU untuk seluruh Provinsi di Indonesi sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 beserta dengan pertumbuhannya.

Tabel 4.10
Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi di Indonesia
(dalam Juta Rupiah)

Daerah	2005	2006	(%)	2007	(%)	2008	(%)	% Rata-rata
Prov. NAD	271.147,00	460.881,00	69,97	487.934,00	5,87	557.327,16	14,22	30,02
Prov. Sumatera Utara	313.745,00	539.718,00	72,02	657.357,00	21,80	727.910,82	10,73	34,85
Prov. Sumatera Barat	247.487,00	477.029,00	92,75	546.332,00	14,53	631.791,70	15,64	40,97
Prov. Riau	92.157,00	92.158,00	0,00	277.659,00	201,29	198.375,20	-28,55	57,58
Prov. Jambi	243.618,00	374.300,00	53,64	415.018,00	10,88	468.803,68	12,96	25,83
Prov. Sumatera Selatan	242.707,00	421.381,00	73,62	510.197,00	21,08	545.776,13	6,97	33,89
Prov. Bengkulu	230.653,00	378.050,00	63,90	405.858,00	7,36	482.472,81	18,88	30,05
Prov. Lampung	285.761,83	460.898,00	61,29	509.656,00	10,58	570.533,93	11,94	27,94
Prov. DKI Jakarta	773.023,90	772.000,00	-0,13	119.943,00	-84,46	0,00	-100,00	-61,53
Prov. Jawa Barat	570.660,00	565.753,00	-0,86	933.436,00	64,99	904.358,92	-3,12	20,34
Prov. Jawa Tengah	549.956,00	890.402,00	61,90	1.050.732,00	18,01	1.053.491,87	0,26	26,72
Prov. DI Yogyakarta	238.692,00	402.484,00	68,62	437.379,00	8,67	511.773,39	17,01	31,43
Prov. Jawa Timur	454.635,00	820.773,00	80,53	1.091.155,00	32,94	1.022.860,63	-6,26	35,74
Prov. Kalimantan Barat	312.572,00	586.027,00	87,49	610.890,00	4,24	728.080,80	19,18	36,97
Prov. Kalimantan Tengah	287.575,61	552.000,00	91,95	571.290,00	3,49	670.213,09	17,32	37,59
Prov. Kalimantan Selatan	238.366,97	378.580,00	58,82	427.994,00	13,05	466.559,21	9,01	26,96
Prov. Kalimantan Timur	265.592,00	257.108,00	-3,19	235.743,00	-8,31	126.235,25	-46,45	-19,32
Prov. Sulawesi Utara	247.873,00	404.324,00	63,12	447.094,54	10,58	532.916,17	19,20	30,96
Prov. Sulawesi Tengah	271.756,00	477.668,00	75,77	502.129,00	5,12	606.486,78	20,78	33,89
Prov. Sulawesi Selatan	332.725,00	509.540,00	53,14	599.508,00	17,66	656.710,94	9,54	26,78
Prov. Sulawesi Tenggara	254.162,00	426.354,00	67,75	461.841,00	8,32	566.435,38	22,65	32,91
Prov. Bali	199.924,00	353.306,00	76,72	536.533,00	51,86	448.187,42	-16,47	37,37
Prov. NTB	249.887,00	404.130,00	61,73	447.658,00	10,77	511.286,48	14,21	28,90
Prov. NTT	305.473,78	479.436,00	56,95	553.589,00	15,47	616.601,85	11,38	27,93
Prov. Maluku	279.055,00	425.137,00	52,35	476.048,00	11,98	556.236,40	16,84	27,06
Prov. Papua	418.866,94	810.236,59	93,44	876.295,00	8,15	1.002.431,83	14,39	38,66
Prov. Maluku Utara	229.229,90	338.605,00	47,71	370.724,00	9,49	451.481,46	21,78	26,33
Prov. Banten	198.018,00	245.294,00	23,87	330.597,00	34,78	342.743,86	3,67	20,77
Prov. Bangka Belitung	187.358,00	275.690,00	47,15	319.357,00	15,84	391.045,44	22,45	28,48
Prov. Gorontalo	211.012,99	319.390,00	51,36	291.394,00	-8,77	368.638,00	26,51	23,03
Prov. Riau Kepulauan	25.963,00	178.000,00	585,59	333.332,99	87,27	288.884,86	-13,33	219,84
Prov. Irian JayaBarat	128.243,00	350.541,00	173,34	464.871,00	32,62	578.084,26	24,35	76,77
Prov. Sulawesi Barat	65.520,07	255.207,00	289,51	279.253,00	9,42	366.674,67	31,31	110,08
TOTAL	9.223.416,99	14.682.400,59	59,19	16.578.797,52	12,92	17.951.410,38	8,28	26,79

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

Tahun 2005 jumlah DAU yang diterima oleh 33 provinsi adalah sebesar 9,22 trilyun rupiah. Jumlah ini membengkak pada tahun 2006 menjadi 14,68 trilyun rupiah atau meningkat sebesar 59,19 persen. Daerah dengan peningkatan pertumbuhan DAU paling tinggi adalah Kepulauan Riau, sedangkan pertumbuhan terendah adalah provinsi Jawa Barat dengan nilai -0,86 persen.

Alokasi DAU untuk tahun 2007 juga mengalami peningkatan secara nominal, dari 14,21 trilyun menjadi 16,58 trilyun rupiah atau meningkat 12,92 persen. Pertumbuhan paling tinggi dialami oleh Riau yang meningkat sebesar 201,29 persen. Untuk daerah dengan pertumbuhan DAU paling rendah adalah DKI Jakarta dengan penurunan sebesar 84,46 persen.

Tahun 2008 sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam periode pengamatan. Pertumbuhan alokasi DAU provinsi hanya 8,28 persen dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain jumlah DAU provinsi meningkat dari 16,58 trilyun menjadi 17,95 trilyun rupiah. Kondisi ini terjadi karena beberapa provinsi mengalami penurunan permintaan DAU. Adapun provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau, Bali, dan DKI Jakarta. Pemberian DAU yang paling tinggi pertumbuhannya adalah provinsi Sulawesi Barat (31,31 persen) sedangkan yang terendah adalah DKI Jakarta (-100 persen).

Pemberian DAU kepada pemerintah provinsi secara tren (pertumbuhan) menunjukkan pola yang menurun. Pola tren yang menurun mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun pemerintah semakin mengurangi pemberian DAU pada daerah.

Meskipun dalam nominal masih mengalami peningkatan, tetapi pertumbuhannya menurun.

4.1.2.6 Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya.

Berikut ini akan disajikan perkembangan DBH kepada 33 provinsi di Indonesia, mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 disertai dengan pertumbuhan pertahunnya.

Tabel 4.11
Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi di Indonesia
(dalam Juta Rupiah)

Daerah	2005	2006	(%)	2007	(%)	2008	(%)	% Rata-rata
Prov. NAD	1.891.814,50	1.305.454,00	-30,99	1.694.561,00	29,81	2.031.965,79	19,91	6,24
Prov. Sumatera Utara	204.646,30	198.935,00	-2,79	293.724,30	47,65	492.659,30	67,73	37,53
Prov. Sumatera Barat	62.579,31	52.328,00	-16,38	87.533,69	67,28	87.843,37	0,35	17,08
Prov. Riau	1.691.586,46	1.719.300,00	1,64	1.858.286,29	8,08	3.577.586,29	92,52	34,08
Prov. Jambi	150.070,55	157.735,04	5,11	264.263,66	67,54	421.998,70	59,69	44,11
Prov. Sumatera Selatan	544.111,76	562.201,84	3,32	770.700,60	37,09	1.332.902,44	72,95	37,79
Prov. Bengkulu	23.490,75	19.773,60	-15,82	39.798,24	101,27	59.571,84	49,68	45,04
Prov. Lampung	210.528,04	148.914,17	-29,27	177.128,80	18,95	326.042,97	84,07	24,58
Prov. DKI Jakarta	4.996.984,12	5.612.000,00	12,31	7.025.026,00	25,18	8.702.813,39	23,88	20,46
Prov. Jawa Barat	649.460,70	540.786,71	-16,73	822.658,28	52,12	1.363.444,99	65,74	33,71
Prov. Jawa Tengah	257.176,66	258.450,00	0,50	328.964,03	27,28	450.692,15	37,00	21,59
Prov. DI Yogyakarta	38.545,97	46.495,28	20,62	43.543,83	-6,35	90.039,11	106,78	40,35
Prov. Jawa Timur	455.231,66	349.000,00	-23,34	664.741,13	90,47	775.290,38	16,63	27,92
Prov. Kalimantan Barat	66.111,29	57.810,10	-12,56	100.717,64	74,22	106.026,97	5,27	22,31
Prov. Kalimantan Tengah	85.038,98	79.500,00	-6,51	155.284,03	95,33	234.784,03	51,20	46,67
Prov. Kalimantan Selatan	149.688,73	115.904,87	-22,57	54.739,37	-52,77	288.399,05	426,86	117,17
Prov. Kalimantan Timur	2.526.721,83	1.309.684,00	-48,17	1.846.281,00	40,97	3.923.951,43	112,53	35,11
Prov. Sulawesi Utara	27.606,57	30.978,35	12,21	49.402,22	59,47	52.571,36	6,41	26,03
Prov. Sulawesi Tengah	37.705,56	23.978,55	-36,41	59.963,47	150,07	67.476,01	12,53	42,06
Prov. Sulawesi Selatan	143.947,73	113.213,93	-21,35	210.518,11	85,95	323.732,04	53,78	39,46
Prov. Sulawesi Tenggara	29.772,45	41.241,98	38,52	62.822,38	52,33	104.064,36	65,65	52,17
Prov. Bali	61.440,43	77.603,54	26,31	68.541,00	-11,68	115.383,05	68,34	27,66
Prov. NTB	76.069,11	78.000,00	2,54	86.795,26	11,28	164.795,26	89,87	34,56
Prov. NTT	44.477,57	34.203,60	-23,10	54.739,37	60,04	53.820,33	-1,68	11,75
Prov. Maluku	42.470,30	39.394,45	-7,24	59.128,98	50,09	59.245,53	0,20	14,35
Prov. Papua	146.466,64	222.409,05	51,85	417.686,65	87,80	640.095,70	53,25	64,30
Prov. Maluku Utara	53.012,24	55.990,35	5,62	91.574,94	63,55	83.244,06	-9,10	20,03
Prov. Banten	324.469,10	297.696,61	-8,25	277.207,09	-6,88	574.903,70	107,39	30,75
Prov. Bangka Belitung	59.641,93	20.507,51	-65,62	86.968,95	324,08	135.066,33	55,30	104,59
Prov. Gorontalo	13.073,67	4.100,00	-68,64	17.506,31	326,98	21.606,31	23,42	93,92
Prov. Riau Kepulauan	199.989,62	222.075,00	11,04	328.964,03	48,13	655.605,79	99,29	52,82
Prov. Irian JayaBarat	114.059,18	166.505,42	45,98	189.697,46	13,93	228.288,88	20,34	26,75
Prov. Sulawesi Barat	13.650,00	11.595,00	-15,05	39.798,24	243,24	20.552,27	-48,36	59,94
TOTAL	15.391.639,69	13.973.765,94	-9,21	18.329.266,34	31,17	27.566.463,17	50,40	24,12

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

Berdasarkan pada Tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi nilai DBH dari tahun ke tahun sejak tahun 2005 hingga tahun 2008. Pada tahun 2005 tercatat DBH yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi sebesar 15,32 triyun rupiah. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta merupakan daerah yang menerima DBH paling besar di antara semua provinsi, selanjutnya Gorontalo merupakan penerima terkecil DBH ini.

Tahun 2006, DBH yang terkumpul sebanyak 13,97 trilyun rupiah. Angka ini menurun tipis sebesar 9,21 persen dari tahun sebelumnya. Papua menjadi provinsi dengan tingkat pertumbuhan DBH tertinggi pada tahun ini. Peningkatannya sebesar 51,85 persen dalam satu tahun, sedangkan Gorontalo menjadi daerah dengan tingkat pertumbuhan yang paling kecil yaitu -68,64 persen. Pertumbuhan DBH pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 31,17 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya peningkatan sejumlah daerah dari penerimaan DBH. Beberapa daerah meningkat di atas 100 persen, antara lain DI Yogyakarta (106,78 persen), Kalimantan Selatan (426, 86 persen), Kalimantan Timur (112, 53 persen), dan Banten (107,39 persen). Kondisi tahun 2008 sangat berbeda dengan tahun 2007. Pada tahun ini terjadi peningkatan alokasi DBH yang sangat tinggi mencapai angka 50,40 persen.

4.1.2.7 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Diterapkannya otonomi daerah maka daerah berarti mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berwenang membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah (belanja daerah) bahkan diharapkan tiap tahunnya akan selalu meningkat. Tiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud asas desentralisasi. Hal ini seperti yang tertuang di penjelasan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri (Yunarko, 2007).

Berikut disajikan perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) tiap-tiap provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2005-2008. Selain itu juga disajikan pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun sejak 2005 sampai dengan 2008.

Tabel 4.12
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi di Indonesia
(dalam Juta Rupiah)

Daerah	2005	2006	(%)	2007	(%)	2008	(%)	% Rata-rata
Prov. NAD	262.119,99	192.613,72	-26,52	587.510,09	205,02	721.708,10	22,84	67,11
Prov. Sumatera Utara	1.361.818,03	1.368.220,73	0,47	1.693.846,30	23,80	2.181.311,59	28,78	17,68
Prov. Sumatera Barat	448.279,02	462.562,93	3,19	571.526,26	23,56	790.087,77	38,24	21,66
Prov. Riau	769.561,70	877.529,66	14,03	1.257.064,42	43,25	1.521.892,85	21,07	26,12
Prov. Jambi	344.880,74	336.590,28	-2,40	451.050,87	34,01	626.524,99	38,90	23,50
Prov. Sumatera Selatan	590.860,84	619.278,61	4,81	847.953,87	36,93	1.142.995,89	34,79	25,51
Prov. Bengkulu	122.165,60	115.588,29	-5,38	319.766,38	176,64	289.078,26	-9,60	53,89
Prov. Lampung	549.673,31	512.215,69	-6,81	674.693,66	31,72	891.531,46	32,14	19,01
Prov. DKI Jakarta	7.597.867,92	8.600.927,95	13,20	8.733.022,67	1,54	10.455.565,53	19,72	11,49
Prov. Jawa Barat	3.604.767,57	3.399.855,35	-5,68	4.221.668,70	24,17	5.275.051,50	24,95	14,48
Prov. Jawa Tengah	2.490.643,74	2.549.717,42	2,37	2.932.795,57	15,02	3.698.843,48	26,12	14,51
Prov. DI Yogyakarta	401.912,34	433.757,02	7,92	488.685,75	12,66	632.883,06	29,51	16,70
Prov. Jawa Timur	3.464.580,02	3.497.649,31	0,95	4.164.250,66	19,06	5.212.319,32	25,17	15,06
Prov. Kalimantan Barat	295.462,27	337.121,73	14,10	436.737,89	29,55	586.814,66	34,36	26,00
Prov. Kalimantan Tengah	154.092,83	172.590,00	12,00	273.180,27	58,28	380.665,56	39,35	36,54
Prov. Kalimantan Selatan	530.110,53	582.100,83	9,81	700.985,44	20,42	1.052.276,69	50,11	26,78
Prov. Kalimantan Timur	897.515,82	813.167,00	-9,40	1.410.769,28	73,49	2.070.292,60	46,75	36,95
Prov. Sulawesi Utara	198.270,26	208.779,33	5,30	252.324,24	20,86	322.442,17	27,79	17,98
Prov. Sulawesi Tengah	141.349,36	145.166,38	2,70	194.190,57	33,77	268.167,99	38,10	24,86
Prov. Sulawesi Selatan	675.857,27	694.281,76	2,73	993.176,44	43,05	1.238.690,40	24,72	23,50
Prov. Sulawesi Tenggara	101.069,22	136.664,70	35,22	140.365,47	2,71	301.739,71	114,97	50,96
Prov. Bali	742.886,07	720.232,45	-3,05	834.475,06	15,86	1.055.500,06	26,49	13,10
Prov. NTB	196.166,68	249.352,52	27,11	328.632,65	31,79	413.161,19	25,72	28,21
Prov. NTT	140.629,07	151.158,64	7,49	198.307,23	31,19	237.286,16	19,66	19,44
Prov. Maluku	77.357,82	96.006,53	24,11	104.147,49	8,48	120.041,35	15,26	15,95
Prov. Papua	198.626,71	158.074,08	-20,42	345.419,70	118,52	357.741,75	3,57	33,89
Prov. Maluku Utara	26.933,24	32.002,45	18,82	57.107,81	78,45	75.338,21	31,92	43,06
Prov. Banten	1.070.237,77	1.240.953,34	15,95	1.298.365,30	4,63	1.661.168,63	27,94	16,17
Prov. Bangka Belitung	188.304,37	175.330,29	-6,89	203.541,90	16,09	294.762,82	44,82	18,01
Prov. Gorontalo	46.112,99	46.739,89	1,36	70.078,99	49,93	94.942,31	35,48	28,92
Prov. Riau Kepulauan	162.271,79	235.536,00	45,15	325.833,68	38,34	406.282,78	24,69	36,06
Prov. Irian JayaBarat	12.806,78	12.143,88	-5,18	32.795,54	170,06	76.490,05	133,23	99,37
Prov. Sulawesi Barat	20.549,84	30.108,30	46,51	32.795,54	8,93	61.855,62	88,61	48,02
TOTAL	27.885.741,48	29.204.017,07	4,73	35.177.065,70	20,45	44.515.454,53	26,55	17,24

Sumber: Data sekunder, diolah, 2010

Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2005-2006 terdapat pada provinsi Sulawesi Barat yaitu 45,15 persen, sedangkan laju pertumbuhan paling kecil adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu -26,52 persen. Secara total, pertumbuhan PAD pada periode 2005-2006 sebesar 4,73 persen. Pendapatan asli daerah mengalami penambahan dari 27,88 trilyun rupiah pada tahun 2005 menjadi 29,20 trilyun pada tahun 2006.

Pada tahun 2007 laju pertumbuhan PAD paling tinggi terdapat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu 205,02 persen, sedangkan laju pertumbuhan pa;ing rendah terdapat di provinsi DKI Jakarta yaitu 1,54 persen. Secara total, pertumbuhan PAD di periode ini adalah sebesar 20,45 persen. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya. Hal ini berarti bahwa total PAD seluruh provinsi meningkat dari 29,20 trilyun menjadi 35,18 trilyun rupiah.

Periode berikutnya adalah periode 2007-2008. Pada periode ini nilai PAD seluruh provinsi kembali mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 20,45 persen. Nilai tersebut berarti bahwa PAD nominal seluruh provinsi di Indonesia meningkat menjadi 44,52 trilyun rupiah. Provinsi dengan pertumbuhan PAD paling tinggi adalah provinsi Irian Jaya Barat yaitu 133,23 persen sedangkan yang paling rendah adalah provinsi Bengkulu yaitu -9,60 persen.

Secara keseluruhan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, total PAD seluruh provinsi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dengan kata lain, pertumbuhan PAD menunjukkan tren yang terus menaik. Irian Jaya Barat mengalami pertumbuhan paling besar selama periode tersebut dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar 99,37 persen. Lain halnya dengan provinsi DKI Jakarta yang mengalami pertumbuhan rata-rata paling rendah yaitu 11,44 persen. Adapun rata-rata pertumbuhan total PAD provinsi adalah sebesar 17,24 persen.

4.2 Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

4.2.1 Analisis Data

4.2.1.1 Identifikasi Persamaan Simultan

Untuk mengetahui apakah persamaan simultan yang dibentuk mampu diidentifikasi atau tidak perlu diidentifikasi terlebih dahulu sistem persamaan simultan yang dibangun dengan menggunakan metode *rank order* dengan formula

$$K - k \geq m - 1$$

M = Jumlah variabel endogen dalam seluruh sistem persamaan simultan

m = Jumlah variabel endogen dalam satu persamaan simultan

K = Jumlah variabel eksogen (predetermined) dalam seluruh sistem persamaan simultan, termasuk intersep

k = Jumlah variabel eksogen (predetermined) dalam satu persamaan tertentu

maka hasil identifikasi terangkum dalam tabel berikut ini :

Persamaan struktural	K	k	M	$K - k \geq m - 1$	Keterangan
Persamaan 1	4	3	2	$1 = 1$	Exactly identified
Persamaan 2	4	3	2	$1 = 1$	Exactly identified

Hasil identifikasi *rank order* memberikan hasil bahwa kedua persamaan struktural bersifat *exactly identified*. Maka regresi persamaan simultan dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *Indirect Least Square* (ILS) maupun *Two-Stage Least Square* (TSLS). Dalam penelitian ini dipilih metode TSLS dalam melakukan analisis persamaan simultan.

Sesuai dengan namanya estimasi dengan metode TSLS dilakukan dengan dua tahap regresi OLS. Pertama, dengan meregresikan variabel endogen terhadap variabel eksogen yang terdapat dalam persamaan *reduced form*. Melalui estimasi ini, akan diperoleh *fitted value* yang akan digunakan dalam persamaan struktural. Hasil regresi persamaan *reduced-form* terdapat pada lampiran 3 dan lampiran 4.

Kedua, meregresi persamaan struktural dengan menggunakan data *fitted value* sehingga diperoleh estimator yang tidak bias dan konsisten. Hasil regresi persamaan struktural dengan menggunakan data *fitted value* terdapat pada lampiran 5 (persamaan struktural 1) dan lampiran 7 (persamaan struktural 2).

4.2.1.2 Uji Persamaan Struktural 1

4.2.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Hasil regresi persamaan struktural 1 menunjukkan tidak terdapatnya masalah dalam pengujian asumsi klasik. Uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Park menghasilkan nilai t-statistik dimana sebagian besar variabel independen tidak signifikan secara statistik (Lampiran 6). Taraf signifikan yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$, sehingga model bebas dari heterokedastisitas.

Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson, dimana nilai Durbin Watson regresi adalah 1,921. Nilai D-W hitung berada di wilayah tidak ada autokorelasi sehingga model bebas dari autokorelasi.

Autokorelasi positif	Ragu-ragu	Tidak ada Autokorelasi	Ragu-ragu	Autokorelasi negatif
0	d_L	d_U	$4-d_U$	$4-d_L$
	1,59	1,76	2,24	2,41
		1,92 (bebas)		

Hasil uji multikolinearitas ini dapat dinyatakan secara keseluruhan tidak terdapat multikolinearitas sempurna di dalam model, sehingga model bebas dari penyimpangan asumsi klasik uji multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas Persamaan Struktural 1

	GE	DAU_T1	DBH_T1	PAD_F	D2	D3
GE	1.000000	0.349912	0.900659	0.940884	-0.010257	0.053838
DAU_T1	0.349912	1.000000	0.053197	0.479735	0.124583	0.323533
DBH_T1	0.900659	0.053197	1.000000	0.888577	-0.037958	0.047950
PAD_F	0.940884	0.479735	0.888577	1.000000	0.010612	0.176917
D2	-0.010257	0.124583	-0.037958	0.010612	1.000000	-0.500000
D3	0.053838	0.323533	0.047950	0.176917	-0.500000	1.000000

4.2.1.2.2 Uji Goodnes of Fit

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 1, diketahui bahwa nilai R^2 adalah 0,9204, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 92,04% sedangkan sisanya yaitu sebesar 7,96 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2.1.2.3 Uji Statistik

Uji Keseluruhan (F-Stat)

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 1, diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 215,17 dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Sehingga variabel-variabel independen yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dalam taraf kepercayaan 95%.

Uji Parsial (t-Stat)

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 1, diketahui bahwa:

1. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel DAU adalah sebesar 0,0222 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis H_0 diterima. Artinya variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap belanja daerah.
2. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel DBH adalah sebesar 0,0009 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis H_0 diterima. Artinya variabel DBH berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap belanja daerah.
3. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel PAD adalah sebesar 0,0806 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis H_0 ditolak. Artinya variabel PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.
4. Variabel *dummy* merupakan variabel dari model efek tetap. Semua variabel *dummy* yaitu D_2 dan D_3 memiliki probabilitas t-hitung lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga semua variabel *dummy* signifikan. Hal ini menandakan

bahwa terjadi perubahan pola belanja daerah di tingkat provinsi pada tahun 2007 dan 2008, bila dibandingkan dengan *benchmark* (tahun 2006).

Tabel 4.13
Ringkasan Hasil Regresi Persamaan Struktural 1
(Dependen Variabel = BD)

Independen Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.	Keterangan
DAU_T1	3,156084	1,356658	2,326367	0,0222	Signifikan
DBH_T1	1,625063	0,473051	3,435281	0,0009	Signifikan
PAD_F	0,639647	0,362125	1,766368	0,0806	Tidak Signifikan
D2	-600279,5	231371,2	-2,594443	0,0110	Signifikan
D3	-966800,3	242038,8	-3,994402	0,0001	Signifikan
C	-36231,95	387723,8	-0,093448	0,9257	Tidak Signifikan

Signifikansi pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Output Eviews 5.1 (Lampiran 5)

4.2.1.3 Uji Persamaan Struktural 2

4.2.1.3.1 Uji Asumsi Klasik

Hasil regresi persamaan struktural 2 menunjukkan tidak terdapatnya masalah dalam pengujian asumsi klasik. Uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Park menghasilkan nilai t-statistik dengan sebagian besar variabel independen tidak signifikan secara statistik (Lampiran 8). Taraf signifikan yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$, sehingga model bebas dari heterokedastisitas.

Uji autokolerasi menggunakan uji Durbin Watson, dimana nilai Durbin Watson regresi adalah 1,83. Nilai D-W hitung berada di wilayah tidak ada autokorelasi sehingga model bebas dari autokorelasi.

Autokorelasi positif	Ragu-ragu	Tidak ada Autokorelasi	Ragu-ragu	Autokorelasi negatif	
0	d_L	d_U	$4-d_U$	$4-d_L$	4
	1,59	1,76	2,24	2,41	
		↓			
		1,83 (bebas)			

Hasil uji multikolinearitas ini dapat dinyatakan secara keseluruhan tidak terdapat multikolinearitas sempurna di dalam model, sehingga model bebas dari penyimpangan asumsi klasik uji multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas Persamaan Struktural 2

	PAD	DAU_T1	DP_T1	BD_F	D2	D3
PAD	1.000000	0.426418	0.243727	0.878525	-0.013221	0.096836
DAU_T1	0.426418	1.000000	0.264940	0.365493	0.124583	0.323533
DP_T1	0.243727	0.264940	1.000000	0.162156	-0.034422	0.054538
BD_F	0.878525	0.365493	0.162156	1.000000	-0.003730	0.144595
D2	-0.013221	0.124583	-0.034422	-0.003730	1.000000	-0.500000
D3	0.096836	0.323533	0.054538	0.144595	-0.500000	1.000000

4.2.1.3.2 Uji Goodnes of Fit

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 2, diketahui bahwa nilai R^2 adalah 0,7999, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 79,99%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 20,01 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2.1.3.3 Uji Statistik

Uji Keseluruhan (F-Stat)

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 2, diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 74,35 dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05

($\alpha = 5\%$). Sehingga variabel-variabel independen yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dalam taraf kepercayaan 95%.

Uji Parsial (t-Stat)

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 2, diketahui bahwa:

1. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel BD adalah sebesar 0,0000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis H_0 diterima. Artinya variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PAD.
2. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel DAU adalah sebesar 0,0082 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis H_0 diterima. Artinya variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PAD.
3. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel DP adalah sebesar 0,1406 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis H_0 ditolak. Artinya variabel BD tidak berpengaruh secara statistik terhadap PAD.
4. Variabel *dummy* merupakan variabel dari model efek tetap. *Dummy* 2 (tahun 2007) tidak signifikan, hal ini berarti bahwa tidak terjadi perubahan pola penerimaan daerah dari PAD pada tahun ini dibandingkan dengan benchmark. *Dummy* 3 (tahun 2008) signifikan, hal ini berarti bahwa terjadi perubahan pola penerimaan daerah dari PAD pada tahun ini dibandingkan dengan *benchmark*.

Tabel 4.14
Ringkasan Hasil Regresi Persamaan Struktural 2
(Dependen Variabel = PAD)

Independen Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.	Keterangan
DAU_T1	1,376925	0,510004	2,699833	0,0082	Signifikan
DP_T1	43229,03	29087,17	1,486189	0,1406	Tidak signifikan
BD_F	0,527509	0,031895	16,53904	0,0000	Signifikan
D2	-335854,1	221975,6	-1,513023	0,1337	Tidak signifikan
D3	-464039,0	232171,7	-1,998689	0,0486	Signifikan
C	-465562,5	197164,8	-2,361286	0,0203	Signifikan

Signifikansi pada $\alpha = 5\%$,

Sumber : Output Eviews 5.1 (Lampiran 5)

4.2.2 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.2.2.1 Persamaan Struktural 1

Persamaan struktural pertama ditujukan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda di atas, maka persamaan struktural 1 dapat dituliskan sebagai berikut :

$$BD_t = -36231,95 + 3,16DAU_{t-1} + 1,63DBH_{t-1} + 0,64PAD_{t-1} + e_1$$

Untuk lebih mendalam maka pembahasan akan dibagi berdasarkan koefisien variabel tiap-tiap variabel penjelas:

1. Konstanta

Konstanta dari hasil regresi dalam persamaan struktural 1 ini berarti bahwa jika semua variabel independen tidak mengalami perubahan (konstan),

maka untuk membiayai belanja daerahnya, daerah akan melakukan utang sebesar 36,23 milyar rupiah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan hasil analisis, jika DAU mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah, maka nilai belanja daerah akan bertambah sebesar 3,16 juta rupiah. Hasil regresi juga menunjukkan hubungan DAU terhadap belanja daerah dalam hubungan yang positif. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika DAU meningkat, maka belanja daerah juga meningkat. Hubungan ini sesuai dengan tujuan pemberian DAU yaitu untuk meningkatkan belanja daerah. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menemukan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan dana alokasi umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain bagi hasil. Transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum adalah merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada tiap daerah sebagai konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu hasil ini juga mendukung temuan Maimunah (2005) yang membuktikan pengaruh DAU terhadap belanja daerah dimana besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Besarnya pengaruh DAU terhadap belanja daerah disebabkan oleh besarnya jumlah DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, sehingga rasio DAU terhadap belanja daerah juga tinggi. Sifat DAU yang

berupa *grant* dari pemerintah pusat menjadikan daerah seolah-olah menggantungkan belanja daerahnya dari alokasi dana ini.

Besarnya efek multiplikier DAA terhadap belanja daerah, bila dipandang dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan kondisi yang memprihatinkan. Karena, secara tidak langsung hubungan ini membuktikan betapa daerah memiliki ketergantungan keuangan yang sangat besar kepada pemerintah pusat. Berdasarkan pada pola hubungan dalam model, besarnya nominal DAA sangat menentukan besarnya belanja daerah pada tahun berikutnya. Diperlihatkan oleh besarnya koefisien DAA terhadap belanja daerah yang mampu meningkatkan hingga 3,16 juta setiap kenaikan 1 juta DAA.

Rendahnya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya ditambah dengan kualitas SDM yang belum memadai diperkirakan menjadi penyebab tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Hasil regresi menunjukkan bahwa DBH berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Selain itu, hasil regresi juga memperlihatkan hubungan positif antara DBH dengan belanja daerah. Peningkatan DBH sebesar 1 juta rupiah akan menambah belanja daerah sebesar 1,63 juta rupiah. Dana bagi hasil dan dana alokasi umum merupakan komponen dana

perimbangan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, nilai *multiplier* DAU lebih besar dampaknya dibandingkan dengan DBH. Hal ini disebabkan karena DAU merupakan dana yang bersifat *grant* dari pemerintah daerah, sedangkan DBH merupakan dana yang diperoleh melalui perhitungan kontribusi daerah kepada pemerintah pusat baik melalui pajak maupun hasil SDA.

Hubungan positif antara DBH dengan belanja daerah disebabkan karena DBH merupakan sumber penerimaan daerah. Berdasarkan pada sifat DBH yang merupakan sumber penerimaan daerah, maka dengan peningkatan jumlah DBH oleh pemerintah daerah akan menambah jumlah dana yang dianggarkan untuk dibelanjakan. Pola hubungan DBH dengan belanja daerah dipengaruhi oleh *lag* waktu, sehingga penggunaan DBH untuk belanja daerah dilakukan pada tahun berikut dari periode pengumpulan DBH.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil regresi menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini sesuai dengan temuan Mutmainnah (2006) yang melakukan penelitian dengan judul “Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera”. Berdasarkan pada penelitian tersebut, tidak signifikkannya PAD mempengaruhi belanja daerah mengindikasikan terjadinya *flypaper effect*, yaitu suatu kondisi dimana

pemerintah daerah merespon berbeda (lebih boros) dalam menentukan belanja daerah dengan mendasarkan pada transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya.

Tidak signifikannya PAD dalam mempengaruhi belanja daerah disebabkan karena rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah dibandingkan dengan DAU dan DBH. Tingginya proporsi dana perimbangan sebagai sumber penerimaan daerah yang mencapai 80 persen dari total penerimaan (Simanjuntak dalam Handayani, 2009) mengakibatkan PAD hanya berkontribusi sangat kecil.

Rendahnya penerimaan daerah dari PAD disebabkan oleh rendahnya upaya penggalan potensi daerah yang dicerminkan oleh fluktuatifnya *tax effort* di daerah. Padahal *tax effort* mencerminkan usaha pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatannya (Susanti, dalam Handayani 2009). Regresi persamaan struktural 2, memperlihatkan bahwa daya pajak tidak mempengaruhi pengumpulan PAD. Sehingga, pengumpulan PAD akan semakin menurun yang pada akhirnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah juga semakin mengecil.

4.2.2.2 Persamaan Struktural 2

Persamaan struktural kedua ditujukan untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum, daya pajak, dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda di atas, maka persamaan struktural 2 dapat dituliskan sebagai berikut :

$$PAD_t = -465562,5 + 1,38DAU_{t-1} + 0,53BD_{t-1} + 43229,03DP_{t-1} + \mu_{t2}$$

Untuk lebih mendalam maka pembahasan akan dibagi berdasarkan koefisien variabel tiap-tiap variabel penjelas:

1. Konstanta

Konstanta dari hasil regresi dalam persamaan struktural 2 ini dibaca jika ketiga variabel independen tidak mengalami perubahan (konstan) maka memungkinkan terjadinya penurunan PAD sebesar 465,56 milyar rupiah.

2. Belanja daerah

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural kedua, dijelaskan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa belanja daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,53 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD.

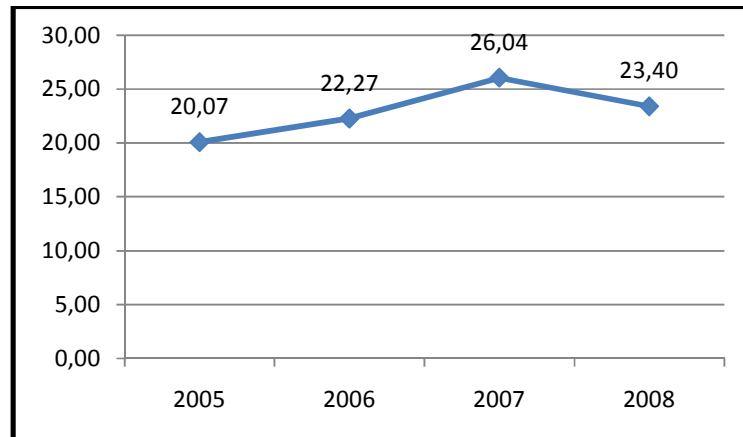
Belanja daerah dikatakan sebagai investasi, karena dari kegiatan pengeluaran pemerintah daerah tersebut dapat dihasilkan pajak dan retribusi daerah yang berkontribusi pada PAD di tahun berikutnya. Dimana kedua komponen merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Sehingga jika belanja daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

Belanja daerah dapat diartikan sebagai proses produksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Produk yang dihasilkan berupa sarana dan prasarana publik yang tidak disediakan oleh pihak swasta, antara lain jalan raya, pasar, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Saran dan prasarana publik inilah yang kemudian menjadi basis pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya. Pembuatan produk berupa infrastruktur ini tercatat dalam komponen belanja barang dan belanja modal pemerintah daerah.

Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja daerah memperlihatkan tren yang cenderung menaik. Selain itu, rasio belanja modal juga cukup besar yaitu sekitar 20-25 persen.

Gambar 4. 1
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja



Sumber : BPS, diolah, 2010

Meningkatnya belanja modal pemerintah daerah mengindikasikan besarnya pembangunan maupun perbaikan infrastruktur yang menjadi basis pajak dan retribusi. Sehingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi PAD, perlu diingat bahwa hubungan belanja daerah dan PAD memerlukan *lag* dalam sifat hubungannya.

3. Dana Alokasi Umum

Hasil regresi persamaan struktural kedua memperlihatkan hubungan antara DAU dengan PAD dalam hubungan yang signifikan secara statistik. Berdasarkan pada hasil regresi, peningkatan 1 juta DAU_{t-1} akan menambah PAD_t sebesar 1,38 juta rupiah.

Berdasarkan hasil penelitian, DAU dan PAD berada dalam hubungan yang searah (positif). Kondisi ini bertentangan dengan teori, dimana seharusnya PAD dan DAU memiliki hubungan yang tidak searah (negatif).

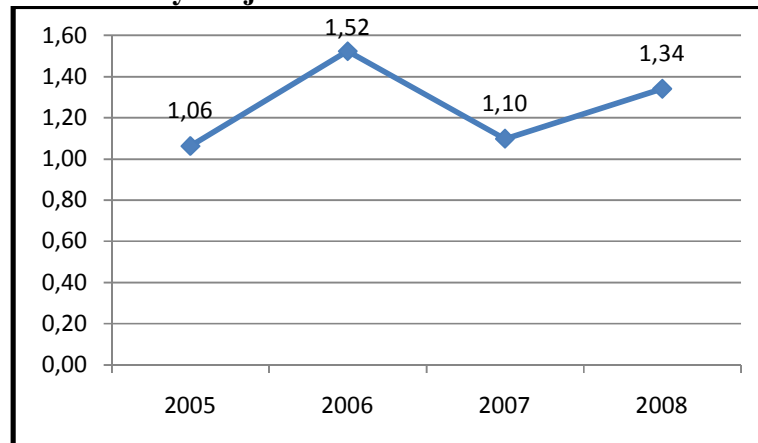
Hal ini disebabkan karena pada tahun pengamatan, masih dibutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap prinsip otonomi oleh daerah. Sehingga, baik PAD maupun DAU masih sama-sama dibutuhkan oleh daerah.

Kondisi ini tidak mengancam pelaksanaan otonomi daerah karena koefisien DAU terhadap PAD lebih besar dari 1. Positifnya hubungan kedua variabel lebih disebabkan oleh kondisi keuangan daerah yang masih rentan terhadap gejolak.

4. Daya Pajak

Berdasarkan pada hasil analisis regresi persamaan struktural kedua, diperoleh hasil bahwa daya pajak tidak berpengaruh terhadap PAD. Tidak signifikannya daya pajak dalam mempengaruhi PAD disebabkan karena munculnya indikasi 'kemalasan' pemerintah daerah dalam melakukan eksplorasi sumber-sumber keuangan di daerahnya. Hal ini diperlihatkan oleh nilai daya pajak yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun.

Gambar 4.2
Daya Pajak Provinsi Tahun 2005-2008



Sumber : BPS, diolah, 2010

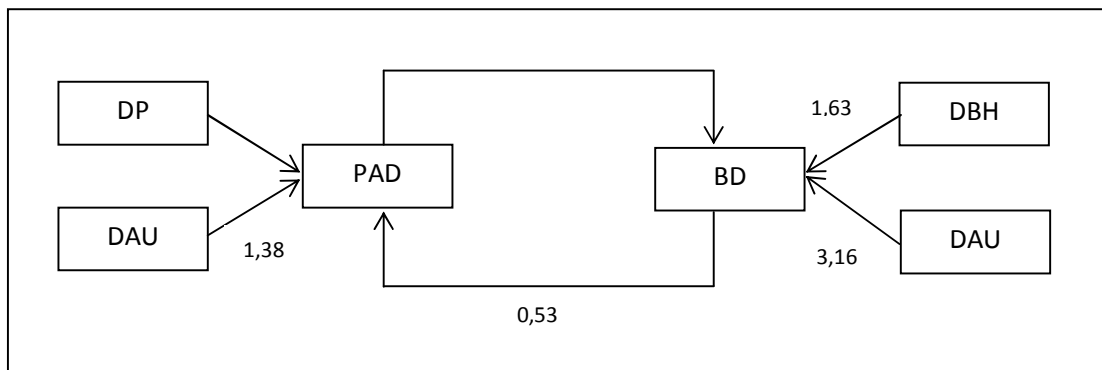
Munculnya ‘kemalasan’ daerah dalam menggali potensi dan sumber keuangan daerahnya, disebabkan oleh berubahnya fungsi dana perimbangan pusat ke daerah dari fungsi insentif menjadi fungsi pendapatan yang mengakibatkan ketergantungan pada dana perimbangan tersebut. Secara alamiah, memperoleh sesuatu yang gratis (*free*) lebih menarik dibandingkan dengan sesuatu yang harus dicapai dengan kerja keras.

Apalagi mengingat jumlah dana perimbangan yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan dengan PAD yang terkumpul dalam periode yang sama. Hal inilah yang menjadikan daerah menjadi ‘malas’ dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang potensial untuk dijadikan basis penerimaan.

4.3.2.3 Hubungan Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada hasil regresi persamaan struktural pertama dan kedua, maka dapat disusun hubungan tiap-tiap variabel di dalam suatu bagan seperti berikut ini :

Gambar 4.3
Skema Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



Gambar 4.3 memperlihatkan jalur atau pola hubungan dari masing-masing variabel yang terdapat di dalam persamaan struktural. Variabel BD (belanja daerah) dipengaruhi oleh 3 variabel, dimana DBH dan DAU berpengaruh positif dalam meningkatkan belanja daerah tersebut sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan. Dana alokasi umum mampu meningkatkan sebesar 3,16 juta rupiah, dan dana bagi hasil meningkatkan pengeluaran sebesar 1,63 juta rupiah. Dari kedua variabel tersebut, variabel DAU memberikan nilai paling besar dalam meningkatkan belanja daerah.

Variabel pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh 3 variabel, 2 diantaranya berpengaruh signifikan yaitu belanja daerah dan DAU, sedangkan daya pajak tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Belanja daerah meningkatkan PAD

sebesar 0,53 juta rupiah sedangkan DAU meningkatkan PAD sebesar 1,38 juta rupiah. Dari kedua variabel tersebut, pajak daerah merupakan upaya yang paling efektif dalam meningkatkan PAD karena nilai koefisiennya yang paling tinggi.

Berdasarkan pada hasil analisis persamaan simultan, ternyata variabel PAD tidak mempengaruhi belanja daerah dalam periode yang berbeda. Selain itu, daya pajak juga tidak berpengaruh terhadap usaha pengumpulan PAD daerah provinsi di Indonesia.

4.3 Deteksi Ilusi Fiskal

4.3.1 Analisis Data Regresi

Penelitian ini mengadopsi persamaan yang digunakan oleh Priyo Hari Adi (2009) dengan penambahan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) serta menghilangkan variabel rasio PDRB terhadap belanja daerah, rasio penerimaan daerah terhadap belanja daerah, pajak tidak langsung, dan jumlah penduduk. Pengurangan variabel dilakukan karena keterbatasan data yang tersedia dalam lingkup daerah provinsi.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi OLS, dan jenis data yang diolah berbentuk data panel. Data *time series* yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2006 sampai tahun 2008, sedangkan data *cross section* meliputi provinsi-provinsi di Indonesia. Analisis regresi linear berganda digunakan sebagai alat analisis, tujuannya untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DBH terhadap belanja daerah provinsi se-Indonesia, digunakan

alat analisis regresi berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Karena sifat penaksir OLS yang BLUE (*best linear unbiased estimator*), dimana kelas penaksir tidak bias mempunyai varians yang minimum (Gujarati, 1999). Model yang digunakan adalah :

$$\ln BD_t = \ln PDRB_{t-1} + \ln TAX_{t-1} + \ln HCT_{t-1} + \ln DAU_{t-1} + \ln DBH_{t-1} + \mu \dots \dots \dots (3.5)$$

Hasil analisis data dalam penelitian ini berdasarkan penggunaan model di atas dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4.15
Hasil Regresi Utama Deteksi Ilusi Fiskal

Independen Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	4,683182	0,809771	5,783338	0.0000
Ln(PDRB)	-0,069652	0,034386	-2,025598	0,0458
Ln(TAX)	0,197354	0,041018	4,811351	0,0000
Ln(HCT)	0,015549	0,012684	1,225847	0,2235
Ln(DAU)	0,273853	0,061294	4,467891	0,0000
Ln(DBH)	0,398601	0,032501	1,226427	0,0000
R ²	0,871657	Dependen Variabel : Ln_BD		
F-Stat	120,8914			
Prob. F	0,000000			
Durbin-Watson	2,189294			
N	99			

Signifikansi pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Output Eviews 5.1 (Lampiran 9)

4.2.1.1 Uji Asumsi Klasik

Mempertimbangkan bahwa dalam model regresi yang ingin dicapai adalah *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dan adakalanya sering dijumpai dalam model regresi (terutama regresi linear berganda) berbagai masalah terutama

pelanggaran terhadap asumsi klasik, maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera yang dilakukan dengan menghitung nilai *skewness* dan kurtosis. Apabila J-B hitung < nilai χ^2 (*Chi-Square*) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal (Firmansyah, 2000). Probabilitas uji Jarque-Bera dapat langsung dilihat pada hasil regresi utama model yang dianalisis dengan software Eviews 5.1. Jika nilai probabilitas uji Jarque-Bera lebih besar dari α (5%) maka data tersebut terdistribusi secara normal, sebaliknya jika nilai probabilitas uji Jarque-Bera lebih kecil dari α (5%) maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Jarque-Bera Test Deteksi Ilusi Fiskal

Obs*R-Square pada Uji Normalitas (J-B hitung)	Prob.
11,57135	0,003071

Berdasarkan pada uji Jarque-Bera, diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,0000 dimana nilai ini lebih kecil dari α (5%). Nilai ini tidak memenuhi kaidah signifikansi untuk uji normalitas, dimana disyaratkan nilai probabilitas harus lebih besar dari α (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Akan tetapi, menurut Firmansyah (2008), asumsi ini sebenarnya tidak penting apabila tujuan peneliti hanya estimasi. Estimator OLS adalah BLUE tanpa

melihat apakah *ui* didistribusikan normal atau tidak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari estimasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga pengujian normalitas data tidak menjadi penting.

Uji Autokolerasi

Pengujian fenomena autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Uji ini sesungguhnya dilandasi oleh model error yang mempunyai korelasi sebagaimana yang ditunjukkan di bawah ini:

Penentuan Autokorelasi Dengan Uji Durbin-Watson

Autokorelasi positif	Ragu-ragu	Tidak ada autokorelasi	Ragu-ragu	Autokorelasi negatif
0	d_L	d_U	$4-d_U$	$4-d_L$
	1,59	1,76	2,24	2,41
			2,19 (bebas)	
				4

Diketahui bahwa :

Nilai Obs(n)	=	99	DW	=	2,19
k-1	=	4	$4 - d_L$	=	2,4103
d_L	=	1,5897	$4 - d_U$	=	2,2425
d_U	=	1,7575			

Berdasarkan pada pengujian Durbin-Watson diketahui bahwa persamaan tersebut bebas dari autokorelasi. Nilai DW hitung berada diantara d_U (1,7575) dan $4-d_U$ (2,2425) yaitu di wilayah bebas autokorelasi. Berdasarkan pada hasil uji DW tersebut dapat dikatakan bahwa estimasi dapat dilakukan karena model bebas dari autokolerasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua *disturbance error term* memiliki varian yang sama atau tidak (Gujarati, 2003). Uji Park dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model yang digunakan, hasil pengujian adalah sebagai berikut:

Uji Heteroskedastisitas

Variable	t-Statistic	Prob.
C	-2,922260	0,0139
PDRB	2,107954	0,0588
TAX	-1,266228	0,2316
HCT	-2,594405	0,0249
DAU	1,741931	0,1094
DBH	3,247033	0,0078

Berdasarkan pada uji Park, diperoleh nilai t-statistik lebih kecil dari $\alpha = (5\%)$ adalah variabel HCT dan DBH sedangkan variabel PDRB, TAX, dan DAU lebih besar dari $\alpha = (5\%)$. Suatu model dianggap bebas heteroskedastisitas jika nilai probabilitas t-statistik lebih besar dari α . Sehingga dapat dikatakan bahwa model ini terindikasi terkena gejala heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Salah satu cara untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas atau tidak di dalam model, dapat dilihat apakah *R-Squared* yang dihasilkan oleh estimasi tinggi, akan tetapi secara individu variabel independen banyak yang tidak signifikan (Gujarati, 2003).

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model adalah dengan melihat matriks koefisien korelasi. Jika terdapat variabel yang memiliki nilai korelasi mendekati 1, maka model teridentifikasi multikolinearitas sempurna, sedangkan jika tidak terjadi multikolinearitas sempurna, maka model bisa digunakan untuk estimasi:

Uji Multikolinearitas

	BD	PDRB	TAX	HCT	DAU	DBH
BD	1,000000	0,612651	0,894495	0,486453	0,349912	0,900659
PDRB	0,612651	1,000000	0,693670	0,324427	0,311630	0,558900
TAX	0,894495	0,693670	1,000000	0,436303	0,419267	0,770595
HCT	0,486453	0,324427	0,436303	1,000000	0,123648	0,366115
DAU	0,349912	0,311630	0,419267	0,123648	1,000000	0,053197
DBH	0,900659	0,558900	0,770595	0,366115	0,053197	1,000000

Hasil uji multikolinearitas ini dapat dinyatakan secara keseluruhan tidak terdapat penyimpangan asumsi klasik uji multikolinearitas.

4.2.1.2 Pengujian Statistik Analisis Regresi

4.2.1.2.1 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari uji F-statistik yakni dengan melihat probabilitas lebih besar dari 5 persen atau 0,05, maka variabel bebas (independen) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas (dependen). Tetapi jika probabilitas mempunyai nilai antara nol

sampai 0,05 (0-0,05), maka variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas (dependen). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uji Statistik F

F-statistik	120,8914
Prob (F-statistik)	0.000000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel independen secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen, karena nilai probabilitas (F-statistik) adalah 0,000000 ($<$) $\alpha = 5\%$ atau 0,05.

2. Pengujian Koefisien Regresi Secara individual (Uji t)

Pengujian koefisien regresi secara individual (uji t) dilihat dari signifikansi nilai t-hitung. Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Parameter suatu variabel dikatakan mempunyai pengaruh signifikan jika nilai t-hitung suatu variabel lebih besar dari nilai t-tabel. Pengujian persamaan pertama, digunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$). Hasil regresi yang memperlihatkan nilai t-hitung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Hasil Uji t (Variabel Independen = BD)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	-0,069652	0,034386	-2,025598	0,0458
TAX	0,197354	0,041018	4,811351	0,0000
HCT	0,015549	0,012684	1,225847	0,2235
DAU	0,273853	0,061294	4,467891	0,0000
DBH	0,398601	0,032501	1,226427	0,0000
C	4,683182	0,809771	5,783338	0.0000

Signifikansi pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Output Eviews 5.1 (Lampiran 9)

Berdasarkan pada tabel di atas, maka variabel yang signifikan pada taraf keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$) adalah PDRB, TAX, DAU dan DBH. Hal ini berarti bahwa variabel –variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu belanja daerah (BD).

3. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen secara statistik (Handayani, 2009).

Berdasarkan hasil regresi utama (Lampiran A), diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,8717. Hal ini berarti bahwa perubahan pada variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 87,17 persen, sedangkan 12,93 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

4.2.2 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi linear berganda di atas, maka dapat ditarik beberapa pernyataan yang diperlihatkan pada Tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16
Deteksi Ilusi Fiskal

Variabel	Coefficient	Prob.	Keterangan	Kesimpulan
PDRB	-0,069652	0,0458	Signifikan	Terjadi ilusi fiskal
TAX	0,197354	0,0000	Signifikan	Tidak terjadi ilusi fiskal
HCT	0,015549	0,2235	Tidak signifikan	Tidak terjadi ilusi fiskal
DAU	0,273853	0,0000	Signifikan	Tidak terjadi ilusi fiskal
DBH	0,398601	0,0000	Signifikan	Tidak terjadi ilusi fiskal
C	4,683182	0.0000	Varibel Dependen (BD)	

Signifikansi pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Output Eviews 5.1 (Lampiran 9)

Deteksi ilusi fiskal melalui pendekatan pendapatan (*revenue enhancement*) memiliki asumsi bahwa penambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya mempunyai hubungan positif dengan belanja (Priyo, 2009). Hal ini disebabkan karena belanja daerah belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, serta DBH memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan PDRB memiliki hubungan yang negatif dan signifikan secara statistik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadi ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah. Karena terdapat variabel pendapatan yang memiliki korelasi negatif dengan pengeluaran pemerintah, dengan nilai yang signifikan.

Hasil penelitian ini bsesuai dengan hasil penelitian Priyo (2009) tentang deteksi ilusi fiskal di Jawa Tengah pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Penelitian tersebut menemukan adanya fenomena ilusi fiskal pada kinerja keuangan daerah tingkat kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Holtz–Eakin et al. (1985, dalam Priyo, 2009) yang menunjukkan adanya keterikatan yang erat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi berupaya memaksimalkan belanja tetapi di sisi lain juga mengimbangi optimalisasi penerimaan PAD. Hal ini memberikan sinyal bahwa pemerintah provinsi produktif dalam mengalokasikan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.

Terdapatnya fenomena ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah daerah disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah transfer pemerintah pusat. Besarnya rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan rasio PAD terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa daerah sangat bergantung pada dana transfer tersebut. Tidak efisiennya penggunaan dana transfer dalam alokasinya terhadap belanja daerah untuk belanja infrastruktur menjadikan daerah tidak memiliki sumber penerimaan. Selain itu, menurut Kuncoro (2007) saat masyarakat (pemerintah daerah) menerima transfer maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah dan peningkatan konsumsi barang publik. Hal ini menunjukkan bahwa transfer meningkatkan konsumsi akan barang publik namun tidak menjadi substitut pajak daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dalam penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien DAU dan DBH dalam mempengaruhi belanja daerah yang sangat tinggi dibandingkan dengan PAD. Kondisi ini mengindikasikan belum berhasilnya otonomi daerah di tingkat provinsi.
2. Eksplorasi sumber daya ekonomi di tingkat daerah belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari fluktuatif dan tidak berpengaruhnya daya pajak (*tax effort*) terhadap PAD.
3. Akibat eksplorasi sumber penerimaan daerah yang kurang optimal, mengakibatkan kontribusi PAD terhadap belanja daerah sangat rendah. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.
4. Terdapat fenomena ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Munculnya ilusi fiskal menandakan bahwa pemerintah daerah provinsi belum mengalokasikan sumber pendapatannya (termasuk dana perimbangan) secara efisien.

5.2 Saran

Beberapa saran dan masukan yang dapat dihasilkan dari penelitian pada skripsi ini antara lain adalah:

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan keuangannya. Optimalisasi penerimaan daerah dari pajak melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah dapat dilakukan mengingat daya pajak yang masih rendah.
2. Meningkatkan anggaran belanja pada belanja modal dan belanja barang jasa. Melalui pengeluaran pemerintah di sektor publik ini, diharapkan daerah memperoleh kontaprestasi langsung berupa pendapatan pajak dan retribusi.
3. Mengalokasikan dana perimbangan yang diterima pada sektor-sektor pembangunan agar penggunaannya menjadi efisien dan menjadi pajak daerah.
4. Bagi pemerintah pusat, agar senantiasa melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan dana perimbangan yang diberikan kepada daerah. Hal ini dilakukan agar dana perimbangan tepat sasaran dan guna, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Atiah Handayani. 2009. "Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Indonesia. Berbagai edisi penerbitan, BPS Jawa Tengah.
- _____ Ringkasan APBD Provinsi. Berbagai edisi penerbitan, BPS Jawa Tengah.
- Bagir Manan,. 1994. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bernando Gatot Tri Bawono. 2008. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Dwirandra. 2008. "Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006." *Jurnal Ilmiah*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
- Emelia, 2006. "Mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendorong Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Firmansyah. 2006. *Modul Panel Data Regression Aplikasi dengan Eviews 4.0*. Semarang: LSKE
- Firmansyah. 2008. *Modul Praktek Ekonomika Dasar: Estimasi, Asumsi Klasik dan Variabel Dummy Aplikasi Eviews 4.0*. Semarang: LSKE

- Gideon Tri Budi Susilo dan Priyo Hari Adi. 2007. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)" *Paper disajikan pada Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama*. Surabaya.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometric*. The McGraw Hill Companies Inc. New York.
- Guritno Mangkoesoebroto,. 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/>
- Laras Wulan Ndadari dan Priyo Hari Adi. 2008. "Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat." *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- Kesit Bambang Prakosa. 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY." *JAAI*, Vol 08 No.2
- Miyasto, 2009. Bahan Kuliah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Muhammad Iqbal Lubekran. 2007. "Analisa Dampak Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Perkembangan Daerah di Indonesia Periode 2001-2004." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mutiara Maimunah. 2006. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Nagathan, dan KJ Sivagnanan. 1999. "Federal Transfer and Tax Effort of States in India." *Indian Economic Journal*.
- Priyo Hari Adi. 2006. "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa- Bali)." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.

Priyo Hari Adi. 2007. "Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi." *The 1st National Accounting Conference*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

_____. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6, No.1.

Purbayu Budi Santosa. 2005. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri." *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol.2, No.1, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

Sri Anggita Nur Prasetya. 2009. "Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Manufaktur di Indonesia Tahun 2000-2003: Pendekatan Model Persamaan Simultan." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang

Syukriy Abdullah & Abdul Halim. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi VI Yogyakarta*.

Wirawan Setiaji dan Priyo Hari Adi, 2007, "Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Lampiran 1 (Data Mentah)

Daerah	TAHUN	BD	BD_ft1	PDRB_t1	TAX_t1	DP_t1	HCT	DAU_t1	DBH_t1	PAD	PAD_ft1
Prov. NAD	2006	2.109.838,49	2918927.	15.184.000	177.472,43	0,0007	1.843,98	271.147,00	1.891.814,50	192.613,72	362530.0
Prov. Sumatera Utara	2006	2.268.990,57	1752499.	87.898.000	1.301.137,84	1,4012	10.431,01	313.745,00	204.646,30	1.368.220,73	1438648.
Prov. Sumatera Barat	2006	1.107.015,92	718585.0	29.159.000	375.966,96	0,6990	8.902,18	247.487,00	62.579,31	462.562,93	406109.0
Prov. Riau	2006	3.188.585,30	2759444.	79.288.000	655.884,68	2,2509	30.656,26	92.157,00	1.691.586,46	877.529,66	847578.0
Prov. Jambi	2006	1.156.842,79	747375.0	242.884.000	281.727,57	1,3716	19.402,58	243.618,00	150.070,55	336.590,28	310777.0
Prov. Sumatera Selatan	2006	1.580.361,45	1431166.	49.634.000	511.334,75	0,2981	5.066,57	242.707,00	544.111,76	619.278,61	598667.0
Prov. Bengkulu	2006	399.413,00	413755.0	6.239.000	93.346,38	1,1001	17.132,03	230.653,00	23.490,75	115.588,29	91464.90
Prov. Lampung	2006	1.518.761,08	1043095.	3.259.000	468.358,78	3,6038	66.873,86	285.761,83	210.528,04	512.215,69	525184.0
Prov. DKI Jakarta	2006	17.781.443,45	13000000	295.271.000	6.513.811,21	31,1915	443.760,37	773.023,90	4.996.984,12	8.600.927,95	7638746.
Prov. Jawa Barat	2006	4.923.245,32	4415556.	143.051.000	3.385.936,56	1,9611	24.179,21	570.660,00	649.460,70	3.399.855,35	3788804.
Prov. Jawa Tengah	2006	3.508.580,58	2763528.	256.375.000	1.996.141,37	14,4305	205.039,23	549.956,00	257.176,66	2.549.717,42	2229618.
Prov. DI Yogyakarta	2006	968.386,07	661003.0	16.911.000	360.119,66	0,8874	15.249,01	238.692,00	38.545,97	433.757,02	385567.0
Prov. Jawa Timur	2006	4.955.093,57	3741094.	23.538.000	3.089.131,89	15,7627	194.920,60	454.635,00	455.231,66	3.497.649,31	3433305.
Prov. Kalimantan Barat	2006	1.018.958,83	730332.0	23.293.000	253.716,78	1,5074	19.882,61	312.572,00	66.111,29	337.121,73	279826.0
Prov. Kalimantan Tengah	2006	788.090,00	612451.0	93.938.000	128.105,74	0,8364	10.280,00	287.575,61	85.038,98	172.590,00	141460.0
Prov. Kalimantan Selatan	2006	1.123.626,37	877586.0	14.035.000	454.434,81	2,5333	39.235,88	238.366,97	149.688,73	582.100,83	499088.0
Prov. Kalimantan Timur	2006	4.156.776,47	4132901.	30.382.000	694.849,78	7,8395	120.602,00	265.592,00	2.526.721,83	813.167,00	987208.0
Prov. Sulawesi Utara	2006	677.212,47	499584.0	12.745.000	158.600,87	0,5988	9.961,10	247.873,00	27.606,57	208.779,33	165112.0
Prov. Sulawesi Tengah	2006	598.379,26	520135.0	11.752.000	120.026,30	0,7114	14.705,45	271.756,00	37.705,56	145.166,38	126470.0
Prov. Sulawesi Selatan	2006	1.364.615,81	1113193.	36.422.000	565.425,35	3,6021	48.800,34	332.725,00	143.947,73	694.281,76	630273.0
Prov. Sulawesi Tenggara	2006	629.336,68	444404.0	8.027.000	74.062,03	0,7758	14.429,48	254.162,00	29.772,45	136.664,70	73526.50
Prov. Bali	2006	1.233.861,86	871491.0	21.072.000	663.349,78	0,7204	8.325,50	199.924,00	61.440,43	720.232,45	715165.0
Prov. Nusa Tenggara Barat	2006	787.124,59	555007.0	9.867.000	146.983,51	1,5188	27.788,05	249.887,00	76.069,11	249.352,52	157153.0

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Prov. Nusa Tenggara Timur	2006	673.034,05	555757.0	22.209.000	85.548,57	1,4837	22.279,31	305.473,78	44.477,57	151.158,64	93073.30
Prov. Maluku	2006	587.969,73	482517.0	2.237.000	51.141,21	1,2098	18.685,50	279.055,00	42.470,30	96.006,53	52361.20
Prov. Papua	2006	2.944.751,51	910494.0	5.307.000	136.301,54	1,0406	10.192,02	418.866,94	146.466,64	158.074,08	170515.0
Prov. Maluku Utara	2006	440.396,52	393384.0	36.288.000	24.466,68	0,0383	6.092,24	229.229,90	53.012,24	32.002,45	18722.80
Prov. Banten	2006	1.952.369,61	1504248.	58.107.000	1.037.938,70	0,1857	2.657,50	198.018,00	324.469,10	1.240.953,34	1149293.
Prov. Bangka Belitung	2006	512.921,76	452792.0	8.707.000	172.164,30	0,0474	1.082,00	187.358,00	59.641,93	175.330,29	176329.0
Prov. Gorontalo	2006	471.107,33	323505.0	2.028.000	37.409,81	0,2809	15.278,00	211.012,99	13.073,67	46.739,89	27157.40
Prov. Riau Kepulauan	2006	870.571,64	359943.0	29.397.000	161.513,14	0,0218	420,00	25.963,00	199.989,62	235.536,00	160157.0
Prov. Irian JayaBarat	2006	508.016,83	296683.0	12.620.000	12.066,64	0,0000	0,00	128.243,00	114.059,18	12.143,88	-172073.0
Prov. Sulawesi Barat	2006	292.482,05	73897.60	3.107.000	20.311,41	0,0177	210,00	65.520,07	13.650,00	30.108,30	-7.392.420
Prov. NAD	2007	1.966.055,65	2467475.	15.604.000	158.055,01	0,0013	8.327,51	460.881,00	1.305.454,00	587.510,09	307223.0
Prov. Sumatera Utara	2007	2.560.723,36	2098637.	93.347.000	1.283.750,00	0,0073	13.611,81	539.718,00	198.935,00	1.693.846,30	1443789.
Prov. Sumatera Barat	2007	1.245.441,50	1085768.	30.950.000	384.635,00	0,0062	32.386,37	477.029,00	52.328,00	571.526,26	439718.0
Prov. Riau	2007	3.726.765,11	2864169.	83.371.000	742.150,50	0,0214	35.953,28	92.158,00	1.719.300,00	1.257.064,42	944532.0
Prov. Jambi	2007	980.197,73	982547.0	257.499.000	297.816,17	0,0135	22.819,12	374.300,00	157.735,04	451.050,87	343374.0
Prov. Sumatera Selatan	2007	2.328.231,68	1771064.	52.215.000	544.123,13	0,0035	11.353,18	421.381,00	562.201,84	847.953,87	655750.0
Prov. Bengkulu	2007	664.760,15	644931.0	6.611.000	88.688,08	0,0119	37.402,25	378.050,00	19.773,60	319.766,38	102130.0
Prov. Lampung	2007	1.152.311,82	1209993.	3.440.000	419.183,33	0,0466	61.552,45	460.898,00	148.914,17	674.693,66	484774.0
Prov. DKI Jakarta	2007	17.284.146,86	14000000	312.827.000	7.400.000,00	0,3094	676.004,43	772.000,00	5.612.000,00	8.733.022,67	8665493.
Prov. Jawa Barat	2007	5.341.776,47	4141126.	150.683.000	3.226.532,50	0,0169	30.807,39	565.753,00	540.786,71	4.221.668,70	3603743.
Prov. Jawa Tengah	2007	3.039.934,54	3466892.	271.249.000	2.180.000,00	0,1429	301.213,53	890.402,00	258.450,00	2.932.795,57	2468060.
Prov. DI Yogyakarta	2007	977.994,24	959398.0	17.536.000	387.406,29	0,0106	16.979,70	402.484,00	46.495,28	488.685,75	434058.0
Prov. Jawa Timur	2007	3.928.944,37	4277223.	24.768.000	3.183.000,00	0,1359	261.100,68	820.773,00	349.000,00	4.164.250,66	3566069.
Prov. Kalimantan Barat	2007	992.180,03	1200400.	24.452.000	298.370,93	0,0139	32.931,58	586.027,00	57.810,10	436.737,89	357780.0
Prov. Kalimantan Tengah	2007	978.628,83	1053312.	96.613.000	150.395,00	0,0072	17.201,58	552.000,00	79.500,00	273.180,27	194222.0
Prov. Kalimantan Selatan	2007	1.024.547,51	1111105.	14.854.000	514.510,00	0,0274	70.573,56	378.580,00	115.904,87	700.985,44	576968.0

Prov. Kalimantan Timur	2007	4.689.695,91	2530505.	32.441.000	640.540,00	0,0841	2.570,76	257.108,00	1.309.684,00	1.410.769,28	813126.0
Prov. Sulawesi Utara	2007	704.082,20	756483.0	13.473.000	156.428,00	0,0069	4.723,42	404.324,00	30.978,35	252.324,24	180148.0
Prov. Sulawesi Tengah	2007	701.626,24	837655.0	12.672.000	120.219,50	0,0103	13.637,32	477.668,00	23.978,55	194.190,57	147901.0
Prov. Sulawesi Selatan	2007	1.835.559,76	1380224.	38.868.000	588.450,00	0,0340	57.410,12	509.540,00	113.213,93	993.176,44	671909.0
Prov. Sulawesi Tenggara	2007	614.204,55	759234.0	8.643.000	99.251,08	0,0101	16.656,74	426.354,00	41.241,98	140.365,47	120970.0
Prov. Bali	2007	996.477,19	1128393.	22.185.000	647.230,67	0,0058	15.321,96	353.306,00	77.603,54	834.475,06	715806.0
Prov. Nusa Tenggara Barat	2007	834.986,03	833357.0	10.369.000	178.140,29	0,0194	28.368,68	404.130,00	78.000,00	328.632,65	208272.0
Prov. Nusa Tenggara Timur	2007	910.232,54	834061.0	18.402.000	96.095,61	0,0155	31.666,97	479.436,00	34.203,60	198.307,23	122662.0
Prov. Maluku	2007	601.737,73	724804.0	2.359.000	61.907,77	0,0130	23.264,43	425.137,00	39.394,45	104.147,49	79815.60
Prov. Papua	2007	5.554.096,43	1633537.	5.549.000	124.301,89	0,0071	20.526,26	810.236,59	222.409,05	345.419,70	207257.0
Prov. Maluku Utara	2007	517.715,47	568975.0	36.854.000	17.000,00	0,0042	7.793,05	338.605,00	55.990,35	57.107,81	22786.60
Prov. Banten	2007	1.889.126,37	1686521.	61.342.000	1.210.841,00	0,0019	3.052,57	245.294,00	297.696,61	1.298.365,30	1341091.
Prov. Bangka Belitung	2007	636.425,23	544069.0	9.054.000	168.858,29	0,0008	1.265,79	275.690,00	20.507,51	203.541,90	178708.0
Prov. Gorontalo	2007	459.239,66	492865.0	2.176.000	43.044,89	0,0107	0,00	319.390,00	4.100,00	70.078,99	44326.70
Prov. Riau Kepulauan	2007	1.277.317,72	689671.0	30.861.000	229.116,00	0,0003	352,16	178.000,00	222.075,00	325.833,68	252786.0
Prov. Irian JayaBarat	2007	678.748,22	719793.0	13.364.000	6.000,00	0,0000	73,10	350.541,00	166.505,42	32.795,54	22387.30
Prov. Sulawesi Barat	2007	678.748,00	386508.0	3.321.000	28.758,80	0,0001	0,00	255.207,00	11.595,00	32.795,54	22385.80
Prov. NAD	2008	5.715.623,67	3170454.	16.369.000	362.835,20	0,0045	12.201,89	487.934,00	1.694.561,00	721.708,10	570550.0
Prov. Sumatera Utara	2008	2.284.013,87	2618829.	99.792.000	1.542.508,89	0,0073	29.409,17	657.357,00	293.724,30	2.181.311,59	1748554.
Prov. Sumatera Barat	2008	1.637.700,49	1319575.	32.913.000	479.453,17	0,0174	50.673,62	546.332,00	87.533,69	790.087,77	554301.0
Prov. Riau	2008	3.345.650,52	3490884.	86.213.000	926.592,21	0,0194	28.016,66	277.659,00	1.858.286,29	1.521.892,85	1179551.
Prov. Jambi	2008	1.206.212,28	1244135.	274.180.000	372.446,51	0,0123	27.282,99	415.018,00	264.263,66	626.524,99	439417.0
Prov. Sumatera Selatan	2008	2.072.951,38	2344785.	55.262.000	748.373,44	0,0061	13.507,72	510.197,00	770.700,60	1.142.995,89	908367.0
Prov. Bengkulu	2008	1.183.540,35	763476.0	7.009.000	148.121,70	0,0201	42.495,51	405.858,00	39.798,24	289.078,26	172054.0
Prov. Lampung	2008	1.295.631,21	1444651.	3.633.000	567.498,75	0,0331	71.175,34	509.656,00	177.128,80	891.531,46	654978.0
Prov. DKI Jakarta	2008	15.956.526,09	15000000	332.971.000	7.202.527,44	0,3640	395.639,56	119.943,00	7.025.026,00	10.455.565,53	8510287.

Prov. Jawa Barat	2008	4.333.470,48	5631468.	159.110.000	3.889.839,39	0,0166	35.398,71	933.436,00	822.658,28	5.275.051,50	4395843.
Prov. Jawa Tengah	2008	3.478.349,96	4012815.	287.814.000	2.422.799,02	0,1622	321.963,37	1.050.732,00	328.964,03	3.698.843,48	2757764.
Prov. DI Yogyakarta	2008	1.252.415,17	1050674.	18.292.000	434.898,89	0,0091	29.259,90	437.379,00	43.543,83	632.883,06	489546.0
Prov. Jawa Timur	2008	6.639.780,93	5433542.	26.261.000	3.574.886,24	0,1406	309.323,37	1.091.155,00	664.741,13	5.212.319,32	4053802.
Prov. Kalimantan Barat	2008	1.360.959,91	1349265.	25.922.000	365.324,75	0,0177	39.085,75	610.890,00	100.717,64	586.814,66	437747.0
Prov. Kalimantan Tengah	2008	1.142.401,16	1242196.	97.803.000	226.464,41	0,0093	23.495,50	571.290,00	155.284,03	380.665,56	286623.0
Prov. Kalimantan Selatan	2008	1.545.688,70	1153510.	15.755.000	563.757,93	0,0380	22.106,74	427.994,00	54.739,37	1.052.276,69	630523.0
Prov. Kalimantan Timur	2008	5.640.402,90	3512280.	34.714.000	1.056.568,99	0,0014	182.804,92	235.743,00	1.846.281,00	2.070.292,60	1316026.
Prov. Sulawesi Utara	2008	914.131,75	894544.0	14.344.000	212.415,37	0,0025	6.049,79	447.094,54	49.402,22	322.442,17	247787.0
Prov. Sulawesi Tengah	2008	954.733,64	961237.0	13.684.000	167.521,65	0,0073	19.037,29	502.129,00	59.963,47	268.167,99	205680.0
Prov. Sulawesi Selatan	2008	1.710.792,15	1861265.	41.332.000	850.491,37	0,0309	72.972,98	599.508,00	210.518,11	1.238.690,40	977476.0
Prov. Sulawesi Tenggara	2008	826.640,13	844518.0	9.332.000	99.492,41	0,0090	19.752,81	461.841,00	62.822,38	301.739,71	127129.0
Prov. Bali	2008	1.091.253,63	1486310.	23.497.000	735.938,83	0,0083	19.002,05	536.533,00	68.541,00	1.055.500,06	832018.0
Prov. Nusa Tenggara Barat	2008	921.721,51	980344.0	10.902.000	258.830,92	0,0153	36.680,36	447.658,00	86.795,26	413.161,19	302116.0
Prov. Nusa Tenggara Timur	2008	984.233,46	994296.0	19.200.000	112.971,62	0,0171	32.817,66	553.589,00	54.739,37	237.286,16	151145.0
Prov. Maluku	2008	780.644,64	836850.0	2.501.000	67.143,37	0,0125	19.480,37	476.048,00	59.128,98	120.041,35	92950.90
Prov. Papua	2008	5.660.539,30	2045142.	5.934.000	194.176,03	0,0111	19.710,39	876.295,00	417.686,65	357.741,75	309161.0
Prov. Maluku Utara	2008	621.659,76	683418.0	35.983.000	38.152,30	0,0042	4.855,11	370.724,00	91.574,94	75.338,21	52760.50
Prov. Banten	2008	1.661.969,79	1827777.	65.047.000	1.246.280,79	0,0016	3.184,53	330.597,00	277.207,09	1.661.168,63	1387265.
Prov. Bangka Belitung	2008	776.090,98	703002.0	9.465.000	173.292,13	0,0007	3.000,95	319.357,00	86.968,95	294.762,82	194542.0
Prov. Gorontalo	2008	504.135,92	477405.0	2.339.000	59.221,75	0,0000	0,00	291.394,00	17.506,31	94.942,31	60215.60
Prov. Riau Kepulauan	2008	1.148.936,85	1136259.	32.695.000	301.504,80	0,0002	1.903,57	333.332,99	328.964,03	406.282,78	358935.0
Prov. Irian JayaBarat	2008	1.615.633,85	950788.0	14.275.000	25.436,80	0,0000	21,67	464.871,00	189.697,46	76.490,05	58310.90
Prov. Sulawesi Barat	2008	499.122,77	458724.0	3.568.000	25.436,80	0,0000	1.346,14	279.253,00	39.798,24	61.855,62	24015.80

Lampiran 2

$$BD = \beta_0 + \beta_1 DAU + \beta_2 DBH + \beta_3 PAD + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$PAD = \beta_4 + \beta_5 DAU + \beta_6 DP + \beta_7 BD + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Reduced Form 1 :

$$BD = \beta_0 + \beta_1 DAU + \beta_2 DBH + \beta_3 PAD + e_1$$

$$BD = \beta_0 + \beta_1 DAU + \beta_2 DBH + \beta_3(\beta_4 + \beta_5 DAU + \beta_6 BD + \beta_7 DP + e_2) + e_1$$

$$BD = \beta_0 + \beta_1 DAU + \beta_2 DBH + \beta_3\beta_0 + \beta_3\beta_1 DAU + \beta_3\beta_2 BD + \beta_3\beta_3 DP + \beta_3e_2 + e_1$$

$$(1 - \beta_3\beta_2)BD = (\beta_0 + \beta_3\beta_0) + (\beta_1 + \beta_3\beta_1)DAU + \beta_2 DBH + \beta_3\beta_3 DP + (\beta_3e_2 + e_1)$$

$$BD = \frac{(\beta_0 + \beta_3\beta_0)}{(1 - \beta_3\beta_2)} + \frac{\beta_2}{(1 - \beta_3\beta_2)} DBH + \frac{(\beta_1 + \beta_3\beta_1)}{(1 - \beta_3\beta_2)} DAU + \frac{\beta_3\beta_3}{(1 - \beta_3\beta_2)} DP + \frac{(\beta_3e_2 + e_1)}{(1 - \beta_3\beta_2)}$$

$$BD = \Pi_0 + \Pi_1 DBH + \Pi_2 DAU + \Pi_3 DP + \mu_1$$

$$\text{Dimana, } \Pi_0 = \frac{(\beta_0 + \beta_3\beta_0)}{(1 - \beta_3\beta_2)}, \Pi_1 = \frac{\beta_2}{(1 - \beta_3\beta_2)}, \Pi_2 = \frac{(\beta_1 + \beta_3\beta_1)}{(1 - \beta_3\beta_2)}, \Pi_3 = \frac{\beta_3\beta_3}{(1 - \beta_3\beta_2)}, \mu_1 = \frac{(\beta_3e_2 + e_1)}{(1 - \beta_3\beta_2)}$$

Reduced Form 2 :

$$PAD = \beta_4 + \beta_5 DAU + \beta_6 TX + \beta_7 BD + e_2$$

$$PAD = \beta_4 + \beta_5 DAU + \beta_6 TX + \beta_7(\beta_0 + \beta_1 DAU + \beta_2 DBH + \beta_3 PAD + e_1) + e_{2t}$$

$$PAD = \beta_4 + \beta_5 DAU + \beta_6 TX + \beta_7 \beta_0 + \beta_7 \beta_1 DAU + \beta_7 \beta_2 DBH + \beta_7 \beta_3 PAD + \beta_7 e_1 + e_2$$

$$(1 - \beta_7 \beta_3) PAD = (\beta_4 + \beta_7 \beta_0) + (\beta_5 + \beta_7 \beta_1) DAU + \beta_7 \beta_2 DBH + (\beta_7 e_1 + e_2)$$

$$PAD_{it} = \left(\frac{\quad}{\quad} \right) + \left(\frac{\quad}{\quad} \right) DBH + \left(\frac{\quad}{\quad} \right) DAU + \left(\frac{\quad}{\quad} \right) DP + \left(\frac{\quad}{\quad} \right)$$

$$PAD_{it} = \Pi_4 + \Pi_5 DAU_{it} + \Pi_6 DBH_{it} + \Pi_7 TX_{it} + \mu_2$$

$$\text{Dimana, } \Pi_4 = \left(\frac{\quad}{\quad} \right), \Pi_5 = \left(\frac{\quad}{\quad} \right), \Pi_6 = \left(\frac{\quad}{\quad} \right), \Pi_7 = \left(\frac{\quad}{\quad} \right), \mu_2 = \left(\frac{\quad}{\quad} \right)$$

Lampiran 3

Regresi Reduced Form Persamaan Struktural 1

Dependent Variable: BD
 Method: Least Squares
 Date: 09/20/10 Time: 21:39
 Sample: 1 99
 Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DBH_T1	2.447063	0.086838	28.17962	0.0000
DAU_T1	4.200192	0.478942	8.769733	0.0000
DP_T1	65231.94	32196.37	2.026065	0.0456
C	-823426.2	214140.6	-3.845260	0.0002
R-squared	0.906681	Mean dependent var	2218529.	
Adjusted R-squared	0.903734	S.D. dependent var	3021023.	
S.E. of regression	937324.4	Akaike info criterion	30.37901	
Sum squared resid	8.35E+13	Schwarz criterion	30.48386	
Log likelihood	-1499.761	F-statistic	307.6718	
Durbin-Watson stat	1.734443	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 4

Regresi Reduced Form Persamaan Struktural 2

Dependent Variable: PAD
 Method: Least Squares
 Date: 09/20/10 Time: 21:42
 Sample: 1 99
 Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAU_T1	3.102816	0.434519	7.140797	0.0000
DP_T1	83533.33	29210.12	2.859739	0.0052
DBH_T1	1.287171	0.078784	16.33803	0.0000
C	-975243.7	194278.8	-5.019815	0.0000
R-squared	0.790073	Mean dependent var		1099965.
Adjusted R-squared	0.783443	S.D. dependent var		1827388.
S.E. of regression	850386.6	Akaike info criterion		30.18433
Sum squared resid	6.87E+13	Schwarz criterion		30.28919
Log likelihood	-1490.125	F-statistic		119.1792
Durbin-Watson stat	1.732807	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 5

Regresi Persamaan Struktural 1

Dependent Variable: GE
 Method: Least Squares
 Date: 09/20/10 Time: 19:09
 Sample: 1 99
 Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAU_T1	3.156084	1.356658	2.326367	0.0222
DBH_T1	1.625063	0.473051	3.435281	0.0009
PAD_F	0.639647	0.362125	1.766368	0.0806
D2	-600279.5	231371.2	-2.594443	0.0110
D3	-966800.3	242038.8	-3.994402	0.0001
C	-36231.95	387723.8	-0.093448	0.9257
R-squared	0.920434	Mean dependent var	2218529.	
Adjusted R-squared	0.916156	S.D. dependent var	3021023.	
S.E. of regression	874763.4	Akaike info criterion	30.25999	
Sum squared resid	7.12E+13	Schwarz criterion	30.41727	
Log likelihood	-1491.869	F-statistic	215.1669	
Durbin-Watson stat	1.921496	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 6

Uji Park Persamaan Struktural 1

Dependent Variable: LOG(E12)

Method: Least Squares

Date: 09/20/10 Time: 19:11

Sample: 1 99

Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.289931	7.074847	0.747710	0.4568
LOG(DAU_T1)	0.916981	0.566292	1.619272	0.1093
LOG(DBH_T1)	0.699342	0.216075	3.236577	0.0018
LOG(PAD_F)	0.011318	0.233489	0.048473	0.9615
R-squared	0.235651	Mean dependent var	25.71287	
Adjusted R-squared	0.206988	S.D. dependent var	2.250438	
S.E. of regression	2.004043	Akaike info criterion	4.274659	
Sum squared resid	321.2952	Schwarz criterion	4.390412	
Log likelihood	-175.5357	F-statistic	8.221397	
Durbin-Watson stat	2.118388	Prob(F-statistic)	0.000078	

Lampiran 7

Regresi Persamaan Struktural 2

Dependent Variable: PAD
 Method: Least Squares
 Date: 09/20/10 Time: 19:13
 Sample: 1 99
 Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAU_T1	1.376925	0.510004	2.699833	0.0082
DP_T1	43229.03	29087.17	1.486189	0.1406
BD_F	0.527509	0.031895	16.53904	0.0000
D2	-335854.1	221975.6	-1.513023	0.1337
D3	-464039.0	232171.7	-1.998689	0.0486
C	-465562.5	197164.8	-2.361286	0.0203
R-squared	0.799903	Mean dependent var	1099965.	
Adjusted R-squared	0.789145	S.D. dependent var	1827388.	
S.E. of regression	839116.8	Akaike info criterion	30.17678	
Sum squared resid	6.55E+13	Schwarz criterion	30.33406	
Log likelihood	-1487.751	F-statistic	74.35497	
Durbin-Watson stat	1.829899	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 8

Uji Park Persamaan Struktural 2

Dependent Variable: LOG(E12)

Method: Least Squares

Date: 09/20/10 Time: 19:15

Sample: 1 99

Included observations: 97

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.31820	5.472285	1.885538	0.0625
LOG(DAU_T1)	-0.113559	0.461931	-0.245835	0.8064
LOG(DP_T1)	0.177574	0.178383	0.995461	0.3221
LOG(BD_F)	1.173340	0.249969	4.693935	0.0000
R-squared	0.258168	Mean dependent var	25.54933	
Adjusted R-squared	0.234237	S.D. dependent var	2.223035	
S.E. of regression	1.945330	Akaike info criterion	4.209103	
Sum squared resid	351.9407	Schwarz criterion	4.315277	
Log likelihood	-200.1415	F-statistic	10.78841	
Durbin-Watson stat	2.066148	Prob(F-statistic)	0.000004	

Lampiran 9

Regresi Persamaan Deteksi Ilusi Fiskal

Dependent Variable: LN(BD)

Method: Least Squares

Date: 09/21/10 Time: 04:46

Sample: 1 132

Included observations: 126

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN(PDRB)	-0.070713	0.036325	-1.946682	0.0539
LN(TAX)	0.284053	0.044986	6.314218	0.0000
LN(HCT)	0.006689	0.014329	0.466808	0.6415
LN(DAU)	0.320067	0.066338	4.824807	0.0000
LN(DBH)	0.353983	0.034989	10.11713	0.0000
C	3.277474	0.883146	3.711135	0.0003
R-squared	0.829564	Mean dependent var	14.07079	
Adjusted R-squared	0.822463	S.D. dependent var	0.905213	
S.E. of regression	0.381413	Akaike info criterion	0.956581	
Sum squared resid	17.45711	Schwarz criterion	1.091642	
Log likelihood	-54.26457	F-statistic	116.8155	
Durbin-Watson stat	2.030717	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 10

Regresi Parsial I

Dependent Variable: LN_PDRB

Method: Least Squares

Date: 09/21/10 Time: 05:52

Sample: 1 132

Included observations: 126

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_TAX	0.479332	0.103811	4.617331	0.0000
LN_HCT	-0.009217	0.035852	-0.257073	0.7976
LN_DAU	-0.079876	0.165863	-0.481577	0.6310
LN_DBH	0.199425	0.085668	2.327890	0.0216
C	9.494875	2.034713	4.666445	0.0000
R-squared	0.451609	Mean dependent var	17.03510	
Adjusted R-squared	0.433480	S.D. dependent var	1.268216	
S.E. of regression	0.954554	Akaike info criterion	2.783730	
Sum squared resid	110.2521	Schwarz criterion	2.896280	
Log likelihood	-170.3750	F-statistic	24.91135	
Durbin-Watson stat	1.979506	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 11

Regresi Parsial II

Dependent Variable: LN_TAX

Method: Least Squares

Date: 09/21/10 Time: 05:54

Sample: 1 132

Included observations: 126

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_PDRB	0.312522	0.067685	4.617331	0.0000
LN_HCT	0.123958	0.026674	4.647081	0.0000
LN_DAU	0.565919	0.123792	4.571549	0.0000
LN_DBH	0.445362	0.057966	7.683176	0.0000
C	-4.731441	1.732070	-2.731668	0.0072
R-squared	0.677315	Mean dependent var	12.80488	
Adjusted R-squared	0.666648	S.D. dependent var	1.334970	
S.E. of regression	0.770767	Akaike info criterion	2.356013	
Sum squared resid	71.88392	Schwarz criterion	2.468564	
Log likelihood	-143.4288	F-statistic	63.49471	
Durbin-Watson stat	1.812263	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 12

Regresi Parsial III

Dependent Variable: LN_HCT

Method: Least Squares

Date: 09/21/10 Time: 05:55

Sample: 1 132

Included observations: 126

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_PDRB	-0.059227	0.230391	-0.257073	0.7976
LN_TAX	1.221747	0.262906	4.647081	0.0000
LN_DAU	-1.263848	0.404877	-3.121558	0.0023
LN_DBH	-0.538350	0.216514	-2.486442	0.0143
C	4.580185	5.587417	0.819732	0.4140
R-squared	0.192257	Mean dependent var	-3.552178	
Adjusted R-squared	0.165554	S.D. dependent var	2.648974	
S.E. of regression	2.419785	Akaike info criterion	4.644108	
Sum squared resid	708.4985	Schwarz criterion	4.756659	
Log likelihood	-287.5788	F-statistic	7.200010	
Durbin-Watson stat	0.652155	Prob(F-statistic)	0.000031	

Lampiran 13

Regresi Parsial IV

Dependent Variable: LN_DAU

Method: Least Squares

Date: 09/21/10 Time: 05:57

Sample: 1 132

Included observations: 126

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_PDRB	-0.023950	0.049732	-0.481577	0.6310
LN_TAX	0.260251	0.056928	4.571549	0.0000
LN_HCT	-0.058969	0.018891	-3.121558	0.0023
LN_DBH	-0.115929	0.046776	-2.478412	0.0146
C	11.15065	0.661176	16.86487	0.0000
R-squared	0.178574	Mean dependent var	12.88987	
Adjusted R-squared	0.151419	S.D. dependent var	0.567408	
S.E. of regression	0.522688	Akaike info criterion	1.579209	
Sum squared resid	33.05750	Schwarz criterion	1.691760	
Log likelihood	-94.49015	F-statistic	6.576188	
Durbin-Watson stat	1.423946	Prob(F-statistic)	0.000080	

Lampiran 14

Regresi Parsial V

Dependent Variable: LN_DBH

Method: Least Squares

Date: 09/21/10 Time: 05:58

Sample: 1 132

Included observations: 126

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_PDRB	0.214948	0.092336	2.327890	0.0216
LN_TAX	0.736242	0.095825	7.683176	0.0000
LN_HCT	-0.090295	0.036315	-2.486442	0.0143
LN_DAU	-0.416738	0.168147	-2.478412	0.0146
C	3.992848	2.265745	1.762268	0.0805
R-squared	0.551723	Mean dependent var	12.03105	
Adjusted R-squared	0.536904	S.D. dependent var	1.456269	
S.E. of regression	0.991008	Akaike info criterion	2.858685	
Sum squared resid	118.8337	Schwarz criterion	2.971236	
Log likelihood	-175.0971	F-statistic	37.23065	
Durbin-Watson stat	2.021735	Prob(F-statistic)	0.000000	